



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2013-2018**

F

2013

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 16 Muara Enim

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 – 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013-2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Muara Enim, Tahun 2013-2018 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Daerah sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD Kabupaten Muara Enim disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

- (2) Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam naskah RPJMD Kabupaten Muara Enim yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018, dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 18 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 11

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar Bupati Kabupaten Muara Enim	i
	Kata Pengantar Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim	ii
	Daftar Isi	iii
	Daftar Tabel	iv
	Daftar Gambar	vi
Bab I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3	Hubungan Antardokumen	1-5
1.4	Sistematika Penulisan	1-7
1.5	Maksud dan Tujuan	1-8
Bab II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-10
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-35
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-70
Bab III	GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-8
3.3	Kerangka Pendanaan	III-22
Bab IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2	Isu Strategis	IV-4
Bab V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-3
Bab VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1	Strategi	VI-1
6.2	Arah kebijakan	VI-8
Bab VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
Bab VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
Bab IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
Bab X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN	X-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan dokumen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan RPJMD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Sementara berdasarkan pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) serta berkelanjutan (*sustainable*).

Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Pendekatan politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian dijabarkan kedalam visi misi rencana pembangunan jangka menengah;
- b. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan (khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana);
- c. Pendekatan partisipatif, dimana perencanaan harus melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan antara lain melalui pelaksanaan musrenbang;
- d. Pendekatan *bottom up* dan *top down*, dimana perencanaan dilakukan sesuai jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa.

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Juni 2013, maka disusun RPJMD yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Berdasarkan pasal 150

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah

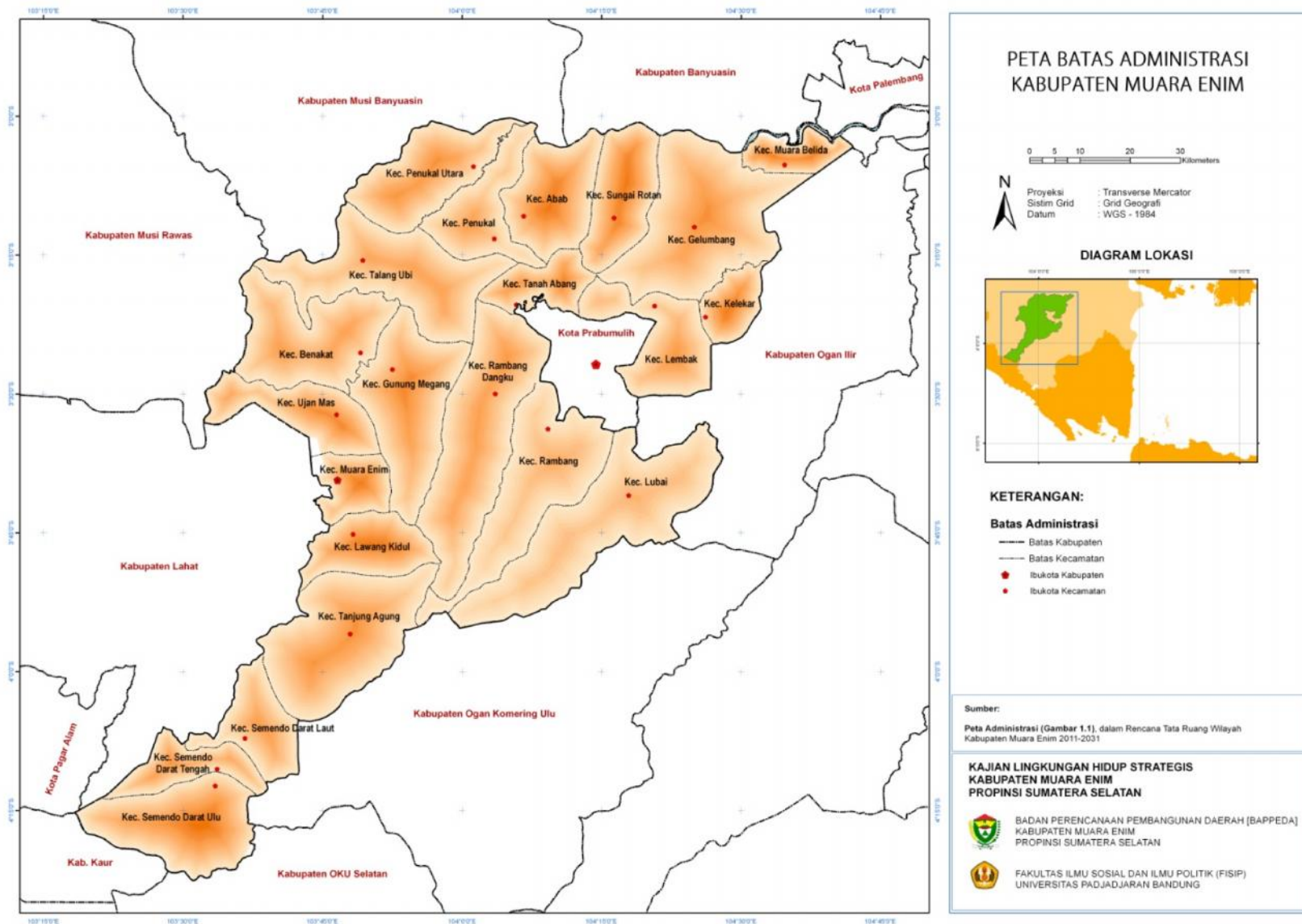
Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis terletak pada posisi antara 4° – 6° Lintang Selatan dan 104° – 106° Bujur Timur. Kabupaten Muara Enim mempunyai wilayah cukup luas dan mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah dengan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim sekitar 7.383,9 km² terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Palembang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Kota Palembang dan Kota Prabumulih.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat.

Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim terbagi menjadi 20 Kecamatan yang terdiri dari 326 desa/kelurahan yaitu 310 desa dan 16 kelurahan. Ibukota terletak di Kecamatan Muara Enim. Jarak terjauh dari ibu kota Kabupaten Muara Enim ke ibu kota kecamatan adalah Kecamatan Muara Belida yaitu sejauh 160 km. Selanjutnya adalah Kecamatan Sungai Rotan yaitu sejauh 150 km, Kecamatan Rambang sejauh 122 km, dan Kecamatan Gelumbang sejauh 121 km. Sementara yang terdekat adalah Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas.

Kabupaten Muara Enim terdiri dari 20 kecamatan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Lubai yaitu seluas 984,72 km² (10,80 persen) dari total luas wilayah Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya, Kecamatan Gunung Megang seluas 666,40 km² (7,30 persen) dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Gelumbang seluas 644,2 km² (7 persen) dan Kecamatan Rambang Dangku seluas 628,24 km² atau (6,9 persen) sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kelekar dengan persentase luas (1,7 persen) dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim. (Lihat Tabel 2.1)

Gambar 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Muara Enim



Topografi Kabupaten Muara Enim cukup beragam mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Sebagian besar kecamatan terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (dpl) yang meliputi 20 (dua puluh) kecamatan, dengan cakupan luas mencapai 7.058,41 km² (77,22 persen) dari luas Kabupaten Muara Enim. Lima kecamatan lainnya berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (m dpl), yaitu Kecamatan Lawang Kidul (100-500 m dpl), Kecamatan Tanjung Agung (500-800 m dpl), Kecamatan Semende Darat Tengah (1000 m dpl), Kecamatan Semende Darat Laut (500-1000 m dpl) dan Kecamatan Semende Darat Ulu (>1000 m dpl). Untuk lebih jelasnya, tinggi rata-rata, luas daerah dan jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Muara Enim

No.	Nama Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)	Luas Daerah (km ²)	Persentase dari Luas Kabupaten (%)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Semende Darat Laut	500 - 1.000	274,75	3,0	10
2	Semende Darat Ulu	> 1.000	466,60	5,1	10
3	Semende Darat Tengah	1.000	419,93	4,6	12
4	Tanjung Agung	500 - 800	539,97	5,9	26
5	Rambang	10 - 25	522,62	5,7	13
6	Lubai	28 - 100	984,72	10,8	10
7	Lawang Kidul	100 - 500	380,84	4,2	7
8	Muara Enim	25 - 100	203,80	2,2	16
9	Ujan Mas	25 - 100	268,70	2,9	8
10	Gunung Megang	25 - 100	666,40	7,3	13
11	Benakat	26 - 100	288,52	3,2	6
12	Rambang Dangku	25 - 100	628,24	6,9	26
13	Lembak	12 - 25	388,07	4,2	10
14	Sungai Rotan	11 - 25	296,14	3,2	19
15	Gelumbang	10 - 25	644,20	7,0	23
16	Muara Belida	10 - 25	176,00	1,9	8
17	Kelekar	10 - 25	151,00	1,7	7
18	Belimbing	25-100	289,7	n.a	10
19	Belida Darat	11-25	136,97	n.a	10
20	Lubai Ulu	10-25	485,82	n.a	11

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, Tahun 2013

Dengan keragaman topografi tersebut menimbulkan terbentuknya banyak bukit dan sungai. Sebagian besar wilayah Kabupaten Muara Enim (75,7 persen) terletak pada kemiringan lereng kurang dari 12^o dan 9,4 persen berada pada kemiringan lereng 12^o-40^o dan selebihnya

merupakan daerah dengan kemiringan lebih besar dari 40° sekitar (14 persen). Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Daerah ini meliputi Kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah berada di bagian tengah. Pada bagian barat laut-utara, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan aliran Sungai Musi. Daerah ini meliputi kecamatan di dataran rendah dan rawa lebak yaitu Kecamatan Gelumbang, Muara Belida, dan Sungai Rotan.

Secara geologis, Kabupaten Muara Enim diklasifikasikan dalam cekungan Sumatera pada formasi Palembang bagian tengah berumur *meocene-pleocene* dengan formasi batuan berupa endapan batuan yang berlokasi dari rendah ke tinggi seperti yang berada di Bukit Asam. Sebesar (42,23 persen) dari luas Kabupaten Muara Enim memiliki jenis tanah podzolik merah-kuning, diikuti alluvial sekitar (26,03 persen) dari luas wilayah. Tanah tersebut terutama tersebar di sekitar Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, dan Gelumbang. Sementara Asosiasi Podzolik coklat kekuning-kuningan dan hidromorf kelabu seluas (7,59 persen) tersebar di sekitar Kecamatan dan Gelumbang.

Tabel 2.2

Klasifikasi, Persentase Luas Wilayah dan Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Muara Enim

No.	Jenis Tanah	Luas Wilayah (%)	Daerah Sebaran/Kecamatan
1.	Alluvial	26,03	Tanjung Agung, Muara Enim, Gelumbang, Kelekar, Lembak, dan Sungai Rotan.
2.	Regosol	2,63	Semende
3.	Podsolik Merah Kuning	42,23	Tanjung Agung, Muara Enim, Gelumbang, Lawang Kidul, Kelekar, dan Lembak
4.	Latosol	7,64	Tanjung Agung, Lawang Kidul, dan Semende
5.	Andosol	5,54	Tanjung Agung, Lawang Kidul, dan Semende
6.	Asosiasi Gley	6,79	Gelumbang, Kelekar, Lembak, dan Sungai Rotan
7.	Asosiasi Latosol dan Litosol	0,59	Tanjung Agung, Lawang Kidul
8.	Asosiasi Podsolik Coklat kekuningan	7,59	Gelumbang, Kelekar, Lembak, Sungai Rotan, dan Muara Belida
9.	Komplek Podsolik dan Latosol	0,96	Semende

Sumber: Muara Enim dalam Angka 2013, BPS

Pemanfaatan lahan di Muara Enim terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan ini pada dasarnya merupakan kawasan yang berdasarkan analisis daya dukung mempunyai keterbatasan untuk dikembangkan karena adanya faktor-faktor limitasi yang

menjadi kriteria (lereng, jenis tanah, curah hujan, ketinggian; serta zona bahaya gunung api, zona kerentanan gerakan tanah, dan zona konservasi air potensial sangat tinggi). Secara keseluruhan, pola spasial pemanfaatan ruang kawasan lindung tersebar terutama di bagian utara dan selatan Kabupaten Muara Enim.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya ini adalah kawasan pertanian, kawasan permukiman dan industri. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah barat-timur, mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi, dan tinggi, baik untuk pengembangan kawasan budidaya perdesaan/pertanian maupun perkotaan.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis perekonomian Kabupaten Muara Enim, disamping dibutuhkan sebagai penyedia pangan, penduduk Muara Enim juga tergantung pada sektor ini. Hal ini dapat terlihat dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim 83,22 persennya (760.654 Ha) merupakan lahan pertanian.

Bila dirinci menurut penggunaannya, penggunaan lahan di Kabupaten Muara Enim dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah sendiri dibedakan atas lahan untuk bangunan, ladang, hutan, kolam, perkebunan dan lahan lainnya.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa luas lahan sawah lambat laun semakin berkurang dari tahun ke tahun sejalan dengan banyaknya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.

Pembangunan pertanian tanaman pangan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan dibidang ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini diupayakan melalui peningkatan produksi pangan baik kuantitas maupun kualitasnya. Lahan pertanian di kabupaten Muara Enim, menghasilkan beberapa komoditas pertanian tanaman pangan seperti: padi sawah, padi ladang, palawija, hortikultura, dan lain sebagainya.

Secara umum luas panen dan produksi padi pada tahun 2012 di Kabupaten Muara Enim mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, untuk luas panen dibanding tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 7,67 persen sedangkan untuk produksinya mengalami peningkatan sebesar 5,26 persen. Apabila dilihat berdasarkan dimana tempat padi tersebut ditanam maka hasilnya bervariasi, seperti luas panen padi sawah di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 12,41 persen

dibanding tahun 2011, yaitu dari 13.257 Ha pada tahun 2011 turun menjadi 11.612 Ha pada tahun 2012.

Begitu juga dengan hasil produksi padi sawah, turun sebesar 16,96 persen dibanding tahun 2011, yaitu dari 82.245 ton pada tahun 2011 menjadi 68.298 ton pada tahun 2012. Penurunan produksi ini disebabkan selain perubahan fungsi lahan juga banyak dipengaruhi oleh faktor perubahan musim yang tidak menentu. Sebaliknya untuk padi ladang baik luas panen maupun produksinya justru mengalami peningkatan, dari 14.395 Ha menjadi 17.957 Ha atau naik sebesar 24,74. Sedangkan produksinya dari 51.398 ton menjadi 62.394 ton atau naik sekitar 21,39 persen.

Sementara itu, dari hasil produksi tanaman palawija terlihat bahwa terjadi penurunan produksi hampir seluruh tanaman palawija, kecuali kacang tanah, dikarenakan adanya penurunan luas panen.

Pada komoditas hortikultura, produksi buah-buahan pada tahun 2012 sebagian besar setiap jenis komoditi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun yang paling berpotensi adalah buah nanas, pisang, rambutan dan durian. Sementara untuk produksi sayur-sayuran sebagian besar komoditas mengalami penurunan pada tahun 2012, seperti kentang, tomat, bawang daun, buncis, kangkung, bayam, kacang panjang, terung dan cabai.

Komoditas perkebunan yang menjadi produk unggulan di kabupaten Muara Enim adalah komoditi karet, sawit dan kopi. Pada tahun 2012 ketiga komoditas tersebut mengalami peningkatan produksi dibanding tahun sebelumnya, selain itu jumlah keluarga petani ketiga komoditas tersebut mencapai 216.535 kepala keluarga.

Produksi perikanan pada tahun 2012 di Muara Enim berjumlah 8.254 ton yang berasal dari perairan budi daya sebesar 4.164,9 ton dan perairan umum sebesar 4.089,37 ton. Selama periode tahun 2009-2012 produksi ikan di Kabupaten Muara Enim selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Seiring dengan meningkatnya produksi ikan di Kabupaten Muara Enim, konsumsi ikan perkapita Kabupaten Muara Enim pada periode 2009 sampai 2012 juga selalu mengalami peningkatan. Peningkatan daya serap konsumsi ikan sangat terbuka lebar karena harganya lebih murah daripada komoditas daging sehingga perkembangan produksinya mempunyai potensi yang besar untuk meningkat di masa yang akan datang.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diindikasikan sering terjadi bencana banjir, longsor, gunung api, gempa, tsunami, badai, kebakaran hutan dan puting beliung yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara menyeluruh.

Sebaran kawasan rawan bencana, sebagai berikut:

a. Kawasan Rawan Erosi

Kawasan yang merupakan kawasan rawan bencana erosi tersebar di Kecamatan Rambang dengan luas lebih kurang 12.210 ha dan Kecamatan Rambang Dangku dengan luas lebih kurang 14.268 ha. Kawasan ini merupakan kawasan yang vegetasi hutannya sudah jarang dan perlu dilakukan penghijauan kembali (reboisasi), mengingat kecamatan ini sebagian besar termasuk dalam wilayah dataran tinggi 100 – 500 m diatas permukaan laut.

b. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan yang paling rawan bencana banjir di Kabupaten Muara Enim berada di Kecamatan Gelumbang dengan kawasan genangan lebih kurang 15.133 ha.

2.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2012 berjumlah 629.004 jiwa, terdiri dari laki-laki 370.772 jiwa dan perempuan 360.300 jiwa dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 103. Dengan demikian, terdapat 103 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan dan kepadatan penduduk (*density*) mencapai 80 jiwa per km².

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2008 yang berjumlah 660.906 jiwa, maka pertumbuhan penduduk dari tahun 2008 sampai dengan 2011 sebesar 10,67 persen, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 2,9 persen. Pertumbuhan penduduk tersebut diikuti dengan peningkatan tingkat kepadatan penduduk dari 72 jiwa per kilometer persegi selama tahun 2008 menjadi 80 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2011.

Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Muara Enim yaitu 308 penduduk per kilometer persegi, diikuti Kecamatan Lawang Kidul sebanyak 169 penduduk dan Kecamatan Sungai Rotan sebanyak 103 penduduk. Namun sebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Lawang Kidul (64.180) dan Muara Enim (62.851). Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Muara Belida (7.750) dan Kelekar (9.574 persen).

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan
Di Kabupaten Muara Enim

No.	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1.	Semende Darat Laut	274,75	13.160	48
2.	Semende Darat Ulu	466,60	16.130	35
3.	Semende Darat Tengah	419,93	9.884	24
4.	Tanjung Agung	539,97	38.287	71
5.	Rambang	522,62	28.044	54
6.	Lubai	984,72	53.858	55
7.	Lawang Kidul	380,84	64.180	169
8.	Muara Enim	203,80	62.851	308
9.	Ujan Mas	268,70	23.691	88
10.	Gunung Megang	666,40	57.565	86
11.	Benakat	288,52	8.944	31
12.	Rambang Dangku	628,24	51.492	82
13.	Gelumbang	644,20	54.936	85
14.	Lembak	388,07	31.576	81
15.	Sungai Rotan	296,14	30.612	103
16.	Muara Belida	176,00	7.750	44
17.	Kelekar	151,00	9.574	63
18.	Belimbing	289,7	26.080	77
19.	Belida Darat	136,97	12.287	80
20.	Lubai Ulu	485,82	28.103	78
	2012	8.213	629.004	77
	2011	9.140,50	731.410	80
	2010	9.140,50	716.676	78
	2009	9.140,50	668.341	73
	2008	9.140,50	660.906	72

Sumber: Muara Enim dalam Angka 2012, BPS (diolah)

Apabila dilihat dari kelompok umur, selama tahun 2008-2011, usia produktif (15 - 64 tahun) masih mendominasi rata-rata sebesar 64 persen, sedangkan usia 0 - 14 tahun mencapai 32 persen dan penduduk usia lebih dari 65 tahun sekitar 4 persen. Perkembangan kepadatan

penduduk dan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Muara Enim tahun 2008 - 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2008 - 2011

Tahun		Kelompok Umur			Jenis Kelamin			Jumlah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM ²)
		0 - 14	15 - 64	65 +	Perempuan	Laki-laki	Rasio		
2008	Jiwa	216.664	409.598	34.644	327.153	333.753	102	660.906	72
	%	32,78	61,98	5,24	49,50	50,50		100	
2009	Jiwa	207.785	437.889	22.667	330.833	337.508	102,02	668.341	73
	%	31,09	65,52	3,39	49,50	50,50		100	
2010	Jiwa	231.863	457.424	27.389	352.712	363.294	103	716.676	78
	%	32,35	63,83	3,82	49,21	50,69		100	
2011*	Jiwa	233.466	469.785	28.159	360.300	371.110	103	731.410	80
	%	31,92	64,23	3,85	49,26	50,74		100	

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

Dilihat berdasarkan lapangan usaha/sector ekonomi dari persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha/sector ekonomi, selama tahun 2008-2011 sebagian besar penduduk Kabupaten Muara Enim bekerja pada sector pertanian. Namun penyerapan tenaga kerja sector pertanian tersebut menunjukkan kecenderungan penurunan seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama dalam sub sector pertambangan dan perdagangan masing-masing sebesar 4,29 persen dan 11,76 persen pada tahun 2011. Persentase penduduk Kabupaten Muara Enim yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2008 - 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Persentase Penduduk Kabupaten Muara Enim yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2008-2011

SEKTOR	Tahun (%)			
	2008	2009	2010	2011*
A. SEKTOR PRIMER	73,19	72,58	69,85	64,72
- Sektor Pertanian	71,14	71,42	69,85	64,72
B. SEKTOR SEKUNDER	5,31	5,79	6,7	9,75
- Sektor Pertambangan dan Penggalian	2,05	1,16	2,39	4,29
- Sektor Industri Pengolahan	1,07	2,43	2,01	2,16

SEKTOR	Tahun (%)			
	2008	2009	2010	2011*
- Sektor Listrik, gas dan Air Bersih	0,96	0,57	0,89	0,23
- Sektor Bangunan	1,23	1,63	1,41	3,07
C. SEKTOR TERSIER	23,55	22,79	23,45	25,53
- Sektor Perdagangan	9,8	8,32	8,6	11,76
- Sektor Angkutan	3,4	4,66	3,73	2,98
- Sektor Bank, LKBB, Persewaan, Bangunan, Jasa Perusahaan	0,9	0,3	0,7	0,69
- Sektor Jasa-jasa	9,44	9,51	10,42	10,1

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

Dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, komposisi penduduk menunjukkan semakin baiknya tingkat pendidikan di Kabupaten Muara Enim. Persentase penduduk yang tidak/belum tamat Sekolah Dasar (SD) semakin menurun menjadi sebesar 16,01 persen, sedangkan yang tamat SD mencapai 38,91 persen. Sementara itu, penduduk yang tamat SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi masing-masing meningkat menjadi sebesar 19,98 persen, 21,40 persen, dan 3,70 persen. Untuk lebih jelasnya, persentase penduduk Kabupaten Muara Enim umur 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2008 - 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6

Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 – 2011

PENDIDIKAN	Tahun (%)			
	2008	2009	2010	2011*
Tidak / Belum Tamat SD	21,83	21,79	16,77	16,01
Tamat SD	39,19	39,01	40,21	38,91
Tamat SMP	19,28	19,37	19,57	19,98
Tamat SMA	17,28	17,34	19,77	21,4
Akademi / Universitas	2,42	2,49	3,68	3,7

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah fokus pertama dari 3 fokus pada aspek kesejahteraan masyarakat. Fokus ini berusaha melihat kondisi ekonomi makro sebuah wilayah

yang diukur dengan beberapa indikator, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, Indeks Gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

a Pertumbuhan PDRB

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (migas) maupun tanpa migas. Rumus untuk menghitung pertumbuhan PDRB adalah:

$$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$$

Dimana:

t+1 = tahun pengamatan PDRB

t = tahun pengamatan PDRBsebelumnya

Data mengenai pertumbuhan PDRB Kabupaten Muara Enim tahun 2008 sampai 2010 didapat dari buku Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim. Data tersebut dilengkapi dengan data laju PDRB Sumatera Selatan sebagai bahan analisis perbandingan kemajuan ekonomi Kabupaten Muara Enim dengan provinsi dimana Kabupaten Muara Enim berada.

Tabel 2.7

PDRB Sumatera Selatan dan Muara Enim Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 - 2010

Lapangan Usaha	2008 r)	2009*)	2010**)
A. Sumatera Selatan			
1. Pertanian	4,09	3,11	4,42
2. Pertambangan dan Penggalian	1,53	1,62	1,21
3. Industri Pengolahan	3,42	2,14	5,76
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	5,24	5,09	6,31
5. Bangunan	6,14	7,34	8,75
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,87	3,13	6,91
7. Pengangkutan & Komunikasi	13,92	13,76	12,68
8. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	8,63	6,85	7,39
9. Jasa-jasa	11,35	9,36	7,38
PDRB dengan Migas	5,07	4,11	5,43
PDRB Tanpa Migas	6,31	5,06	6,94
B. Muara Enim			
1. Pertanian	8,39	6,08	7,25
2. Pertambangan dan Penggalian	3,82	3,25	3,27
3. Industri Pengolahan	7,00	5,27	6,38
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	5,26	5,21	6,45

Lapangan Usaha	2008 r)	2009*)	2010**)
5. Bangunan	8,31	8,56	9,29
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	7,53	5,98	8,86
7. Pengangkutan & Komunikasi	8,53	8,17	9,72
8. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	7,73	7,84	8,12
9. Jasa-jasa	9,11	9,34	9,85
PDRB dengan Migas	5,67	4,73	5,34
PDRB Tanpa Migas	6,82	6,27	7,32

Sumber: BPS Prop. Sumatera Selatan dan BPS Kab. Muara Enim dalam Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Keterangan: r) Angka revisi
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Pertumbuhan PDRB menggambarkan dinamika kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB. Untuk Kabupaten Muara Enim, terdapat tren pergeseran sektor ekonomi utama dari sektor primer ke sektor tersier. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dari 8,39% pada tahun 2008 menjadi 7,25% pada tahun 2010. Sebaliknya sektor perdagangan, hotel dan restoran terus menunjukkan tren pertumbuhan meningkat, begitu pula dengan sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

b Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Informasi mengenai laju inflasi berguna bagi pemerintah untuk memonitor harga barang dan jasa dan mengambil kebijakan khusus apabila diperlukan. Rumus untuk menghitung laju inflasi provinsi adalah sebagai berikut:

$$[(1 + \Delta \text{Inf}_1)(1 + \Delta \text{Inf}_2)(1 + \Delta \text{Inf}_t)]^{1/t} - 1$$

Dimana :

ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya

t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.

Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$$

Dimana :

Inf_n = nilai inflasi pada tahun n

$\text{Inf}_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya

n = tahun ...

Data terkait laju inflasi diperoleh dari buku Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim. Dalam buku tersebut data yang disajikan adalah mengenai Inflasi Sektoral PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 – 2010 baik untuk Provinsi Sumatera Selatan maupun Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2.8
Inflasi Sektoral PDRB Sumatera Selatan dan Muara Enim Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008 – 2010 (dalam persen)

Lapangan Usaha	2008 r)	2009*)	2010**)
A. Sumatera Selatan			
1. Pertanian	9,88	0,62	6,85
2. Pertambangan dan Penggalian	22,19	-16,38	16,63
3. Industri Pengolahan	18,80	2,22	8,80
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3,92	2,92	3,09
5. Bangunan	12,17	3,91	5,21
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	15,43	6,75	6,86
7. Pengangkutan & Komunikasi	5,96	-1,27	0,83
8. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	10,27	4,19	3,55
9. Jasa-jasa	15,70	14,50	8,82
PDRB dengan Migas	15,76	-1,31	8,97
PDRB Tanpa Migas	11,89	5,66	6,31
B. Muara Enim			
1. Pertanian	9,63	0,90	4,54
2. Pertambangan dan Penggalian	17,85	-10,08	7,42
3. Industri Pengolahan	8,38	4,53	2,82
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	8,25	5,03	3,98
5. Bangunan	11,82	3,86	0,92
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	15,51	6,72	2,91
7. Pengangkutan & Komunikasi	10,49	0,74	0,80
8. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	10,62	3,42	4,59
9. Jasa-jasa	15,12	17,10	6,24
PDRB dengan Migas	14,90	-4,54	5,71
PDRB Tanpa Migas	10,36	6,10	4,37

Sumber: Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Setelah mengkaji data laju inflasi sektoral di Muara Enim dapat disimpulkan bahwa secara umum inflasi adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Setiap tahun selalu terjadi peningkatan harga-harga di Kabupaten Muara Enim, namun nilainya tidak pernah lebih besar dari laju inflasi di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi masih dalam tahap wajar dan terkendali.

c PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dapat diukur menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai

PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita tas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Rumus untuk menghitung PDRB per kapita adalah:

$$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$$

Sama seperti data perekonomian sebelumnya, data PDRB per kapita juga diperoleh dari buku Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim. Buku tersebut menyediakan data PDRB per kapita menurut harga berlaku dan harga konstan untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim seperti ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
PDRB per Kapita Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	2008r)	2009*)	2010**)
A.	Sumatera Selatan			
1	PDRB atas dasar harga berlaku			
	- dengan migas	133.664.987	137.331.848	157.772.133
	- tanpa migas	89.100.922	98.907.507	112.449.335
2	PDRB atas dasar harga konstan			
	- dengan migas	58.065.455	60.452.944	63.735.999
	- tanpa migas	44.763.105	47.029.273	50.294.815
B.	Muara Enim			
1	PDRB atas dasar harga berlaku			
	- dengan migas	17.927.942	17.923.618	19.958.937
	- tanpa migas	9.696.596	10.932.952	12.246.044
2	PDRB atas dasar harga konstan			
	- dengan migas	7.714.277	8.079.324	8.510.649
	- tanpa migas	4.804.098	5.105.150	5.478.644

Sumber: Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Keterangan: r) Angka revisi, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Dari data PDRB per kapita dapat dipahami bahwa nilai PDRB Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan (harga konstan) mengalami peningkatan. Pencapaian ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat seperti tergambar pada data PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku yang juga menunjukkan peningkatan. Meski Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah berhasil mencatatkan prestasi positif, hal tersebut sebaiknya tidak lantas membuat pemerintah berpuas diri karena apabila dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan, laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Muara Enim masih lebih kecil.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Muara Enim 2010-2012 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun					
		2010 ^{r)}		2011 ^{*)}		2012 ^{**)}	
1	Pertanian	3.487.422	17,10%	3.938.198	16,91%	4.298.144	16,50%
2	Pertambangan dan Penggalian	11.558.847	56,67%	13.182.867	56,62%	14.416.709	55,34%
3	Industri Pengolahan	1.434.728	7,03%	1.596.729	6,86%	1.832.980	7,04%
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	79.708	0,39%	88.265	0,38%	99.718	0,38%
5	Bangunan	827.829	4,06%	975.982	4,19%	1.175.588	4,51%
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.358.235	6,66%	1.583.321	6,80%	1.878.224	7,21%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	410.546	2,01%	464.376	1,99%	543.976	2,09%
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	240.170	1,18%	277.115	1,19%	323.872	1,24%
9	Jasa-jasa	999.523	4,90%	1.177.263	5,06%	1.479.865	5,68%
	PDRB Dengan Migas	20.397.008	100%	23.284.116	100%	26.049.076	100%
	PDRB Tanpa Migas	12.648.092		14.656.357		17.162.389	

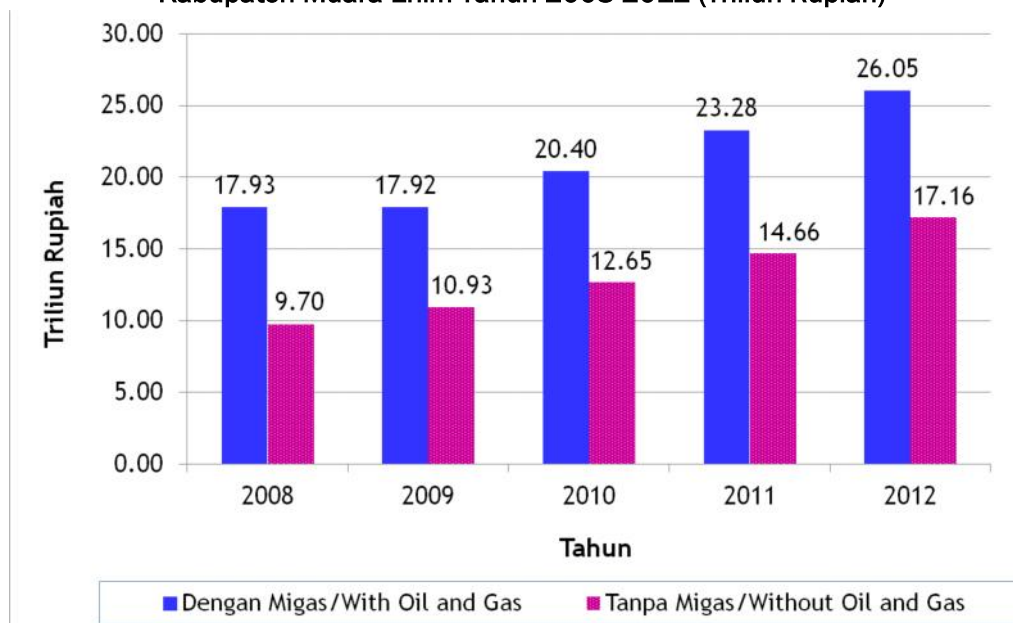
Sumber: Muara Enim Dalam Angka Tahun 2013

Keterangan: r) Angka revisi, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Perkembangan kontribusi masing-masing sektor sedikit berfluktuasi seperti terlihat di Tabel 2.10. Kontribusi sektor primer pada tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu dari 73,77% pada tahun 2010 menjadi 73,53% pada tahun 2011 dan 71,84% pada tahun 2012. Sementara itu, kontribusi sektor sekunder sedikit mengalami peningkatan dari 11,43% pada tahun 2010 menjadi 11,93% pada tahun 2012. Kontribusi sektor tersier juga mengalami peningkatan dari 14,75% pada tahun 2010 menjadi 15,04% pada tahun 2011 dan 16,22% pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Muara Enim sedikit demi sedikit sudah mengarah dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier walaupun perubahannya relatif sangat kecil.

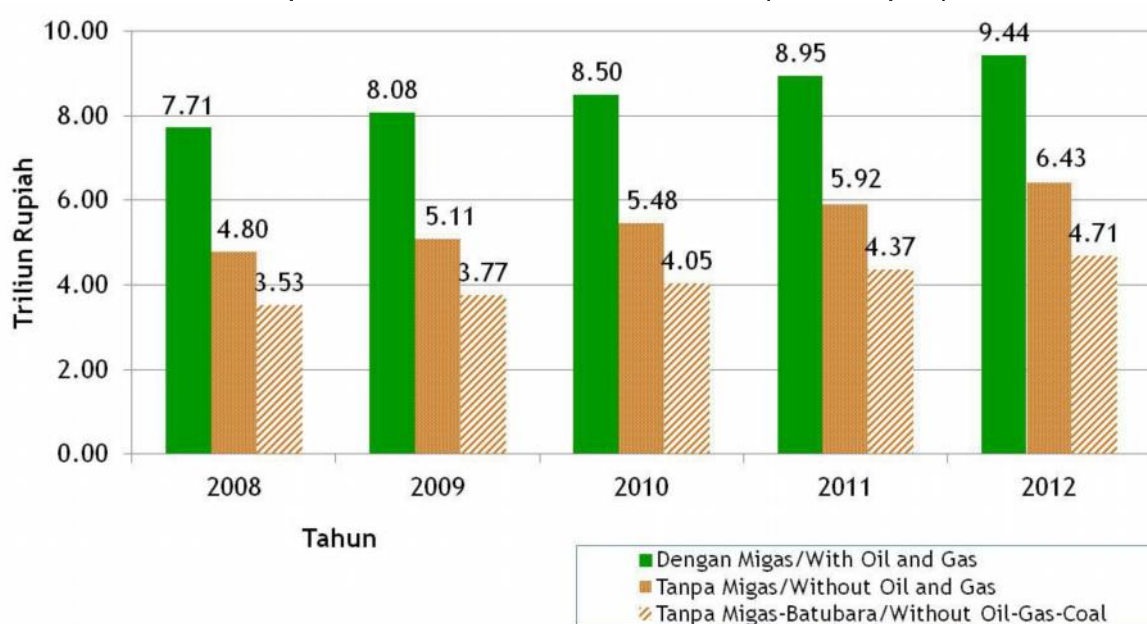
Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 dalam struktur dengan migas mencapai Rp 26,05 triliun, tanpa migas mencapai Rp 17,16 triliun, dan tanpa migas-batubara sebesar 12,03 triliun atau meningkat masing-masing sebesar 11,87 persen, 17,10 persen, dan 15,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2012 (Triliun Rupiah)



Sementara itu, berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012 dengan migas mencapai Rp 9,44 triliun, tanpa migas mencapai Rp 6,43 triliun, dan tanpa migas-batubara sebesar dan Rp 4,71 triliun.

Gambar 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2012 (Triliun Rupiah)



d Indeks Gini

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan. Angka koefisien ini berada pada rentang nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indeks atau Koefisien Gini merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Cara menghitung Koefisien Gini adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Rumus untuk menghitung Indeks Gini adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

dimana:

P_i : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i

Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

G < 0,3 = ketimpangan rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang

G > 0,5 = ketimpangan tinggi

Data tentang Indeks Gini Kabupaten Muara Enim diperoleh dari Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2011. Buku tersebut hanya menyediakan hasil akhir analisis data Indeks Gini tanpa menjelaskan terlebih dahulu proses analisisnya, seperti data rata-rata pengeluaran per kapita, total pengeluaran seluruh penduduk sebulan dan proporsi penduduk per kelas interval.

Tabel 2.11

Indeksi Gini Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 - 2010

Indikator	2008	2009	2010
Indeks Gini	0,28	0,27	0,30

Sumber: BPS Sumatera Selatan dalam Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Berdasarkan tabel Indeks Gini diatas, diketahui bahwa Indeks Gini Kabupaten Muara Enim berada pada kelompok ketimpangan rendah, yaitu < 0,3. Hanya saja apabila dicermati lebih lanjut terdapat tren yang mencemaskan dimana pada tahun yang lebih baru nilainya bergerak naik menuju ketimpangan sedang (0,28 pada tahun 2008 menjadi 0,30 pada tahun 2010). Data ini seperti mengkalibrasi data PDRB per kapita menurut harga berlaku yang menyebutkan bahwa kenaikan PDRB dialami oleh seluruh masyarakat. Nyatanya, masih ada sekelompok kecil

masyarakat yang belum turut menikmati hasil pembangunan. Hal ini tentu menjadi kesadaran pemerintah bahwa tugas melayani masyarakat belum usai.

e Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia adalah analisis ekonomi makro yang mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% berpendapatan tinggi. Dari data tersebut akan dapat dihitung tingkat ketimpangan pendapatan. Rumus untuk menghitung pemerataan pendapatan adalah sebagai berikut:

$$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$$

Dimana:

- YD4 = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah
- Qi - i = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1
- Pi = Persentase kumulatif penduduk ke i
- qi = Persentase pendapatan ke i

Data pemerataan pendapatan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Bank Dunia telah disediakan oleh BPS pada pelaksanaan Susenas 2008-2010. Hasil perhitungan data pemerataan pendapatan untuk Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12

Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Tahun 2008 - 2010

Indikator	2008	2009	2010
1	2	3	4
1. 40 persen terendah	25,45	26,37	26,23
2. 40 persen menengah	39,25	41,06	39,48
3. 20 persen tertinggi	35,30	32,57	34,30

Sumber: BPS Sumatera Selatan dalam Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Bank Dunia telah membuat tipologi tingkat ketimpangan, yaitu:

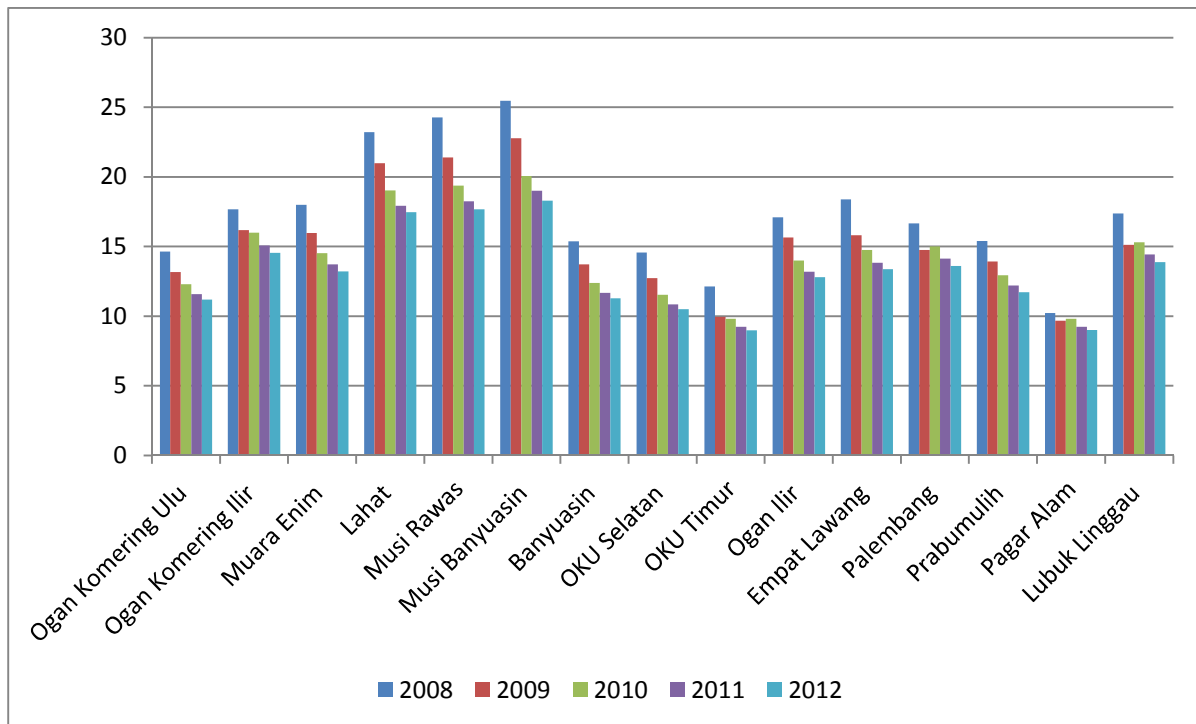
1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah

Menilik data pemerataan pendapatan pada tabel di halaman sebelumnya, dimana pada tahun 2008, 2009 dan 2010 proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk berturut-turut adalah sebesar 25,45, 26,37 dan 26,23, maka Muara Enim tergolong dalam kabupaten dengan ketimpangan pendapatan rendah. Fakta ini sejalan dengan data PDRB per kapita menurut harga berlaku yang menyatakan bahwa kemajuan daerah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, namun berkebalikan dengan data Indeks Gini yang menyatakan bahwa ketimpangan masyarakat meningkat.

f Persentase Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim selama periode tahun 2008-2012 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin mencapai 17,98% dan pada tahun 2012 turun menjadi 13,21%. Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan, maka angka tahun 2012 Muara Enim berada di bawah provinsi yang mencapai 13,48%. Namun demikian, angka sampai dengan tahun 2012 tersebut jika dibandingkan dengan IPM kabupaten dan kota di seluruh Sumsel, IPM Kabupaten Muara Enim berada pada urutan ke delapan.

Gambar 2.4
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Sumatera Selatan Tahun 2008-2012



Tabel 2.13
Keluarga Fakir Miskin menurut Kecamatan
Tahun 2011-2012

No.	Kecamatan	Keluarga Fakir Miskin (KK)
1.	Semende Darat Laut	1.275
2.	Semende Darat Ulu	1.303
3.	Semende Darat Tengah	934
4.	Tanjung Agung	3.382
5.	Rambang	615
6.	Lubai	2.142
7.	Lawang Kidul	2.461
8.	Muara Enim	3.299
9.	Ujan Mas	1.230
10.	Gunung Megang	5.019
11.	Benakat	860
12.	Rambang Dangku	2.966
13.	Talang Ubi	4.724

No.	Kecamatan	Keluarga Fakir Miskin (KK)
14.	Tanah Abang	2.419
15.	Penukal Utara	1.977
16.	Gelumbang	3.139
17.	Lembak	1.819
18.	Sungai Rotan	4.033
19.	Penukal	1.779
20.	Abab	1.232
21.	Muara Belida	1.656
22.	Kelekar	749
2012		49.013
2011		49.013

Sumber: Muara Enim Dalam Angka Tahun 2013

Jumlah keluarga fakir miskin di Muara Enim pada tahun 2011 dan 2012 tidak menunjukkan perubahan, yaitu tetap di angka 49.013. Kondisi ini tentu saja membutuhkan keseriusan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, yang menjadi permasalahan hampir sebagian besar daerah. Data diatas disajikan dengan kondisi belum mengalami pemekaran wilayah pada Tahun 2012 yang ditandai dengan keluarnya 5 (lima) kecamatan dari wilayah administrasi Muara Enim. Tabel diatas juga belum memperhitungkan adanya 3 (tiga) kecamatan baru di Muara Enim.

g Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Rumus untuk menghitung indikator ini adalah:

$$(100 - \text{angka kemiskinan})$$

Dari Tabel 2.14 diketahui bahwa dari tahun ke tahun persentase penduduk yang tergolong dalam kelas penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2008 persentase penduduk pada kelas tersebut adalah 82,02%. Pada tahun 2009 jumlahnya meningkat 2,02% menjadi 84,04%. Demikian pula pada tahun 2010 dan 2011 jumlahnya kembali meningkat menjadi 85,49% dan 86,29%.

Tabel 2.14

Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Tahun 2008 - 2011

No	Keterangan	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	118,4	106,4	104,480	100,394
2	Penduduk miskin (%)	17,98	15,96	14,51	13,71
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	210.095	210 .54	225.807	250.892
4	Penduduk diatas garis kemiskinan (%)	82,02	84,04	85,49	86,29%

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
Muara Enim Dalam Angka Tahun 2013

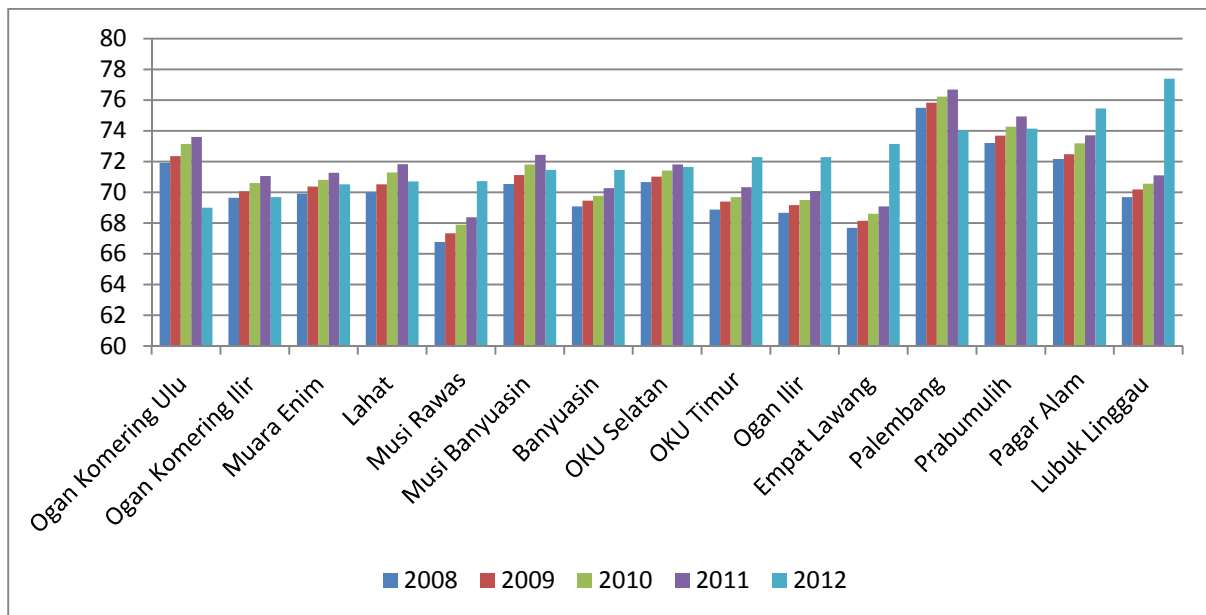
Kenaikan persentase jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan keberhasilan pemerintah menciptakan lingkungan usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja membuat penduduk yang semula berada pada kategori miskin “naik kelas” ke golongan penduduk diatas garis kemiskinan. Kenaikan persentase juga menggambarkan keberhasilan pemerintah membuat masyarakat berpenghasilan rendah lebih produktif melalui berbagai program yang dijalankan.

h Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM terdiri dari 3 (tiga) komponen indeks yaitu: peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Secara umum peluang hidup dicerminkan atas angka harapan hidup (e0), pengetahuan dicerminkan atas angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS) sedangkan standar hidup layak dicerminkan oleh *Purchasing Power Parity* (PPP).

Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Muara Enim setiap tahun mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2012. Pada tahun 2008 sebesar 69,91 dan meningkat pada tahun 2012 sebesar 71,65. Namun demikian angka tersebut masih dibawah angka IPM Provinsi Sumatera Selatan (73,42). Jika kita bandingkan dengan IPM kabupaten dan kota di seluruh Sumsel, IPM Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012 berada pada urutan ke delapan.

Gambar 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2012



i Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals-MDG's*)

Sampai dengan tahun 2012, capaian berbagai sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium di Muara Enim ditampilkan pada Tabel 4.1. Pada tabel tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: (a) sasaran yang telah dicapai; (b) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2105 (on track); dan (c) sasaran yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya.

Sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah dicapai, mencakup:

- MDG 8:
 - Indikator Proporsi penduduk yang mendapatkan akses terhadap jaminan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan penting yang mencapai 100% pada tahun 2012.
 - Indikator Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan yang telah terpenuhi (ya).
 - Indikator Persentase Unit Pelayanan Pemerintahan (Kecamatan Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer yang mencapai 100% pada tahun 2012.
- MDG 5: Indikator Prosentase penggunaan kontrasepsi pasangan menikah mencapai 100% pada tahun 2012.

Sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (*on-track*) adalah:

- MDG 2:
 - Indikator Angka melek huruf usia 15-24 tahun mencapai 96,56 pada tahun 2012.
 - Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar/madrasah Ibtidaiyah (7-12 tahun) yang mencapai 98,03 pada tahun 2012.
- MDG 4: indikator Anak usia 12-23 bulan di imunisasi campak mencapai 99,3% pada tahun 2012.
- MDG 5:
 - Indikator Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis mencapai 90,4% pada tahun 2012.
 - Indikator Prosentase penggunaan kontrasepsi pasangan menikah mencapai 100% pada tahun 2012.
 - Indikator Proporsi wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan atau memakai alat keluarga berencana mencapai 95,57% pada tahun 2012.
 - Indikator Jumlah rata-rata kunjungan pemeriksaan ibu hamil ke RS, Puskesmas, Dokter/Bidan Keluarga yang mencapai 97,6%.
- MDG 6: Indikator Prevalensi malaria per 1.000 penduduk mencapai 0,93% tahun 2012.

Sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium yang telah menunjukkan kecenderungan kemajuan namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015, mencakup indikator-indikator lainnya, selain yang telah disebutkan pada 2 (dua) kelompok pencapaian diatas.

Secara umum, pencapaian tujuan pembangunan milenium di Muara Enim sampai dengan Tahun 2012 masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini mengingat berbagai kendala yang dialami dalam upaya pencapaian target-target tersebut. Beberapa kendala tersebut terkait erat dengan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya yang disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya buatan/infrastruktur, pengaruh budaya setempat dan peran pemerintah serta masyarakat.

Tabel 2.15
Pencapaian Millennium Development Goals
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008- 2012

NO	TUJUAN	Target	Indikator Target	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012		
1	Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan	1	Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US\$1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990 - 2015	a	Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah US\$ (PPP) per hari	%	17,98*	15,96*	14,51*	13,71*	13,21*
				b	Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan nasional	%	-	-	-	-	-
		2	Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015	a	Persentase anak-anak berusia dibawah 5 tahun yang megalami gizi buruk (severe underweight)	%	0.57	1.14	1.17	0.6	0.65
				b	Persentase anak-anak berusia dibawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang (moderate underweight)	%	7.05	8.12	8.7	7.03	4.61
2	Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua	1	Menjamin pada tahun 2015, semua anak, dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar	a	Angka melek huruf usia 15-24 tahun	%	94,00**	98,81*	98,82*	98,85*	96,56**
				b	Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar / madrasah Ibtidaiyah (7-12 tahun)	%	89,08*	95,8*	97,41*	97,29*	98,03**
				c	Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah pertama / masdarasah Tsanawiyah (13-15 tahun)	%	46,58*	58,24*	61,75*	59,18*	61,02**
				d	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	24,31*	44,84*	43,07*	44,44*	47,09**
				e	Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4	%	37,63**	41,82**	46,47**	54,39**	58,48**
3	Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan disemua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015	a	Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi, yang diukur melalui Angka Partisipasi Murni anak perempuan terhadap anak laki-laki.	%	-	-	-	-	-
				b	Rasio melek huruf perempuan terhadap anak laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf.	%	-	-	-	-	-
				c	Partisipasi perempuan di Eksekutif Pemerintah.	%	-	-	-	55,54**	55,6**
				d	Partisipasi perempuan di Legislatif DPRD	%	11,11**	11,11**	11,11**	11,11**	11,11**
				e	Partisipasi perempuan di Yudikatif	%	35,24**	34,00**	34,91**	35,96**	32,00**
				f	Partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor non pertanian	%	61,28**	56,64**	58,2**		
4	Menurunkan Angka Kematian Anak	1	Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya dalam kurun waktu 1990 - 2015	a	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	%	2,5**	2,3**	5,5**	6,3**	4,13**
				b	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 kelahiran hidup	%	-	-	5,7**	6,8**	4,7**
				c	Anak usia 12-23 bulan di imunisasi campak	%	98**	98**	100**	100**	99,3**
5	Meningkatkan Kesehatan Ibu	1	Menurunkan Angka Kematian Ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990-2015	a	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup.	%	0,6**	0,77**	1,21**	0,7**	1,14**
				b	Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis	%	85,7**	86,8**	90,9**	91,78**	90,4**
				c	Prosentase penggunaan kontrasepsi pasangan menikah	%	77,94**	77,35**	77,15**	75,74**	100**
				d	Proporsi wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan atau memakai alat keluarga	%	97,53**	96,42**	96,24**	95,4**	95,57**

NO	TUJUAN	Target	Indikator Target	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
			berencana						
			e Jumlah rata-rata kunjungan pemeriksaan ibu hamil ke RS, Puskesmas, Dokter/Bidan Keluarga.	%	94,87**	99**	96,5**	92**	97,6**
6	Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya	1	a Prevalensi HIV dan AIDS	%	-	1**	4**	10**	9**
			b Penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi	%	1,63**	2,65**	3**	3,82**	3,66**
		2	a Pendidikan / pengenalan panyakit HIV AIDS untuk remaja usia 15-24 tahun	jml kegiatan/t h	1**	1**	1**	1**	1**
			a Prevalensi malaria per 1.000 penduduk	%	2,9**	2,7**	2,38**	1,27**	0,93**
		3	b Prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk	%		36,19**	34,87**	32,27**	34,18**
7	Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	1	a Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat	%	-	0,69**	21,68**	22,23**	24,28**
			b Proporsi rumah tangga yang mendapatkan sumber air bersih/jumlah seluruh rumah tangga	%	39,08**	43,42**	48,24**	53,6**	59,56**
		2	c Proporsi cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum / jumlah seluruh rumah tangga (PDAM)	%	18,54**	16,04**	22,39**	21,8**	43,2**
			d Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak	%	38,7**	43,00**	47,78**	53,09**	58,99**
		3	e Proporsi rumah tangga yang menempati rumah sehat	%	0,65**	0,66**	0,66**	0,71**	0,74**
8	Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan	1	a Proporsi penduduk yang mendapatkan akses terhadap jaminan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan penting	%	37**	100**	100**	100**	100**
			b Persentase rumah tangga yang memiliki komputer personal dan mengakses internet melalui komputer	%	1,109"	1,409"	1,659"	2,883"	2,107"
		2	c Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan	ya / tidak	ya	ya	ya	ya	ya
			d Persentase Unit Pelayanan Pemerintahan (Kecamatan Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer	%	100	100	100	100	100
			e Persentase SD-SMP yang memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer	%	-	-	-	-	-

Keterangan :

* Badan Pusat Statistik, ** SKPD Terkait, " PT Telkom

2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat

Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai urusan pemerintahan yang terkait. Dari berbagai macam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketenagakerjaan.

a Pendidikan

a.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Angka melek huruf dapat dihitung dari membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian dikalikan dengan seratus. Berikut adalah rumus angka melek huruf:

$$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

dimana:

- LIT_{15+}^t = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t
- L_{15+}^t = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t
- P_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

Data angka melek huruf Kabupaten Muara Enim tahun 2008 hingga 2010 adalah sebagai berikut/ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 2.16

Angka Melek Huruf Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2010

Indikator	Angka Melek Huruf (%)
2008	98,80
2009	98,81
2010	98,82

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf di Kabupaten Muara Enim dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju peningkatan angka melek

huruf adalah 0,01%. Pada tahun 2008 angka melek huruf bernilai 98,80%. Selanjutnya pada tahun 2009 dan 2010 angka melek huruf Kabupaten Muara Enim adalah 98,81% dan 98,82%.

Semakin tinggi angka melek huruf, maka semakin tinggi kemampuan menyerap informasi dari berbagai media. Angka melek huruf masyarakat yang tinggi akan mempengaruhi potensi perkembangan intelektual dan kontribusinya terhadap pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Dengan angka melek huruf yang tinggi, Kabupaten Muara Enim mempunyai SDM berpendidikan dalam jumlah besar yang potensial untuk mendukung gerak pembangunan.

a.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Menghitung rata-rata jumlah tahun sekolah di tingkat kabupaten, dapat digunakan rumus berikut:

$$\bar{X} = \frac{x_i}{n}$$

dimana :

- \bar{X} = adalah rata-rata jumlah tahun bersekolah penduduk usia 5 tahun keatas
- x_i = adalah jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun keatas
- n = adalah jumlah penduduk usia 5 tahun keatas.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Muara Enim tahun 2008 hingga tahun 2010 meningkat. Pada tahun 2008 angka rata-rata lama sekolah adalah 7,3; pada tahun 2009 angka rata-rata lama sekolah adalah 7,35; dan pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah adalah 7,4. Peningkatan rata-rata lama sekolah pada tahun 2008 hingga 2010 adalah 0,05. Meskipun peningkatan setiap tahunnya hanya sebesar 0,05, peningkatan rata-rata lama sekolah terbilang stabil.

Nilai rata-rata lama sekolah menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2008-2010 nilai rata-rata lama sekolah berkisar pada 7,30 hingga 7,40 yang artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Muara Enim bersekolah sampai 7 tahun 4 bulan atau SLTA. Rata-rata lama sekolah penduduk yang 7 tahun 4 bulan menunjukkan bahwa penduduk di Muara Enim belum memenuhi target nasional yaitu wajib belajar 12 tahun.

a.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Berikut rumus untuk menghitung angka partisipasi kasar:

$$APK_{h,a}^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

Dimana,

h = jenjang pendidikan

a = kelompok usia

t = tahun

E_h^t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedangsekolah pada jenjang pendidikan h

$P_{h,a}^t$ = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h

Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan. Dari tabel menunjukkan nilai APK pada tahun 2009 dan 2010, nilai APK pada jenjang pendidikan SD menurun pada tahun 2010, sedangkan pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA meningkat.

Tabel 2.17

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 & 2010

Jenjang Pendidikan	2009	2010
SD	121,17	114,60
SLTP	80,74	85,23
SLTA	63,77	65,17

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim 2011

Penurunan APK pada jenjang pendidikan SD perlu dikendalikan, dan perlu mendapat perhatian. Perununan nilai APK dapat menghambat program pemerintah nasional yaitu wajib belajar 12 tahun. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan terutama dimulai dari pendidikan dasar.

a.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Manfaat menghitung APT adalah untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan disuatu daerah, selain itu berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja,

terutama melihat kualifikasi menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Menghitung APT dengan rumus sebagai berikut:

$$APT_h^t = \frac{P_h^t}{p^t} \times 100$$

Dimana:

h = jenjang pendidikan

t = tahun

P_h^t = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t

p^t = total jumlah penduduk pada tahun t

Angka pendidikan yang Ditamatkan tertinggi tahun 2008, 2009 dan 2010 ada pada jenjang pendidikan SD yaitu 39,19, 39,01 dan 40,22. Pada tingkat pendidikan kurang dari sekolah dasar, persentasenya menurun setiap tahunnya. Pada tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi Sederajat, APT Kabupaten Muara Enim meningkat setiap tahunnya. Lebih jelasnya mengenai data APT Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18

Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2010

Tingkat Pendidikan	2008	2009	2010
< SD	21,83	21,79	16,78
SD Sederajat	39,19	39,01	40,22
SMP Sederajat	19,28	19,37	19,55
SMU Sederajat	17,28	17,34	19,76
Perguruan Tinggi	2,42	2,49	3,69

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim 2011

Dari data yang ada mengenai angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Muara Enim tahun 2008 sampai 2010. Diketahui pada tahun 2008 hingga tahun 2010 persentase tertinggi ada pada tingkat pendidikan SD. Pada tahun 2008, 2009 dan 2010 APT SD adalah 39,19; 39,01 dan 40,22% dapat diinterpretasikan bahwa pada tahun 2008 hingga 2010 sebagian besar penduduk hanya tamat SD.

a.5. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Angka partisipasi murni diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$$

dimana:

h = jenjang pendidikan

a = kelompok usia

t = tahun

$E_{h,a}^t$ = jumlah siswa/penduduk kelompok usia **a** yang bersekolah di tingkat pendidikan **h** pada tahun **t**

$P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia **a**

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah:

SD/MI : 7-12 tahun

SMP/MTs : 13-15 tahun

SMA/MA/SMK : 16-18 tahun

Data mengenai angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 dan 2010 bersumber dari buku indikator sosial ekonomi tahun 2011 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.19

**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Muara Enim
Tahun 2009 dan 2010**

Tingkat Pendidikan	2009	2010
SD	95,80	97,41
SLTP	58,24	61,75
SLTA	44,84	43,07

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim 2011

Dari data di atas diketahui bahwa secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan, maka angka partisipasi semakin menurun. Dilihat dari segi tingkat pendidikan, Angka Partisipasi Murni SD

dan SLTP mengalami peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2010 berturut-turut sebesar 1,61 dan 3,51. Namun pada jenjang pendidikan SLTA, pada tahun 2009 - 2010 terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni sebesar 1,77.

APM menggambarkan kondisi kapasitas SDM Kabupaten Muara Enim di masa depan, dimana APM yang tinggi menunjukkan tingkat intelektualitas angkatan kerja pada beberapa tahun mendatang, selepas para pelajar meninggalkan bangku sekolah. Angka Partisipasi Murni SLTP dan SLTA berturut-turut sebesar 61,75 dan 43,07, maka Kabupaten Muara Enim diperkirakan akan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan kegiatan pembangunan yang membutuhkan keahlian tinggi.

Meski hal tersebut merupakan kecenderungan yang umum, namun hendaknya dapat menjadi perhatian bersama dalam penanganannya. Dalam jangka pendek, intervensi pemerintah diperlukan agar anak usia diatas 15 tahun mendapat pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, dengan kata lain program wajib belajar 12 tahun terpenuhi. Dalam jangka panjang, intervensi pemerintah diperlukan agar tersedia angkatan kerja dengan *knowledge*, *skill* dan *attitude* yang mendukung pembangunan.

b Kesehatan

b.1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka harapan hidup pada Kabupaten Muara Enim hanya diketahui pada tahun 2007 dan 2010. Pada tahun 2007 angka harapan hidup bernilai 67,09 dan pada tahun 2010 angka harapan hidup bernilai 67,49. Dari tahun 2007 ke 2010 angka usia harapan hidup bayi meningkat sebesar 0,4.

Angka harapan hidup Kabupaten Muara Enim pada tahun 2007 adalah 67,09 hal ini menunjukkan bahwa bayi-bayi yang lahir pada tahun 2007 usianya dapat mencapai 67 tahun, tidak jauh berbeda dengan tahun 2007, tahun 2010 bayi-bayi yang dilahirkan usianya berkisar antara 67 hingga 68 tahun. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu tinggi, namun sudah dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

b.2. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun. Persentase balita gizi buruk dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$$

Tabel 2.20

Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Muara Enim tahun 2009-2012

No	Status Gizi	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Gizi Sangat Kurang (%)	1.14	1.2	0.75	0.65

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

Dari data tersebut diketahui bahwa angka balita gizi buruk di Kabupaten Muara Enim terus menurun. Pada tahun 2009 nilai gizi buruk 1,14. Angka tersebut kemudian naik pada tahun 2010 menjadi 1,2. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012 persentase nilai balita gizi buruk terus menurun dengan selisih 0,45 (2010-2011) dan 0,1 (2011-2012).

Rendahnya persentase balita gizi buruk menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dari Pemerintah Daerah/kualitas kesehatan masyarakat yang baik. Dengan melihat data persentase gizi buruk Kabupaten Muara Enim yang setiap tahunnya terus menurun, maka hal itu adalah hal yang positif dan baik bagi perkembangan Kabupaten Muara Enim. Penurunan persentase nilai gizi juga menggambarkan keberhasilan program pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan gizi. Keberhasilan ini hendaknya dapat dipertahankan oleh aparat pemerintah daerah yang menangani urusan kesehatan dengan melanjutkan program terkait pelayanan kesehatan balita dan mendorong inisiatif kegiatan penyehatan di tingkat masyarakat.

c Ketenagakerjaan

Rasio kerja adalah hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Atau dapat juga didefinisikan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran). Rumus untuk menghitung rasio penduduk bekerja sebagai berikut:

$$\text{Rasio penduduk yang bekerja} = \frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}}$$

Data rasio penduduk yang bekerja bersumber dari data indikator sosial ekonomi tahun 2011 yang diolah. Rasio penduduk yang bekerja dari tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami sedikit penurunan. Tahun 2008 rasio penduduk yang bekerja adalah 0,225, dan pada tahun 2010 rasio penduduk yang bekerja 0,204.

Tabel 2.21

Rasio Penduduk yang Bekerja tahun 2008-2010 Kabupaten Muara Enim

Indikator	2008	2009	2010
Penduduk Bekerja	72.09	70.42	72.86
Angkatan Kerja	321.041	319.24	356.46
Rasiopenduduk bekerja	0.225	0.221	0.204

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim 2011

Dari tabel diatas diperoleh kesimpulan pada tahun 2008 sebanyak 22,5%penduduk Kabupaten Muara Enim memperoleh kesempatan kerja dari kesempatan kerja yang ada, sedangkan 77,5% masih mencari atau penangguran. Bahkan kesempatan kerja di tahun 2010 menurun menjadi 20,4% penduduk Muara Enim mendapatkan kesempatan bekerja dan 79,6% sedang mencari pekerjaan atau pengangguran. Penurunan kesempatan bekerja, perlu mendapatkan perhatian pemerintah, seperti pembukaan lapangan kerja baru.

Bila dilakukan pemilahan tenaga kerja laki-laki dan perempuan berdasarkan lapangan usaha, maka diketahui bahwa tenaga kerja laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Data tahun 2010 sampai dengan 2012 menunjukkan proporsi tenaga kerja laki-laki lebih besar daripada perempuan di semua lapangan usaha.

Tabel 2.22

Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis

Kelamin di Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

No.	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Peternakan & Perikanan	7.182	2.375	9.557
2	Pertambangan dan Penggalian	7.925	360	8.285
3	Industri Pengolahan	2.243	157	2.400
4	Listrik, Gas dan Air	1.656	126	1.782
5	Bangunan	201	18	219

No.	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
6	Perdagangan Besar	655	87	742
7	Angkutan, Perdagangan dan Komunikasi	986	38	1024
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan	1.975	257	2.232
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	2.140	168	2.308
	Tahun 2012	24.963	3.586	28.549
	Tahun 2011	24.196	2.202	26.398
	Tahun 2010	24.986	2.436	27.422

Sumber: Muara Enim Dalam Angka Tahun 2013

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan.

2.3.1 Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Muara Enim masih perlu ditingkatkan.

a Pendidikan

a.1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar dan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Proporsi penduduk muda di Indonesia semakin menurun akibat semakin rendahnya angka fertilitas. Penurunan ini menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar. Rumus untuk menghitung angka partisipasi sekolah berdasar pada lampiran 1 Permendagri 54 tahun 2010.

$$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1.000$$

dimana:

h = jenjang pendidikan

a = kelompok usia

t = tahun

$E_{h,a}^t$ = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t

$P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a

Data angka partisipasi sekolah yang bersumber dari Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Muara Enim 2008-2010

Umur	2008			2009			2010		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
7 - 12	98,02	98,30	98,16	98,96	97,31	98,19	98,77	97,54	98,23
13 - 15	79,37	84,77	82,04	79,29	87,59	83,10	80,84	86,79	83,80
16 - 18	42,10	42,56	42,33	42,23	49,14	45,43	47,68	52,36	49,98

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Angka partisipasi sekolah dasar adalah pada jenjang umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun atau pada tingkat pendidikan SD dan SLTP. Angka partisipasi sekolah menengah pada usia 16-18 tahun atau pada tingkat pendidikan SLTA. Pada setiap tingkat pendidikan atau kelompok umur, nilai dari angka partisipasi sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka partisipasi sekolah dasar meningkat sebesar 0,47 sedangkan pada jenjang pendidikan SMA rata-rata meningkat sebesar 4,82.

Semakin tinggi APS maka pada suatu jenjang pendidikan, maka semakin banyak menyerap penduduk pada umur kelompok pendidikan tersebut. Di Kabupaten Muara Enim, diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, nilai APS lebih rendah. Meski terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, nilai APS yang masih rendah pada tingkat pendidikan menengah harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Intervensi pemerintah melalui berbagai program pendidikan menjadi penting dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

a.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar Dan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Rumus untuk menghitung Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar Dan Menengah berdasar pada lampiran 1 Permendagri 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Sekolah Dasar:

$$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12)thn + (13 s.d 15) thn}} \times 10.000$$

Sekolah Menengah:

$$\frac{\text{Jumlah sekolah (SMA/MA/ SMK)}}{\text{Jumlah penduduk usia (16 s.d 19)thn}} \times 10.000$$

Tidak ada data yang dapat digunakan untuk menghitung Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar Dan Menengah. Namun data dapat disubstitusi dengan data yang ada yang bersumber dari Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2011, yaitu data mengenai Rasio Penduduk Usia Sekolah dasar dan Menengah/ Ketersediaan Sekolah.

Tabel 2.24

Rasio Murid-Sekolah Di Kabupaten Muara Enim 2008-2010

Indikator	2008	2009	2010
- SD/MI	200,07	201,31	205,43
- SLTP/MTs	247,46	263,48	232,75
- SLTA/MA	281,60	307,90	311,47

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten Muara Enim 2008-2010 pada tingkat SD dan SMP meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008 rasionya adalah 200,07, tahun 2009 dan 2010 nilainya meningkat berturut-turut menjadi 201,31 dan 205,43. Berbeda dengan tren di tingkat SD dan SMP, pada tingkat pendidikan SLTA rasio murid-sekolah pada tahun 2008-2009 menurun. Baru pada tahun 2010 nilainya meningkat kembali.

Semakin rendah rasio berarti semakin baik kondisi pelayanan pendidikan sebuah daerah. Rasio murid-sekolah yang rendah memiliki arti bahwa penambahan jumlah murid diikuti dengan penambahan jumlah sekolah. Meninjau bahwa nilai rasio murid-sekolah di Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren meningkat, berarti kecepatan penambahan kapasitas sekolah oleh pemerintah daerah Muara Enim kurang mampu mengikuti kecepatan penambahan murid. Hal ini tentu disayangkan mengingat minat masyarakat yang besar untuk menempuh pendidikan tidak dapat terfasilitasi secara optimal. Kedepannya pemerintah harus memiliki sebuah cetak biru (*blueprint*) pelayanan pendidikan yang antara lain berisi rencana pembangunan fasilitas pendidikan baru.

a.3. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Menghitung rasio guru terhadap murid dengan rumus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Sekolah Dasar:

$$\frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \times 10.000$$

Sekolah Menengah:

$$\frac{\text{Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)}}{\text{Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)}} \times 10.000$$

Tidak ada data yang dapat digunakan untuk menghitung Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar Dan Menengah. Namun data dapat disubstitusi dengan data yang ada yang bersumber dari Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2011. Data tersebut hampir sama dengan data pada indikator IKK hanya saja datanya mengenai Rasio Murid Terhadap Guru.

Tabel 2.25

Rasio Murid-Guru Di Kabupaten Muara Enim 2008-2010

Indikator	2008	2009	2010
- SD/MI	29,07	21,72	16,65
- SLTP/MTs	18,09	18,30	14,36
- SLTA/MA	15,59	16,10	15,26

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah pada tingkat SD mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah pada jenjang SLTP mengalami penurunan sebesar 3.94 sedangkan, pada tingkat SLTA turun sebesar 0,84. Dari nilai rasio tersebut diketahui bahwa setiap 10.000 siswa terdapat 14-17 guru.

Rasio tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim terjadi ketimpangan antara guru dan murid. Ketimpangan guru dan murid tersebut seharusnya dikurangi oleh adanya penambahan guru yang ada Di kabupaten Muara Enim.

b Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar, semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Tujuan tersebut diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang baik, yang pada gilirannya akan memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

b.1. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Rasio puskesmas dan pustu menurut indikator kinerja kunci dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

Pada rumus diatas untuk mengetahui rasio puskesmas dan pustu pada 1000 penduduk, namun data yang tersedia merupakan data rasio puskesmas dan pustu per 10.000 penduduk.

Tabel 2.26

Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap 10.000 penduduk Tahun 2008-2010

Fasilitas Kesehatan	Rasio per 10.000 Penduduk		
	2008	2009	2010
Puskesmas	0,33	0,33	0,33
Puskesmas Pembantu	1,66	1,62	1,49

Sumber: Dinas Kesehatan Muara Enim dan BPS Muara Enim, data diolah

Data diatas menunjukkan nilai rasio puskesmas tahun 2008-2010 tidak mengalami perubahan. Sedangkan rasio puskesmas pembantu pada tahun 2008 hingga 2010 mengalami penurunan. Berturut-turut laju penurunan rasio puskesmas pembantu adalah 0,04 (2008-2009) dan 0,13 (2009-2010).

Rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk adalah mengukur ketersediaan puskesmas dan pustu berdasarkan jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Sedangkan semakin rendah nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Penurunan nilai pustu ini diharapkan

tidak terjadi secara menerus. Kesesuaian antara fasilitas kesehatan dengan penduduk yang dilayani akan memberikan hasil yang optimal pada pelayanannya.

b.2. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang bekesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat dihitung dengan rumus.

$$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

Sumber data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) tahun 2012 diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Muara Enim adalah 748.857 jiwa, dengan jumlah rumah sakit di Kabupaten Muara Enim ada 3 buah. Dari data diatas dapat dihitung nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk dan diketahui nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk diketahui yaitu 0,004.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk dirasa nilainya terlalu kecil, sehingga diperlukan perencanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Muara Enim agar kedepannya pelayanan kesehatan tetap optimal dalam melayani penduduk Kabupaten Muara Enim.

b.3. Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Menghitung rasio dokter dan rasio tenaga medis per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

dan

$$\frac{\text{Jumlah tenaga medis}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

Dari rumus yang ada untuk menghitung rasio dokter ataupun tenaga medis, dihitung per 1000 penduduk. Namun data LKPJ tahun 2012 berisikan rasio dokter dan tenaga medis per 10.000 penduduk, sedikit berbeda dengan yang diarahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan rumus yang dihitung per 1000 penduduk.

Tabel 2.27

Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Terhadap 10.000 penduduk Tahun 2008-2010

Tenaga Kesehatan	Rasio Per 10.000 Penduduk		
	2008	2009	2010
Dokter	1,03	1,33	1,41
Perawat	6,23	8,35	11,22
Bidan	5,40	7,48	7,97

Sumber: Dinas Kesehatan Muara Enim dan BPS Muara Enim, data diolah

Dari Tabel 2.23 diketahui bahwa rasio dokter dari tahun 2008 hingga 2010 terus meningkat. Pada tahun 2008-2009 mengalami laju peningkatan sebesar 0,3 dan 0,08 pada tahun 2009-2010. Sedangkan pada tenaga medis perawat peningkatan rasio tahun 2008-2009 berturut-turut 2,12 dan 2,87. Pada tenaga kesehatan bidan peningkatan rasio tenaga kesehatan sebesar 2,08 dan 0,49. Pada tahun 2010 dari 10.000 penduduk di Kabupaten Muara Enim terdapat 1,41 dokter; 11,22 perawat dan 7,97 bidan.

Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu setiap dokter melayani 2.500 penduduk. Berdasarkan fakta yang ada, di Indonesia jumlah dokter dan dokter spesialis belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter di Indonesia belum merata serta perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu diperlukan penangan agar pemenuhan tenaga kesehatan terpenuhi.

b.4. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan karena bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan dimasyarakat. Puskesmas biasanya cakupannya adalah Kecamatan, sedangkan pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah penduduknya. Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu dapat diketahui dari rumus:

$$\frac{\text{Jumlah puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan}} \times 100\%$$

dan rumus cakupan puskesmas pembantu.

$$\frac{\text{Jumlah pembantu puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$$

Data yang bersumber dari LKPJ tahun 2012, diketahui Kabupaten Muara Enim terdiri dari 25 kecamatan, 310 desa dan 16 kelurahan, terdapat 25 puskesmas dan 113 pustu. Sehingga dari data tersebut dapat dihitung dan diketahui nilai cakupannya. Cakupan untuk puskesmas adalah 100%, sedangkan cakupan untuk pustu adalah 34,7%.

Semakin tinggi nilai cakupan pelayanan suatu fasilitas, maka daya layannya semakin baik. Cakupan puskesmas bernilai 100%, yang berarti menunjukkan bahwa puskesmas mampu melayani wilayah pelayanannya secara maksimum. Pada puskesmas pembantu nilai cakupannya 34,7%, hal ini menunjukkan bahwa puskesmas pembantu belum mampu secara maksimal dalam melayani wilayah pelayanannya. Cakupan pelayanan pustu perlu ditingkatkan salah satu caranya dengan menambah jumlah pustu.

c Pekerjaan Umum

c.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Rumus menghitung proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah berikut.

$$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$$

Data untuk menghitung proporsi panjang jalan dalam kondisi baik diperoleh dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) 2012. Diketahui jumlah panjang total jalan adalah 1505,93 km, dan jalan dalam kondisi baik adalah 779,59 km. Data panjang jalan dalam kondisi baik diperoleh dari penjumlahan data jalan baru, perbaikan jalan dan pemeliharaan yang terdapat pada dokumen LKPJ. Dari data yang diperoleh, diketahui proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,518. Panjang jalan di Kabupaten Muara Enim dalam kondisi baik sebesar 51,77% dan sisanya atau 48,23% kondisi jalan di Kabupaten Muara Enim dalam kondisi buruk.

Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri. Kondisi jalan yang 45% dalam kondisi baik dirasa kurang untuk sebuah daerah. Pembangunan wilayah akan terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang

rusak. Pada periode pemerintahan 5 tahun mendatang, isu peningkatan kualitas jaringan jalan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

c.2. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan budidaya pertanian. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio jaringan irigasi berdasarkan Permendagri 54/2010 yaitu:

$$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$$

Data mengenai jaringan irigasi saat ini yang dimiliki kurang lengkap untuk menggambarkan rasio jaringan irigasi. Dari LKPJ tahun 2012, diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum bidang ke Binamargaan dan Pengairan dari tahun 2008-2011 melakukan perbaikan prasarana irigasi. Perbaikan irigasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat dengan cakupan layanan seluas 1.055 Ha areal persawahan.

c.3. Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase berfungsi untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Selain itu tujuan dari drainase adalah salah satu unsur dari prasarana kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Rumus untuk menghitung drainase dalam kondisi baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$$

Data untuk menghitung drainase dalam kondisi baik tidak cukup lengkap. Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan tahun 2012, Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembangunan drainase sepanjang 10,75 km.

Tabel 2.28

Inventarisasi Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim

No	NAMA DAERAH IRIGASI	SUMBER AIR	LUAS AREAL			BANGUNAN/BENDUNGAN INTAKE	BANGUNAN			SALURAN						KONDISI BANGUNAN IRIGASI			
			BAKU	POTENSIAL	FUNGSIAN AL		BAGI	SADAP	POMPA	PRIMER		SEKUNDER		TERSIER		B	S	RR	RB
										TANAH	SAL.PAS	TANAH	SAL.PAS	TANAH	SAL.PAS				
			(HA)	(HA)	(HA)	(BH)	(BH)	(BH)	(M')	(M')	(M')	(M')	(M')	(M')					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	KABUPATEN MUARA ENIM	1.SUNGAI 2.TEBAT 3.DANAU	28,059.10	23,479.05	15,358.05	239	269	167	6	39,700.00	24,030.00	271,031.00	55,216.00	43,458.00	1,170.00	34	18	28	21
JUMLAH			28,059.10	23,479.05	15,358.05	239	269	167	6	39,700.00	24,030.00	271,031.00	55,216.00	43,458.00	1,170.00	34	18	28	21

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Tahun 2013

Tabel 2.29

Jumlah Dan Kondisi Elemen Bangunan Irigasi Kabupaten Muara Enim

No	NAMA ELEMEN BANGUNAN IRIGASI	JUMLAH DAN KONDISI									
		JUMLAH	SATUAN	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
				JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bangunan Bendungan Intake	239	(BH)	57	24	60	25	76	32	45	19
2	Bangunan										
	21.Bagi	269	(BH)	86	32	48	18	89	33	46	17
	22.Sadap	167	(BH)	63	38	42	25	32	19	30	18
	23.Pompa	6	(BH)	0	0	0	0	0	0	6	100
3	Saluran										
	3.1.Primer										
	3.1.1.Saluran tanah	39700	(M')	15,483.00	39	7,146.00	18	15,483.00	39	1,588.00	4
	3.1.2.Saluran Pasangan	24030	(M')	8,411.00	35	4,085.00	17	7,930.00	33	3,605.00	15
	3.2.Sukunder										
	3.2.1.saluran Tanah	271031	(M')	113,833.00	42	43,365.00	16	75,889.00	28	37,944.00	14
	3.2.2.Saluran Pasangan	55216	(M')	24,847.00	45	9,387.00	17	20,430.00	37	552	1
	3.3.Tersier										
	3.3.1.Saluran Tanah	43458	(M')	18,687.00	43	6,084.00	14	13,037.00	30	5,650.00	13
	3.3.2.Saluran Pasangan	1170	(M')	433	37	293	25	281	24	164	14
JUMLAH					34		18		28		

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Tahun 2013

d Perumahan

d.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih adalah persentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Rumus untuk menghitung rumah tangga pengguna air bersih berdasarkan Permendagri No 45 Tahun 2010 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Data yang bersumber dari Indikator Sosial Ekonomi tahun 2011 menunjukkan tabel Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2010, berikut tabelnya.

Tabel 2.30

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Fasilitas Perumahan	2008	2009	2010
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	82,24	82,74	82,81

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Muara Enim dari tahun 2008-2010 terus mengalami laju peningkatan. Peningkatan persentase dari tahun 2008-2009 mengalami peningkatan sebesar 0,5%, dan selanjutnya pada tahun 2009-2010 meningkat sebesar 0,07%.

Meningkatnya setiap tahun pengguna air bersih di Kabupaten Muara Enim, menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Muara Enim semakin menyadari pentingnya air bersih bagi kesehatan. Peningkatan pengguna air bersih di Kabupaten Muara Enim diharapkan terus meningkat, semakin banyaknya warga yang menggunakan air bersih akan memberikan dampak baik bagi peningkatan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Muara Enim.

d.2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik adalah persentase rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya. Rumah tangga pengguna listrik dapat dihitung dengan rumus yang ada pada lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, berikut adalah rumusnya.

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna listrik}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Data Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Muara Enim tahun 2008-2010 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31

Rumah Tangga Pengguna Listrik

Fasilitas Perumahan	2008	2009	2010
Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	86,68	88,05	92,45

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Muara Enim setiap tahunnya meningkat cukup tinggi. Pada tahun 2008 rumah tangga pengguna listrik 86,68%, tahun 2009 rumah tangga pengguna listrik 88,05 dan pada tahun 2010 rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Muara Enim 92,45%. Peningkatan persentase sebesar 1,37 (tahun 2008-2009) dan sebesar 4,4% (tahun 2008-2009).

Peningkatan rumah tangga pengguna listrik cukup signifikan terjadi pada tahun 2008-2009. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rumah tangga di Kabupaten Muara Enim semakin maju dan sejahtera, dengan banyak rumah tangga telah menggunakan listrik. Peningkatan pemanfaatan listrik sebagai penerangan seharusnya diimbangi dengan tersedianya pasokan listrik yang cukup untuk penduduk di Kabupaten Muara Enim secara merata.

d.3. Rumah Tangga Ber-Sanitasi

Rumah tangga ber-sanitasi merupakan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi/jamban sendiri disetiap rumah atau dengan kata lain tidak menggunakan jamban bersama serta memiliki tangki septik sendiri. Indikator mengenai rumah tangga ber-sanitasi bermanfaat untuk analisis mengenai perumahan khususnya di Kabupaten Muara Enim. Rumah tangga ber-sanitasi dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Data Rumah Ber-Sanitasi Kabupaten Muara Enim tahun 2008-2010 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32

Rumah Tangga Ber-Sanitasi

Fasilitas Perumahan	2008	2009	2010
Rumah Tangga mempunyai Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	36,65	46,13	51,76

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Data rumah tangga bersanitasi setiap tahunnya meningkat dari tahun 2008-2010. Peningkatan rumah tangga bersanitasi cukup tinggi, tahun 2008-2009 meningkat sebesar 9,48% dan 5,63% pada tahun 2009-2010. Indikator Rumah Tangga Ber-Sanitasi erat hubungannya dengan kesehatan dan kondisi permukiman penduduk.

Data mengenai kondisi perumahan yang terus meningkat menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Muara Enim semakin sadar akan pentingnya kesehatan dengan menggunakan jamban yang memiliki tangki septik.

e Perencanaan Pembangunan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri No 45 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti:

- RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
- RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
- RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
- Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Keempat dokumen diatas ada di Kabupaten Muara Enim dan telah di PERDA -kan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang telah di-PERDA-kan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 8 tahun 2008 dan berlaku mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muara Enim yang lalu telah di-PERDA-kan dengan Perda No 25 Tahun 2008. Berlaku pada tahun 2008-2013, dan saat ini sedang disusun RPJMD yang baru. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun setelah RPJMD disahkan dan berlaku selama satu tahun. Pada dasarnya RKPD dibuat dengan mengacu pada RPJMD.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD dapat diketahui persentasenya dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$$

Indikator Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD belum dapat dihitung karena data RKPD tidak tersedia ketika dokumen ini disusun. Namun berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa perwakilan SKPD, diketahui bahwa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang menjadi input bagi RKPD, SKPD menggunakan dokumen RPJMD sebagai referensi utama. Secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa RKPD telah mengakomodir muatan RPJMD.

Dengan menghitung penjabaran program RPJMD kedalam RKPd maka akan diketahui capaian RKPd terhadap RPJMD. Menggunakan kesimpulan yang dibangun, maka Kabupaten Muara Enim memiliki cakupan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd yang baik. Hal ini adalah sebuah prestasi dalam tata kelola pemerintahan yang perlu dipertahankan di masa mendatang.

f Perhubungan

f.1. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis dan Angkutan Darat

Kabupaten Muara Enim yang wilayahnya berupa daratan, menjadikan angkutan daratan menjadi transportasi utama di Kabupaten Muara Enim. Jenis transportasi utama di Kabupaten Muara Enim adalah Kereta Api dan angkutan jalan raya. Sehingga jalan raya merupakan faktor terpenting dalam pergerakan roda ekonomi Kabupaten Muara Enim. Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Jumlah Sarana Perhubungan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2010

Sarana Perhubungan	2008	2009	2010
1	2	3	4
Terminal	4	4	4
Stasiun Kereta Api	1	1	1
Jumlah Bis	53	77	79
Jumlah Truk	1,148	1,305	885

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Terminal dan Stasiun Kereta Api di Kabupaten Muara Enim dari tahun 2008-2010 tidak mengalami perubahan. Dari RPJMD Kabupaten Muara Enim menyebutkan bahwa kereta api banyak dimanfaatkan menjadi sarana angkutan batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan. Apabila dibandingkan, kereta api untuk mengangkut batubara lebih sering daripada mengangkut penumpang.

Fasilitas transportasi tidak mengalami peningkatan selama tiga tahun, namun jumlah kendaraan terus meningkat, kecuali pada jumlah truk yang pada tahun 2009 hingga 2010 menurun drastis sebesar 420 unit kendaraan. Penurunan drastis ini dapat disebabkan karena fungsi truk beralih ke kereta. Dengan demikian diperlukan perencanaan pembangunan fasilitas baru apabila peningkatan jumlah kendaraan terus terjadi.

f.2. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu lalu lintas dan ketertiban lalu lintas merupakan salah satu tugas dari Dinas Perhubungan. Selain pemasangan rambu-rambu juga diperlukan perawatan secara berkala. Dengan demikian rambu-rambu dapat mengatur lalu lintas dalam jangka waktu yang lama.

Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan rumus untuk mengetahui persentase pemasangan rambu-rambu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun } n}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$$

Data yang bersumber dari LKPJ tahun 2012 belum dapat dihitung nilai dari pemasangan rambu-rambu. Diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas dari tahun 2008-2010 sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pembuatan marka jalan, parkir dan zebra cross sepanjang 4.000 meter.
2. Terpenuhinya pengadaan/ pembuatan *warning text dan warning light* sebanyak 5 buah.
3. Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 140 unit, dan RPPJ sebanyak 9 unit.

Pemasangan rambu-rambu yang ada diharapkan dapat mengatur kondisi transportasi yang baik. Selain itu tujuan kedepan adalah terciptanya kondisi transportasi Kabupaten Muara Enim yang tertib dan selaras.

g Lingkungan Hidup

g.1. Persentase Penanganan Sampah

Penanganan sampah saat ini bukan masalah yang mudah. Pertumbuhan penduduk yang meningkat drastis dan semakin banyaknya masyarakat yang konsumtif menjadi salah satu faktor pendukung semakin meningkatnya volum sampah. Di Kota-kota besar sampah menjadi masalah besar dan mengakibatkan bencana. Rumus menghitung persentase penanganan sampah diketahui dari Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

$$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$$

Untuk menghitung persentase penanganan sampah diperlukan volume sampah yang ditangani dan jumlah produksi sampah. Namun karena ketersediaan data yang minim pada penyusunan awal dokumen ini, maka belum dapat dihitung persentase penanganan sampah di Kabupaten Muara Enim. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah kaitannya dengan penanganan sampah adalah dengan penyediaan Bak Sampah yang berjumlah 200 unit.

Semakin tinggi nilai persentase penanganan sampah, kondisi lingkungan semakin terjaga. Terjaganya kondisi lingkungan di Kabupaten Muara Enim akan menciptakan kenyamanan bagi penduduknya. Peningkatan persentase penanganan sampah dengan berbagai program dan didukung oleh penduduknya dapat menghindarkan Kabupaten Muara Enim dari berbagai musibah yang disebabkan oleh sampah. Diharapkan program-program yang berkaitan dengan sampah terus ditingkatkan agar tercipta Kabupaten Muara Enim yang bersih, aman dan nyaman.

g.2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidakberwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Dari Lampiran 1 Permendagri 54 tahun 2010 Kabupaten Muara Enim dapat diketahui rumusnya.

$$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Belum tersedia data mengenai penduduk berakses air minum, oleh karena itu perhitungan persentase penduduk berakses air minum belum dapat diketahui nilainya. Data yang dapat menggambarkan mengenai penduduk yang berakses air minum adalah data yang bersumber dari LKPJ Akhir Masa Jabatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 yang merupakan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum. Program yang dilakukan oleh Pemerintah PU adalah pembangunan 13 jaringan air minum dan optimalisasi 3 jaringan air minum sepanjang 23.981 m dan pembangunan resevoir dengan kapasitas 2.300m³.

Semakin tinggi penduduk yang berakses air minum, maka kondisi penduduk di suatu daerah semakin sejahtera. Air minum merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Pembangunan jaringan air minum diharapkan dapat merata di seluruh Kabupaten Muara Enim. Pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan akan berjalan baik apabila pemerataan dilakukan distribusi air minum keseluruhan wilayah Kabupaten Muara Enim.

g.3. Pencemaran Status Mutu Air

Pencemaran kualitas air banyak terjadi di daerah industri atau penambangan. Dilingkungan permukiman yang padat penduduk. Pencemaran status mutuair dapat diketahui nilainya dengan menghitung data terkait pencemaran status mutu air dengan rumus yang ada pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

$$\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber data air yang dipantau mutuaihnya}}{\text{Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air}} \times 100\%$$

Data terkait dengan Pencemaran Status Mutu air belum dapat diperoleh pada saat penyusunan dokumen ini. Data mengenai status mutu air dapat disubstitusi dengan data yang juga mampu menggambarkan kondisi mutu air dan pencemarannya di Kabupaten Muara Enim. Laporan LKPJ Masa Akhir Jabatan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki program yang telah terlaksana yang kaitannya dengan pencemaran. Kegiatan tersebut adalah

- Penuntasan 14 kasus pencemaran dan perusakan lingkungan;
- Terlaksananya pengawasan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 terhadap 42 perusahaan;
- Terkoordinasikannya penyelesaian kasus-kasus pengaduan pencemaran lingkungan hidup sebanyak 43 laporan pengaduan.

Semakin tinggi pencemaran status mutu air, maka semakin rendah kualitas air di daerah tersebut. Pencemaran Status Mutu Air jangka panjangnya akan berakibat lebih parah, dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih yang akan diikuti penurunan kualitas kesehatan penduduk. Penanggulangan pencemaran status mutu air perlu dilaksanakan bersama dan terkoordinasi secara baik, dengan tujuan penanggulangan pencemaran dapat dilaksanakan secara bersama-sama dari berbagai pihak.

g.4. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal

Analisis mengenai dampak lingkungan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Cakupan pengawasan Amdal dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi}}{\text{Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL}} \times 100\%$$

Data yang tersedia untuk menganalisis cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal, terbatas pada jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi. Data jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL belum diketahui, sehingga belum dapat dihitung cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Jumlah perusahaan yang telah selesai dokumen Amdal dalam kurun waktu 2008 hingga 2013 berjumlah 21 dokumen, dan 18 dokumen untuk UPL/UKL. Badan Lingkungan Hidup dan pemerintah bekerja sama agar pelaku usaha melengkapi dokumen Amdal. Tujuannya agar pencemaraan di lingkungan berkurang dan terjaganya kondisi wilayah.

h Pertanian

Penataan pertanahan di Muara Enim ditunjukkan melalui jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan pada tahun 2012 sebanyak 2.549. Rincian menurut jenis hak atas tanah sebagai berikut:

1. Hak Milik:2.526
2. Hak Guna Bangunan: 1
3. Hak Guna Usaha: 0
4. Hak Pakai: 22

i Kependudukan dan Catatan Sipil

i.1. Rasio Penduduk Ber- KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu identitas di Indonesia. Saat ini di Indonesia mulai diganti KTP yang lama dengan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 rumus untuk menghitung Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk adalah

$$\frac{\text{Jml penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jml penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$$

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2008-2011 dan dipresentasikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34

Persentase Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Wajib KTP (Orang)	463.834	507.618	515.793	545.589
2	Sudah memiliki KTP (Orang)	278.301	304.571	368.780	432.989
3	Rasio Penduduk ber KTP/Satuan Penduduk	60%	60%	71,49%	79,36%

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2012

Rasio penduduk ber-KTP/ satuan Penduduk pada tahun 2008 dan 2009 nilainya tetap yaitu 60%. Tahun berikutnya 2010 dan 2011 nilainya terus meningkat, berturut-turut nilainya 71,49% dan 79,36%. Laju rasio penduduk ber -KTP tahun 2009-2010 meningkat sebesar 11,49% dan tahun 2010-2011 meningkat sebesar 7,87%.

Semakin tinggi rasio penduduk yang memiliki KTP, maka semakin tinggi capaian Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Nilai rasio penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk yang terus meningkat akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pencatatan penduduk serta memudahkan pemerintah dalam merencanakan perencanaan yang akan dibuat.

i.2. Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk

Pentingnya akta kelahiran adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam-puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. Akta kelahiran mempunyai manfaat yang besar serta kegunaan dari sebuah akte kelahiran ini di kemudian hari. Rumus untuk menghitung kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk berdasarkan Permendagri No 45 Tahun 2010.

Hasil kinerja Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim mencatat pada laporannya LKPJ AMJ tahun 2012 mengenai data kepemilikan akta kelahiran pada tabel berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Tabel 2.35

Pencapaian Pelayanan Akta Kelahiran Muara Enim Tahun 2009-2011

No	Tahun	Pencapaian (Orang)
1	2008	11.361
2	2009	8.315
3	2010	6.558
4	2011	7.598

Sumber: LKPJ AMJ Tahun 2012 Kabupaten Muara Enim

Data untuk mendukung perhitungan kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk dirasa tidak memadai untuk melakukan perhitungan. Data yang hampir sama untuk mensubstitusi adalah data pencapaian pelayanan akta kelahiran di Muara Enim perhitungan kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk diperoleh dari LKPJ AMJ tahun 2012.

Pencapaian pelayanan akta kelahiran Muara Enim Tahun 2009-2011 tergantung dengan angka kelahiran pada tahun tersebut. Melihat pentingnya akta kelahiran dimasa mendatang, penduduk sudah semakin cerdas untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anaknya. Sosialisasi ke daerah-daerah perdesaan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar setiap penduduk memiliki akta kelahiran.

j Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

j.1. Rasio Akseptor KB

Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Untuk menghitung Rasio Akseptor KB menggunakan rumus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu.

$$\frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$$

Berikut data mengenai Rasio akseptor KB Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2011, dengan sumber data Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2012.

Tabel 2.36

Rasio Akseptor KB Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2012

Tahun	Akseptor KB (%)
2008	77,94
2009	77,35
2010	77,15
2011	75,54
2012	75,54

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 (diolah)

Rasio akseptor KB dari tahun ketahun mengalami penurunan nilai. Pada tahun 2008 dengan nilai rasio 77,94% terus menurun hingga tahun 2011 dengan nilai rasio 75,54%. Penurunan nilai rasio dipengaruhi oleh pasangan pengguna KB.

Semakin rendahnya rasio akseptor KB dapat menunjukkan semakin rendahnya jumlah penduduk pengguna KB dibandingkan dengan pasangan usia subur. Pemerintah dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Muara Enim, mulai gencar dalam promosi KB melalui *workshop* atau seminar sehingga langsung bertemu dengan calon akseptor KB. Saat ini pemerintah pusat sudah banyak melakukan banyak promosi tentang KB melalui iklan di televisi, akan lebih baik apabila program ini di teruskan ke daerah.

j.2. Cakupan Peserta KB Aktif

Tujuan dari Keluarga Berencana adalah Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya

masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Cakupan KB aktif dihitung dengan rumus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

$$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$$

Data cakupan KB Aktif dapat dihitung dari diatas dan data yang diperoleh dari laporan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.37

Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2011

	Tahun			
	2008	2009	2010	2011
Peserta KB Aktif	108.637	113.224	128.395	133.385
Jumlah Pus	139.382	146.376	166.425	176.584
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	77,94	77,35	77,14	75,53

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

Cakupan peserta KB Aktif Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan paling banyak cakupan peserta KB aktif terjadi pada tahun 2010 ke 2011 menurun sebanyak 1,61%. Meskipun jumlah peserta KB aktif meningkat setiap tahunnya, jumlah PUS juga meningkat semakin banyak sehingga nilai cakupan peserta KB aktif menurun.

Semakin rendahnya cakupan peserta KB dapat menunjukkan semakin rendahnya jumlah penduduk pengguna KB dibandingkan dengan pasangan usia subur. Pemerintah sebaiknya mulai mempromosikan KB dengan cara memberi tahu kepada penduduk khususnya pasangan usia subur mengenai manfaat program KB.

k Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi bergeraknya roda pembangunan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

k.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$$

Data tingkat partisipasi angkatan kerja bersumber dari indikator sosial ekonomi diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2.38

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2011

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan	L+P	TPAK
2008	85,23	58,70	72,09	321.041
2009	84,73	55,64	70,42	319.24
2010	84,70	60,87	72,86	356.46
2011	pm*	pm*	72,73	496 576
2012	pm*	pm*	72,76	505 302

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2010

Partisipasi angkatan kerja Kabupaten Muara Enim pada tahun 2008-2010 bersumber dari data indikator sosial ekonomi tahun 2011 Kabupaten Muara Enim. Nilai TPAK diatas dihitung per 1000 penduduk. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 mengalami penurunan pada tahun 2008-2009 dengan nilai penurunan 1,81. Meningkatkan kembali pada tahun 2009-2010 sebesar 37,24.

Pada tahun 2010 nilai tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan dari 1000 penduduk terdapat 356 angkatan kerja. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya nilai angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk di Kabupaten Muara Enim yang berpartisipasi dalam pergerakan aktivitas ekonomi. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai akan berdampak baik bagi Pemerintah Daerah.

k.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik atau penduduk yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka dapat diketahui dari rumus pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

$$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$$

Data tingkat pengangguran terbuka bersumber dari Indikator Sosial Ekonomi Tahun 2010, ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.39

Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 – 2010

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Penganggur
2008	6,68	5,92	6,37	20.46
2009	5,71	4,93	5,40	17.271
2010	3,37	8,77	5,61	20.01

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2010

Nilai pengangguran terbuka pada tahun 2008 adalah 20,46%, kemudian turun sebesar 3,19% menjadi 17,27% pada tahun 2009, yang kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2010 sebesar 2,74 menjadi 20,01%. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa pada tahun 2010 penduduk yang menganggur karena mengharapkan pekerjaan yang lebih layak ataupun belum mendapatkan pekerjaan sebesar 20,01% dari angkatan kerja.

Semakin tinggi nilai pengangguran terbuka, akan menjadi beban bagi daerah. Pengangguran terbuka dapat dikurangi keberadaannya dengan beberapa cara. Pelatihan mengenai *enterpreneur*, sehingga orang yang menganggur dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang kemudian dapat mengurangi jumlah pengangguran. Peningkatan *softskill* dengan adanya peningkatan *softskill* menciptakan lapangan kerja yang memiliki keterampilan dan SDM yang lebih berkualitas.

I Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

I.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Untuk mengetahui persentase koperasi aktif dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$$

Data persentase Koperasi Aktif yang bersumber dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40

Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Persentase Koperasi Aktif	60.08584	60.41667	61.41079	63.61829

Sumber: LKPJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

Persentase koperasi aktif setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga 2012. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun terakhir 2011 ke 2012, nilai peningkatan sebesar 2,2%. Peningkatan persentase koperasi aktif menunjukkan bahwa peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah kabupaten menjadi penting.

Semakin besar nilai persentase koperasi aktif, maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Saat ini ekonomi daerah sudah banyak yang berazaskan koperasi. Azas koperasi dipilih karena tujuan dari koperasi yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Dengan demikian keberadaan koperasi harus didukung oleh pemerintah, sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dan koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah.

I.2. Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Data jumlah UKM yang bersumber dari LKPJ Tahun 2012 Kabupaten Muara Enim. Data disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.41

Jumlah UKM Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2012

Tahun	Usaha Kecil (unit)	Usaha Menengah (unit)
2009	2.229	6
2010	2.329	7
2011	2.379	7
2012	2.379	7

Sumber: LKPJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

Jumlah usaha kecil setiap tahun hampir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 ke 2010 dalam satu tahun peningkatan usaha kecil meningkat hampir 100 usaha kecil dan 1 usaha mikro. Kemudian pada tahun berikutnya meningkat lagi sebesar 50 usaha kecil. Pada tahun yang sama, jumlah usaha menengah tidak bertambah. Tahun berikutnya jumlah usaha kecil dan usaha menengah tidak bertambah.

Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Jumlah UKM non BPR/LKM yang berjumlah ribuan dirasa dapat menggerakkan ekonomi daerah, sehingga dalam pelayanannya terhadap penduduk dapat dioptimalkan dan meminimalisir barang-barang yang didatangkan dari luar daerah. Peran pemerintah sebagai pemegang kendali diperlukan dalam rangka pengembangan UKM melalui berbagai penyaluran dana pengembangan UKM dan promosi ke berbagai daerah melalui acara-acara yang diselenggarakan daerah.

m Penanaman Modal

m.1. Jumlah Investor Berskala Nasional dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 menyebutkan capaian kinerja yang diperoleh urusan penanaman modal dari tahun 2008 hingga 2012. Capaian kinerja urusan penanaman modal adalah berikut.

- Sosialisasi kebijakan penanaman modal di tingkat internasional seperti *Sriwijaya Heritage*, *Sriwijaya Expo*, *Envesda Expo* dan Pameran di Belanda.
- Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2010 sebanyak 20 Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan dan Energi, Perkebunan, Kehutanan, Perindustrian dan Peternakan dengan total investasi Rp. 7.642.423.260.000,-

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan.

n Kebudayaan

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan festival budaya Kabupaten Muara Enim yaitu adat perkawinan Dusun Tanjung Enim, kegiatan ini diikuti oleh 33 peserta. Selain itu Wisata Candi Bumi Ayu di Kecamatan juga menarik wisatawan untuk datang.

Beberapa indikator pengembangan kebudayaan di Muara Enim ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42

Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan

Tahun 2008-2012

Indikator	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	jumlah	0	0	1	1	2
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	jumlah	2	2	3	3	3
Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

Pengembangan kebudayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara promosi oleh pemerintah daerah dan kunjungan wisata dari penduduk di Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan kebudayaan akan semakin berkembang dan akan meningkatkan pendapatan daerah.

o Pemuda dan Olahraga

Wujud pembangunan generasi muda Indonesia adalah: (a) pemberdayaan pemuda untuk membangkitkan potensi pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan. (2) Pengembangan pemuda untuk menumbuhkembangkan potensi manajerial, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan (3) perlindungan pemuda menolong pemuda dalam menghadapi demoralisasi, degradasi nasionalisme, tindakan destruktif, regenerasi dan perlindungan hak dan kewajiban pemuda.

Pengembangan kepemudaan dan olah raga merupakan salah satu urusan wajib yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan, termasuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa indikator kinerja pembangunan pemuda dan olah raga di Muara Enim sejak tahun 2008 sampai dengan 2012, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.43

Indikator Kinerja Pemuda dan Olah Raga

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Jumlah organisasi pemuda	jumlah	40	41	42	43	44
Jumlah Organisasi olahraga	jumlah	0	0	25	25	25
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	jumlah	3	3	4	3	5
Jumlah Kegiatan Olahraga	jumlah	0	0	22	22	22
Lapangan Olahraga	jumlah	0	0	0	0	21

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

p Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

p.1. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Menghitung rasio Linmas per 10.000 penduduk menggunakan rumus dibawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

$$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

Laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2012 menyebutkan jumlah linmas yang dilatih pada periode 2008-2012 adalah 40 Kades atau Lurah. Diketahui jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2011 adalah 731.410 jiwa sehingga dapat dihitung rasio linmas per 10.000 penduduk di kabupaten Muara Enim. Nilai dari rasio jumlah Linmas Per 10.000 penduduk adalah 0,55.

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

p.2. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks kepuasan Layanan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Data indeks kepuasan layanan masyarakat diperoleh dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Dari hasil LAKIP Kabupaten Muara Enim diperoleh data mengenai indeks kepuasan, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Enim Tahun 2012

Urutan	SKPD	Nilai IKM
I	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	72,70
II	Rumah Sakit Umum Daerah HM Rabain	75,83
III	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	73,51
IV	Pusat Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	72,70

Sumber: LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

Dari data diatas diketahui bahwa nilai IKM di beberapa SKPD di Kabupaten Muara Enim seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD HM Rabain, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan). Dari Keempat SKPD di Kabupaten Muara Enim IKM tertinggi ada pada RSUD HM. Rabain. Rata-rata nilai IKM SKPD di Kabupaten Muara Enim adalah 73,69.

Semakin tinggi nilai IKM maka semakin baik pula pelayanan yang diberikan instansi pemerintah ke masyarakat. Belum diketahui standar minimum nilai IKM di Kabupaten Muara Enim, namun dilihat dari rata-rata nilai IKM di empat SKPD bernilai 73,69 dirasa perlu peningkatan pelayanan. Peningkatan nilai IKM disuatu instansi/ SKPD dapat dilakukan sesuai tahapan evaluasi. Evaluasi penting guna mengetahui kekurangan yang ada pada SKPD sehingga kurang dalam melayani masyarakat. Setelah evaluasi maka perlu dilakukan perbaikan. Perbaikan dibagi menjadi memperbaiki kualitas SDM, menambah SDM, memperbaiki sistem pelayanan.

q Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian mengartikan ketahanan pangan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Hal ini diwujudkan dengan adanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Rumus menghitung ketersediaan pangan utama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah.

$$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Analisis kondisi ketahanan pangan menggunakan rumus yang diarahkan oleh Permendagri 54/2010 tidak dapat dilakukan karena data rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun belum tersedia. Sebagai substitusi, digunakan data program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Data yang tersedia bersumber dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) tahun 2012 sebagai berikut.

- Terciptanya lumbung pangan di Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang, Desa Muara Harapan, dan Desa Muara Emil serta Tanjung Agung.
- Tersedianya buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan buku Analisis Ketersediaan dan Pola Konsumsi Pangan untuk Kabupaten Muara Enim.
- Tersedianya alat penepung dan lahan demplot bagi PKK/Dasawisma 10 Dasawisma (1 Desa) dan 5 unit alat penepung di Desa Bitis Kecamatan Gelumbang.
- Tersedianya data pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok selama 12 bulan dalam 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Semende Darat Laut dan Kecamatan Gelumbang.

Program yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan agar terwujud ketahanan pangan daerah yang kemudian mendukung ketahanan pangan nasional. Program lain yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan menggunakan bibit unggul dalam penanaman tanaman pangannya.

r Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran Permendagri No 45 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti.

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”
- Buku “PDRB Kabupaten”

Kedua dokumen diatas ada di Kabupaten Muara Enim, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

s Komunikasi dan Informatika

Komunikasi merupakan hal penting akhir-akhir ini, komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai media. Begitu pula dengan informasi, semakin majunya teknologi berdampak pada kemudahan penduduk memperoleh informasi. Memudahkan penduduknya memperoleh informasi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memiliki situs resmi dengan alamat www.muaraenimkab.go.id. Adanya situs pemerintahan memudahkan masyarakat Kabupaten Muara Enim dan seluruh dunia dengan mudah mengakses situs Kabupaten Muara Enim.

Website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari segi tampilan sudah interaktif dan menarik, dan dari segi *update* informasi sudah *up to date*. Diharapkan kedepannya *website* semakin interaktif dan informatif dalam menyampaikan informasi mengenai Muara Enim.

Beberapa indikator kinerja bidang komunikasi dan informatika ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Pada umumnya, kinerja per tahun mengalami peningkatan, walaupun ada juga yang menunjukkan kondisi tetap setia tahunnya.

Tabel 2.45

Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika

Tahun 2008-2012

Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	3	6	17	17	17
Rasio warnet terhadap penduduk	rasio	24	6	12	33	22
Jumlah surat kabar nasional	eksemplar	1	1	1	1	1
Jumlah surat kabar daerah	eksemplar	7	9	10	10	10
Jumlah penyiaran radio	siaran	12	12	11	11	11
Keberadaan website milik Pemerintah Daerah	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
Jumlah pelaksanaan pameran/expo	kali	3	3	3	3	3

Sumber: Kantor Komunikasi dan Informatika, Tahun 2013

t Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Data jumlah perpustakaan di Kabupaten Muara Enim tahun 2012 ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 2.46

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

No	Nama perpustakaan	JUMLAH PERPUSTAKAAN (Unit)						
		Masyarakat Umum	SD	SMP	SMA	PT	Instansi	Rumah Ibadah
1	Perpustakaan Umum	1						
2	Rumah Baca	4						
3	Perpustakaan SD & MIN		175					
4	Perpustakaan SLTP & MTS			78				
5	Perpustakaan SLTA & MAN				45			
6	Perpustakaan Kelurahan & Desa	126						
7	Perpustakaan Karang Taruna	2						
8	Perpustakaan Masjid							4
9	Perpustakaan Perguruan Tinggi					2		
10	Perpustakaan Instansi						34	

Sumber: LKPJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012

Di Kabupaten Muara Enim jumlah perpustakaan paling banyak terletak di Sekolah-sekolah, namun jumlah perpustakaan untuk masyarakat cukup banyak terletak di desa atau kelurahan. Banyaknya jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Buku adalah jendela dunia merupakan pepatah lama, namun sangat berarti. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah memperbanyak fasilitas membaca terutama bagi masyarakat seperti dengan mengadakan perpustakaan keliling atau taman baca masyarakat (TBM).

2.3.2 Urusan Pilihan

Urusan pelayanan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Muara Enim masih perlu ditingkatkan.

a Pertanian dan Kehutanan

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bagian pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi sektor pertanian dari PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan. Rumus menghitung kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

$$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim diperoleh dari buku Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim. Buku tersebut menyediakan data kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim seperti ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 2.47

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim Tahun 2010-2011

Sektor	Tanpa Migas				Rata-rata 2008- 2011
	2008	2009	2010*	2011**	
Pertanian	29,07	27,6	27,57	26,87	27,78

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga 2011 mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2008 ke 2009 sebesar 1,47%, pada tahun berikutnya penurunan terjadi dengan nilai yang kecil. Rata-rata dari tahun 2008-2011 kontribusi sektor pertanian sebesar 27,78%. Penurunan sektor pertanian ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, agar penurunan tidak terjadi terus menerus dan ketahanan pangan serta kestabilan wilayah terjaga.

b Energi dan Sumberdaya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Rumus menghitung kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

$$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim diperoleh dari buku Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim. Buku tersebut menyediakan data kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim seperti ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 2.48

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim Tahun 2010-2011

Sektor	Tanpa Migas				Rata-rata 2008- 2011
	2008	2009	2010*	2011**	
Pertambangan dan Penggalian	28,37	29,32	29,83	31,08	29,65

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Kontribusi pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga 2011 mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan terjadi secara perlahan setiap tahun peningkatan rata-rata setiap tahun meningkat 0,9%. Rata-rata dari tahun 2008-2011 kontribusi sektor pertambangan sebesar 29,65%. Kontribusi sektor pertambangan cukup besar menyumbang PDRB, akan tetapi peningkatan sektor pertambangan sebaiknya didukung oleh pemerintah namun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan agar sektor pertambangan menyumbang lebih banyak kepada sektor PDRB.

c Perdagangan dan Pariwisata

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pariwisata adalah industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan

jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Rumus menghitung kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

$$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim diperoleh dari buku Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim. Buku tersebut menyediakan data kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim seperti ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 2.49

Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim Tahun 2010-2011

Sektor	Tanpa Migas				Rata-rata 2008- 2011
	2008	2009	2010*	2011**	
Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,69	10,72	10,74	10,8	10,74

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga 2011 mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan terjadi secara gradasi tipis setiap tahun peningkatan rata-rata setiap tahun meningkat 0,3%. Rata-rata dari tahun 2008-2011 kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata sebesar 10,74%. Peningkatan sektor perdagangan dan pariwisata sebaiknya didukung oleh pemerintah, dengan cara perbaikan infrastruktur perdagangan dan pariwisata sehingga warga dan wisatawan yang datang semakin banyak dan sektor perdagangan dan pariwisata menyumbang PDRB lebih besar.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Sub bab aspek daya saing daerah berisi penjelasan tentang kesiapan daerah untuk maju dan berkembang. Penilaian terhadap kesiapan daerah tersebut dilakukan terhadap 4 fokus, yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Pada saat laporan ini dibuat, data mengenai indikator-indikator pada fokus kemampuan ekonomi daerah belum didapat sehingga belum dapat dihitung capaiannya.

2.4.1 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur adalah fokus pertama dari 3 fokus yang dibahas pada aspek daya saing daerah. Fokus ini berusaha melihat sejauh mana upaya penyediaan sarana-prasarana yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menarik sektor usaha agar mau menyelenggarakan kegiatan ekonomi di Muara Enim. Kesiapan tersebut diukur dari 5 sub fokus, yaitu perhubungan, penataan ruang, kelembagaan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika.

a Perhubungan

a.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Menghitung rasio panjang jalan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 rumusnya sebagai berikut.

$$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$$

Panjang jalan di Kabupaten Muara Enim diketahui pada tahun 2010 sepanjang 1.370,74 Km. Kendaraan yang diketahui jumlahnya pada tahun 2010 adalah Bus dan Truk dengan jumlah berturut-turut adalah 964 unit. Sehingga dapat dihitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 1,4.

Nilai rasio 1,4 menunjukkan bahwa sarana jalan di Kabupaten Muara Enim masih cukup tersedia untuk memberi akses kepada kendaraan. Perhitungan yang sudah dilakukan terbatas pada data jumlah kendaraan bis dan truk, kendaraan pribadi seperti mobil dan motor karena tidak ada datanya sehingga belum dapat dilakukan perhitungan. Kedepannya pemerintah daerah menyiapkan rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Muara Enim agar tercipta transportasi yang nyaman dan tertib di Kabupaten Muara Enim.

b Penataan Ruang

b.1. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Menghitung luas wilayah produktif menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 rumusnya sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Produktif}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$$

Luas wilayah produktif diasumsikan bahwa wilayah produktif yang dimaksud adalah wilayah pertanian. Sehingga dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui luas wilayah produktif dari data yang bersumber dari RTRW Kabupaten Muara Enim. Luas wilayah produktif adalah 36.539 Ha dengan total wilayah 591.961 Ha, setelah dihitung dengan rumus diatas diketahui luas wilayah produktif adalah 6,17%.

Luas wilayah produktif di Kabupaten Muara Enim tidak mencapai 10%. Luas wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah faktor bencana, dapat dilihat pada sub bab berikutnya mengenai wilayah banjir yang nilainya mencapai 30%. Peran sektor pertanian yang memberikan kontribusi cukup besar pada PDRB diharapkan pemerintah meningkatkan kualitas agar daerah lebih produktif.

b.2. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Menghitung luas wilayah industri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 rumusnya sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Industri}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$$

Perhitungan untuk mengetahui luas wilayah industri diperoleh dari RTRW Kabupaten Muara Enim tahun 2012-2032. Luas wilayah industri adalah 9.600 Ha dengan total wilayah 591.961 Ha, setelah dihitung dengan rumus diatas diketahui luas wilayah industri adalah 1,6%.

Luas wilayah industri tidak terlalu luas di Kabupaten Muara Enim. Dari perhitungan, kedepannya sektor industri tidak menjadi sektor utama pengembangan ekonomi daerah. Namun pengembangan sektor industri diharapkan akan memberikan dampak positif bagi daerah, karena sektor industri akan menyerap cukup banyak tenaga kerja, sehingga akan mengurangi angka pengangguran, serta menambah PAD Kabupaten Muara Enim.

b.2. Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Menghitung luas wilayah banjir menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 rumusnya sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Kebanjiran}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$$

Perhitungan untuk mengetahui luas wilayah industri diperoleh dari RTRW Kabupaten Muara Enim tahun 2012-2032. Luas wilayah banjir adalah 182.156 Ha dengan total wilayah 591.961 Ha, setelah dihitung dengan rumus diatas diketahui luas wilayah banjir adalah 30,77%.

Luas wilayah banjir cakupannya cukup luas di Kabupaten Muara Enim. Apabila luas banjir di Kabupaten Muara Enim terus meluas, akan memberikan dampak negatif bagi pengembangan daerah. Sehingga diperlukan penanganan oleh pemerintah agar tidak semakin meluas dan justru tertangani.

c Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

c.1. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Sampai dengan akhir tahun 2010, sektor perbankan di Kabupaten Muara Enim belum menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti, baik dari bank pemerintah maupun swasta. Peningkatan hanya terjadi pada kantor pembantu bank pemerintah pada tahun 2010 yang pada tahun sebelumnya 5 kantor menjadi 6 kantor. Hal yang sama juga terjadi pada bank swasta yang bertambah 1 kantor pembantu pada tahun 2010 menjadi 6 kantor.

Tabel 2.50
Jumlah Bank Pemerintah, Swasta, dan Bank Unit Desa
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2010

Sektor/Bank	2008	2009	2010
Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah			
1. Kantor Pusat / <i>Central Office</i>	0	0	0
2. Kantor Cabang / <i>Branch</i>	3	3	3
3. Kantor Pembantu / <i>Auxiliary</i>	5	5	6
4. Bank Unit Desa / <i>Village Bank</i>	9	9	9
5. Kantor Inspeksi / <i>Inspection Office</i>	0	0	0
6. Kanwil Supervisor / <i>Representative</i>	0	0	0
7. Kantor Kas / <i>Cash Office</i>	3	4	5
8. Kas Mobil / <i>Mobile Cash</i>	0	0	0
9. Loker Pelayanan / <i>Payment Point Office</i>	1	1	1
Bank Swasta			
1. Kantor Pusat / <i>Central Office</i>	0	0	0
2. Kantor Cabang / <i>Branch</i>	0	1	1
3. Kantor Pembantu / <i>Auxiliary</i>	5	5	6
4. Bank Unit Desa / <i>Village Bank</i>	0	0	0
5. LKBB	0	0	0
6. Kantor Kas / <i>Cash Office</i>	3	0	0
7. Kas Mobil / <i>Mobile Cash</i>	0	0	0
8. Loker Pelayanan / <i>Payment Point Office</i>	0	0	0
Jumlah	29	28	31

Sumber: Muara Enim Dalam Angka 2010

2.4.2 Iklim Berinvestasi

Fokus iklim berinvestasi adalah fokus kedua dari 3 fokus pada aspek daya saing daerah. Fokus ini mencoba mengidentifikasi seberapa kondusif kondisi Kabupaten Muara Enim dalam rangka mendukung investasi riil masuk. Terdapat 2 indikator yang tersedia untuk menilai tingkat iklim

investasi, yaitu angka kriminalitas dan jumlah demo. Penjelasan akan dua hal tersebut akan dijabarkan pada paragraf di bawah ini.

a Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode1 (satu) tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10.000$$

Tabel angka kriminalitas di Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51

Angka Kriminalitas Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 dan 2012

No	Uraian	Tahun		Satuan
		2011	2012	
1	Curat	226	201	Kasus
2	Curas	150	80	Kasus
3	Curanmor	139	112	Kasus
4	Anirat	112	69	Kasus
5	Pembunuhan	22	10	Kasus
6	Perkosaan / Cabul	11	5	Kasus
7	Pemerasan	4	2	Kasus
8	Penyelundupan	0	0	Kasus
9	Penculikan	0	1	Kasus
10	Judi	-	-	Kasus
11	Aniaya Ringan	-	-	Kasus
12	Kenakalan Remaja	-	-	Kasus
Jumlah		664	480	Kasus

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah angka kriminal di Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan. Penurunan ini merupakan kabar baik bagi pemerintah dan penduduknya. Penurunan ini diharapkan setiap tahunnya sehingga penduduk merasa aman dan nyaman.Kondisi ini seharusnya didukung oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah selaku pemimpin daerah, kepolisian dan penduduk Kabupaten Muara Enim.

b Jumlah Demo

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Jumlah demo atau unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2011 terjadi sebanyak 19 dan pada tahun 2012 terjadi sebanyak 21. Jumlah demo ini meningkat dikarenakan masyarakat yang kurang setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, atau hanya sebagai orasi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemimpin.

Kegiatan demo yang terjadi di Kabupaten Muara Enim sebaiknya diawasi, dengan tujuan agar tidak terjadi kerusuhan. Selain itu sebagai pemimpin alangkah baiknya mendengarkan aspirasi penduduknya sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan berjalan seirama.

c Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Sampai dengan tahun 2012, terdapat 9 jenis pajak dan 29 jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Adapun jenis pajak dan retribusi daerah, sebagai berikut:

I. PAJAK DAERAH

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Sarang Burung Walet
7. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Gol. C
8. Pajak Air Bawah Tanah
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

II. RETRIBUSI DAERAH

1. Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5. Pelayanan Pasar
6. Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
8. Pasar Grosir dan atau Pertokoan

9. Terminal
10. Jasa Tempat Khusus Parkir
11. Penyediaan/Penyedotan Kakus
12. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
13. Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
14. Leges
15. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
16. Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang
17. Izin Mendirikan Bangunan
18. Izin Gangguan / Keramaian
19. Izin Trayek
20. Pembuangan Limbah Cair
21. Usaha Perdagangan dan Industri
22. Pendaftaran Perusahaan
23. Izin Air Bawah Tanah
24. Sewa Bus
25. Sewa Loker/Kios
26. Sewa WC
27. Retribusi Benih Ikan
28. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
29. Retribusi Lainnya

2.4.3 Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia adalah fokus terakhir pada aspek daya saing daerah. Fokus ini berusaha melihat kesiapan sumber daya manusia dalam rangka mendukung agenda pembangunan daerah. Indikator yang digunakan dan tersedia untuk mengukur hal tersebut adalah indikator rasio ketergantungan.

Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan rumus dari Permendagri 54 Tahun 2010:

$$\frac{\text{Penduduk usia} < 15 \text{ th} + \text{usia} > 64}{\text{Penduduk usia } 15-64} \times 100$$

Tabel angka kriminalitas di Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52

Rasio Ketergantungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2010

Rasio Ketergantungan	2008	2009	2010
-1	-2	-3	-4
DR	53,47	52,63	56,68

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dilihat dari data tahun 2008 hingga 2010 nilai angka ketergantungan di Kabupaten Muara Enim nilainya diatas 50%. Menunjukkan bahwa usia produktif di Kabupaten Muara Enim menanggung usia yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dengan nilai angka ketergantungan yang cukup tinggi diharapkan pemerintah membantu penduduknya dengan membuka lapangan kerja baru sehingga pembangunan daerah tidak terhamabat oleh angka ketergantungan yang tinggi.

2.5. Kinerja Pembangunan Daerah

Selain gambaran yang disajikan pada tiga aspek dalam Sub Bab 2.1 Aspek Geografi dan Demografi, Sub Bab 2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat, Sub Bab 2.3 Aspek Pelayanan Umum, dan Sub Bab 2.4 Aspek Daya Saing Daerah, pemerintah daerah kabupaten muara enim menggambarkan capaian kinerja daerah sesuai dengan kinerja yang tersedia pada lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.53

**Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2012**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1	Pertumbuhan PDRB						
-	dengan migas	%	5,67	4,73	5,20	5,31	5,42
-	tanpa migas	%	6,82	6,27	7,36	8,02	8,69
1.2	Laju Inflasi						
-	dengan migas	%	14,9	-4,54	8,18	8,4	6,12
-	tanpa migas	%	10,36	6,1	7,76	7,28	7,74
1.3	Indeks Gini		0,28	0,27	0,3	0,31	0,32
1.4	Persentase penduduk miskin	%	17,98	15,96	14,51	13,71	13,21
1.5	Angka Pengangguran	jiwa	20460	17271	20010	18845	18.496,39
II	Fokus Kesejahteraan Sosial						
2.1	Pendidikan						
2.1.1	Angka Melek Huruf	tahun		98,81	98,82	98,85	98,85
2.1.2	Angka Rata-rata lama sekolah	tahun		7,30	7,35	7,49	7,52
2.1.3	APK SD	%	111,01	112,17	114,60	114,72	115,99

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
2.1.4	APK SMP/MTs	%	70,48	80,74	85,23	82,34	86,93
2.1.5	APK SMA/SMK/MA	%	40,40	63,77	65,17	64,06	76,52
2.1.6	APM SD/SDLB/MI	%	89,08	95,80	97,41	97,29	100,24
2.1.7	APM SMP	%	46,58	58,24	61,75	59,18	64,49
2.1.8	APM SMA	%	24,31	44,84	43,07	44,44	56,84
2.2	Kesehatan						
2.2.1	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran	39	37	31	28	25
2.2.2	Angka Harapan Hidup	tahun	67,28	67,47	67,66	67,85	68,04
2.2.3	Persentase Balita Gizi buruk	Persen	0	1,14	1,2	0,75	0,65
2.2.4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (dilaporkan)	Persen	0,7	-0,50	-4,66	-4,90	-3,13
III	Fokus Budaya dan Olahraga						
3.1	Jumlah Grup Kesenian	buah	50	50	85	130	130
3.2	Jumlah Gedung Olahraga	buah	0	0	0	0	2
3.3	Jumlah Sarana Peribadatan	buah	0	0	0	0	0
Aspek Pelayanan Umum							
I	Fokus Layanan Urusan Wajib						
1.1	Pendidikan						

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.1.1	Pendidikan Dasar						
1.1.1a	Angka partisipasi sekolah SD	persen	108,57	109,67	110,78	111,90	113,04
1.1.1b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	rasio	1:212	1:209	1:212	1:188	1:182
1.1.1c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	1:28	1:23	1:17	1:15	1:13
1.1.1d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	1:42	1:45	1:35	1:36	1:32
1.1.2	Pendidikan Menengah						
1.1.2a	Angka partisipasi sekolah SMP	persen	65,31	65,97	66,64	67,32	68,00
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama	rasio	1:285	1:287	1:260	1:211	1:203
1.1.2c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	1:20	1:21	1:16	1:12	1:9
1.1.2d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	1:46	1:45	1:40	1:41	1:36
1.1.2e	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	94,00	94,24	95,20	95,59	96,56
1.1.2f	Angka Partisipasi Sekolah SMA	persen	43,28	43,72	44,62	45,54	46,00
1.1.2g	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah atas	Rasio	1:363	1:366	1:370	1:312	1:290
1.1.2h	Rasio guru terhadap murid	Rasio	1:19	1:18	1:16	1:15	1:11
1.1.2i	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	Rasio	1:31	1:34	1:47	1:44	1:36
1.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.1.3a	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	76,00	85,00	89,00	93,00	97,00
1.1.4	Angka Putus Sekolah						
1.1.4a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	persen	0,15	0,12	0,09	0,07	0,05
1.1.4b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	persen	0,50	0,50	0,49	0,44	0,39
1.1.4c	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	persen	1,90	1,50	1,30	0,90	0,80
1.1.4d	penurunan angka putus sekolah	persen	0,85	0,70	0,96	0,73	0,70
1.1.5	Angka Kelulusan						
1.1.5a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	95,00	99,17	98,49	99,99	99,93
1.1.5b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	98,95	95,69	99,10	99,97	99,85
1.1.5c	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	98,88	97,86	96,76	100,00	99,97
	Angka melanjutkan sekolah						
1.1.5d	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	75,26	77,59	79,99	76,11	80,25
1.1.5e	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	persen	87,34	90,05	90,96	91,31	92,35
1.1.5f	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	orang	3.341	3.713	4.126	4.830	5.196
1.2	Kesehatan						
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan balita	rasio	7,96	9,91	6,88	6,73	6,73
1.2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	0,20	0,22	0,20	0,20	0,20
1.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0,0045	0,0045	0,0042	0,0041	0,00401
1.2.4	Rasio dokter persatuan penduduk	rasio	10,44	9,60	9,60	12,20	10,10
1.2.5	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	rasio	15,60	14,70	12,90	16,00	15,04

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	34,74	3,27	11,01	11,00	70,48
1.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	80,48	87,53	90,04	88,80	92,84
1.2.8	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	38,58	36,19	34,87	32,27	34,18
1.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	0,00	88,00	0,90	0,03	3,39
1.2.12	Cakupan puskesmas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	109,09
1.2.13	Cakupan Puskesmas Pembantu	persen	34,07	33,23	33,64	34,58	34,05
1.2.14	Cakupan kunjungan bayi	persen	69,65	88,68	91,25	95,60	90,91
1.2.15	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	persen	95,79	93,77	97,73	79,00	91,72
1.3	<i>Pekerjaan Umum</i>						
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	n.a	0,871	0,382	0,436	0,518
1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	rasio		0,03	0,03	0,03	0,03
1.3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	1,51	33,11	34,83	34,83	55,59
1.3.4	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	rasio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satu penduduk	rasio	0,09	0,28	0,27	0,47	0,75

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.3.6	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	0,65	0,66	0,66	0,71	0,74
1.3.7	Panjang Jalan dilalui roda empat	rasio		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	29,91	27,35	25,42	15,38	11,64
1.3.11	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	33,43	47,35	55,71	63,2	68,22
1.3.12	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen		82,57	38,2	43,58	51,77
1.4	Perumahan						
1.4.1	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	persen	18,54	19,06	19,24	19,32	20,27
1.4.2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Rumah tangga bersanitasi	persen	1,51	33,11	34,83	34,83	55,59
1.4.5	Lingkungan pemukiman kumuh	persen	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80
1.5	Penataan Ruang						
1.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,06	100,96	96,64	96,64	87,86
1.5.2	Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Perencanaan Pembangunan						
1.6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.6.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
1.6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
1.6.4	Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7	Perhubungan						
1.7.1	Rasio ijin trayek	rasio	0,40	0,40	0,20	0,40	3,06
1.7.2	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah	708,00	5.626,00	6.141,00	6.943,00	8.120,00
1.7.3	Jumlah terminal angkutan umum	jumlah	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.7.4	jumlah angkutan darat	jumlah	168.802	187.557	213.314	234.926	263.117
1.7.5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	0,00	91,60	88,40	85,50	109,00
1.7.6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	30	30	30	30	30
1.7.7	pemasangan rambu-rambu	unit	0	50	0	75	110
1.8	Lingkungan Hidup						
1.8.4	Pencemaran status mutu air	persen	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
1.8.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	persen					
1.8.6	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	persen	40,00	46,00	50,00	70,00	80,00
1.9	Kependudukan dan Catatan Sipil						

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.9.1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	persen	0,31	0,38	0,37	0,48	0,78
1.9.2	Persentase bayi berakte kelahiran	persen	60,00	75,00	80,00	86,00	88,00
1.9.3	pasangan berakte nikah	pasang	114,00	54,00	108,00	22,00	16,00
1.9.4	Persentase kepemilikan KTP	persen	38,00	38,00	37,00	48,00	78,00
1.9.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	persen	0,00	40,00	43,00	44,00	44,00
1.9.6	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.9.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	belum	sudah	sudah	sudah	sudah
1.10	<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</i>						
1.10.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	9,13	9,47	9,48	9,49	9,51
1.10.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	8,21	8,36	8,38	8,39	8,41
1.10.3	Rasio KDRT	rasio	0,001	0,05	0,04	0,03	0,02
1.10.4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	persen	0	0	0	0	0
1.10.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	17,42	17,64	17,65	17,67	17,69
1.10.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen		0,063	0,049	0,036	0,023
1.11	<i>Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera</i>						
1.11.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	rata-rata	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
1.11.2	Persentase Akseptor KB	persen	107	107	109	110	112

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.11.3	Cakupan peserta KB aktif	persen	72,79	73,12	73,79	74,61	75,19
1.11.4	Persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	35,29	36,44	33,02	34,07	31,69
1.11.5	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	persen	n.a	6,2	5,81	5,74	5,63
1.11.6	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	persen	n.a	77,17	77,35	77,94	78,01
1.11.7	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)	Persen	n.a	15,82	12,16	12,11	12,06
1.11.8	Cakupan bina keluarga balita (BKB ber KB)	Persen	n.a	70,78	70,88	70,93	70,95
1.11.9	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	Persen	n.a	87,57	87,69	87,74	87,87
1.11.10	Cakupan PLKB/PKB disetiap desa/kelurahan	Persen	n.a	3	3	3	3
1.11.11	Cakupan penyediaan alat, obat kontrasepsi						
-	Keluarga pra sejahtera	Persen	n.a	9,36	9,37	9,38	9,39
-	Persentase Ks I swasta	Persen	n.a	12,48	12,49	12,49	12,49
-	Pemerintah daerah	persen	n.a	9,37	9,37	9,38	9,39
1.11.12	Cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan	persen	n.a	1	1	1	1
1.11.13	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	persen	n.a	100	100	100	100
1.12	Sosial						

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.12.1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	orang	50320	50320	47186	51693	48652
1.12.3	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen	71	71	91,2	84,4	81
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	6	6	6	6	6	6
1.13	<i>Ketenagakerjaan</i>						
1.13.1	Angka Partisipasi angkatan kerja	jiwa	300.581	301.970	336.450	342.339	357.893,51
1.13.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	angka	38	42	45	50	56
1.13.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	72,09	70,42	72,86	72,73	72,76
1.13.4	Tingkat pengangguran terbuka	persen	6,37	5,4	5,61	5,22	4,59
1.13.5	Persentase keselamatan dan perlindungan	persen	45	47	50	54	60
1.13.6	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	persen	3	2	2	3	4
1.14	<i>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</i>						
1.14.1	Persentase koperasi aktif	persen	5,43	56,552	59,74	61,41	70,68
1.14.2	Persentase Usaha Mikro dan kecil	persen	20,32	44,6	52,24	53,45	53,68
1.14.3	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	jumlah	34	47	63	83	88
1.14.4	Jumlah BPR/LKM	jumlah	1	1	1	2	2
1.14.5	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah		3430	3613	3697	3712
1,14,6	Usaha Menengah	jumlah		6	7	9	13
1.15	<i>Penanaman Modal</i>						

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.15.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	jumlah	0	3	4	42	42
1.15.2	Rasio daya serap tenaga kerja	rasio	0	349	350	350	350
1.15.3	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen		280.167.423.431	300.762.000	356.002.000	392.650.800
1.16	<i>Kebudayaan</i>						
1.16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	jumlah	0	0	1	1	2
1.16.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	jumlah	2	2	3	3	3
1.16.3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	1	1	1	1	1
1.17	<i>Kepemudaan dan Olahraga</i>						
1.17.1	Jumlah organisasi pemuda	jumlah	40	41	42	43	44
1.17.2	Jumlah Organisasi olahraga	jumlah	0	0	25	25	25
1.17.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	jumlah	3	3	4	3	5
1.17.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	jumlah	0	0	22	22	22
1.17.5	Lapangan Olahraga	jumlah	0	0	0	0	21
1.18	<i>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</i>						
1.18.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	jumlah kegiatan	0	0	0	0	2
1.18.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	jumlah kegiatan	0	1	0	1	0
1.18.3	Jumlah Linmas per jumlah 10,000 penduduk	Jumlah	0	0,41	0,41	0,41	0,41

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.18.4	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	rasio	0	3	3,1	3,3	3,4
1.18.5	Petugas perlindungan masyarakat	jumlah	0	4,135	4,135	4,135	4,135
1.18.6	Jumlah LSM		0	57	66	88	106
1.19	<i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i>						
1.19.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	orang	0	0,007	0,0057	0,0049	0,0046
1.19.2	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	rasio	6456	6456	6456	6456	6456
1.19.3	Pertumbuhan ekonomi	persen					
-	dengan migas	persen	5,67	4,73	5,20	5,31	5,42
-	tanpa migas	persen	6,82	6,27	7,36	8,02	8,69
1.19.4	kemiskinan	100-angka kemiskinan	3,37	3,14	3,21	5,98	5,98
1.19.5	Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah	ada/tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada
1.19.6	Persentase penegakan PERDA	persen	95	95	95	95	95
1.19.7	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten	persen	24	15	11	7	9
1.20	<i>Ketahanan Pangan</i>						
1.20.1	Persentase Ketersediaan pangan utama						
	Beras	persen	99	98	97	95	94
	Daging	persen	111	122	134	147	160
	Telur	persen	111	122	134	147	160

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
	Ikan	persen	100	110	121	132	144
1.21	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>						
1.21.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	rata-rata	321	321	321	326	326
1.21.2	Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK	rata-rata	321	321	321	326	326
1.21.3	Jumlah LSM yang aktif	jumlah	0	0	0	0	0
1.21.4	Persentase PKK aktif	persen	100	100	100	100	100
1.21.5	Persentase posyandu aktif	persen	89,51	89,89	91,39	91,95	91,95
1.21.6	Persentase Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	persen	49	51	53	57	59
1.21.7	Persentase pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen	49	51	53	57	59
1.22	<i>Statistik</i>						
	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
	Buku PDRB Kabupaten	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
1.22	<i>Kearsipan</i>						
1.22.1	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	persen	0	30	35	45	70
1.22.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	jumlah kegiatan	0	1	1	1	1
1.23	<i>Komunikasi dan Informatika</i>						
1.23.1	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	3	6	17	17	17
1.23.2	Rasio warnet terhadap penduduk	rasio	24	6	12	33	22
1.23.3	Jumlah surat kabar nasional	eksemplar	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.23.4	Jumlah surat kabar daerah	eksemplar	7	9	10	10	10
1.23.5	Jumlah penyiaran radio	siaran	12	12	11	11	11
1.23.6	Keberadaan website milik Pemerintah Daerah	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
1.23.7	Jumlah pelaksanaan pameran/expo	kali	3	3	3	3	3
1.24	Perpustakaan						
1.24.1	Jumlah perpustakaan	buah	119	139	171	199	462
1.24.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	55.340	52.240	48.840	19.848	3.762
1.24.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	jumlah buku	13.189	13.251	14.243	15.876	16.155
II	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
2.1	Pertanian						
2.1.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kuintal per hektar	42,82	45,95	49,29	48,46	48,16
2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	15,72	16,83	17,1	16,91	16,5
2.1.3	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	persen	10,81	11,05	11,43	11,76	12,09
2.1.4	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	persen	3,6	4,01	3,98	3,8	3,64
2.1.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	8,14	8,34	8,76	8,84	8,63
2.1.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	10,81	11,05	11,43	11,76	12,09
2.1.6	Cakupan Bina Kelompok Tani	persen	39	41	44	45,2	45,7

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
2.1.7	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	persen	47,88	48,85	49,35	50,34	50,86
2.2	<i>Kehutanan</i>						
2.2.1	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	persen	0	0,69	21,68	22,23	24,28
2.2.2	Persentase kerusakan kawasan hutan	persen	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
2.2.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	persen	2	2	2	2	2
2.3	<i>Energi dan Sumberdaya Mineral</i>						
2.3.1	Persentase pertambangan tanpa izin	persen	-	-	15,38	25,64	38,46
2.3.1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	14,18	16,43	17,23	18,1	19,71
2.4	<i>Kelautan dan Perikanan</i>						
2.4.1	Produksi Perikanan	ton per tahun	6873,56	6873,56	7956,3	8014,19	8254,27
2.4.2	Konsumsi ikan	Kg/kapita/thn	4,9	6,1	7,3	8,5	9,7
2.5	<i>Pariwisata</i>						
2.5.1	Kunjungan wisata	persen	0	12277	60825	26372	24177
2.6	<i>Perdagangan</i>						
2.6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	5,43	6,14	6,25	6,39	6,78
2.6.2	Nilai ekspor bersih perdagangan	juta rupiah	2.884.116,12	2.911.009,36	2.724.842,00	3.954.831,00	4.477.883,81
2.6.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	persen	35,15	36,38	35,83	37,18	35,15
2.7	<i>Perindustrian</i>						
2.7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (tanpa migas)	persen	6,61	7,28	7,03	6,86	7,04

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
2.7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	persen	86,55	86,65	84,82	84,83	85,59
2.7.3	Persentase pertumbuhan industri	persen	10,96	13,51	37,63	9,27	36,47
2.7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	13,29	17,24	19,71	20,33	25,31
2.8	<i>Ketrasmigrasian</i>						
2.8.1	Persentase transmigran swakarsa	persen	0	0	0	0	0
2.8.2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	persen	0	0	0	0	0

Aspek Daya Saing Daerah							
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Ribu Rupiah	8.755	222.379	27.491	318.744	356.517,99
1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Ribu Rupiah	125.743	131.702	134.009	222.367	276.050,17
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
2.1	Perhubungan						
2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,011	0,01	0,009	0,008	0,007
2.1.2	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	1.800.000	1.856.000	1.944.000	2.268.000	1.890.000
2.1.3	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	ton	5.114.000	5.824.000	5.232.000	6.128.000	8.710.000
2.1.4	Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang	290.068	304.282	320.297	337.115	354.900
2.1.5	Jumlah barang melalui terminal per tahun	ton	4.516.068	5.017.853	5.575.392	6.969.240	5.162.400
2.2	Penataan Ruang						
2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	persen	0	0	0	0	0
2.2.1	Luas wilayah produktif	persen	0	0	0	0	0
2.2.3	Luas wilayah industri	persen	0	0	0	0	0
2.2.4	Luas wilayah kebanjiran	persen	0	0	0	0	0

2.2.5	Luas wilayah kekeringan	persen	0	0	0	0	0
2.2.6	Luas wilayah perkotaan	persen	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
2.3	<i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangn Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i>						
2.3.1	Angka kriminalitas	Jumlah	924	1,023	504	950	951
2.3.1	Angka kriminalitas	persen	63,96	52,53	67,62	53,76	50,63
2.3.2	jumlah demo	kali	5	17	5	19	21
2.3.3	Lama proses perizinan	hari	10	10	15	15	15
2.3.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	macam					
2.3.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	3	4	8	11	12

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Muara Enim, diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan. Secara umum gambaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Gambaran tentang Pendapatan Daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2008-2012 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

KODE	URAIAN	2010	2011	2012	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	PENDAPATAN	1.025.015	1.327.592	1.659.572	27,26%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.656	86.937	119.456	34,91%
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	16.789	23.366	28.611	30,81%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.676	8.917	12.512	11,92%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.908	9.319	12.112	23,91%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.283	45.336	66.222	47,89%
1.2	DANA PERIMBANGAN	877.390	1.054.683	1.388.273	25,92%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	490.667	549.701	762.740	25,39%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	371.879	463.259	580.314	24,92%

KODE	URAIAN	2010	2011	2012	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	14.844	41.723	45.219	94,73%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.969	185.972	151.843	54,26%
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	3.500	0	-
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	43.946	35.921	45.686	4,46%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	34.119	118.905	79.327	107,61%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.904	26.553	26.830	290,62%
1.3.6	Penerimaan Lain-lain	0	1.092	0	-

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara EnimTA 2010– 2012

Memperhatikan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat dari Rp.1.025 Milyar (2010) hingga mencapai Rp1.659,6 Milyar (2012) dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan 27,26%.

Dari keempat komponen PAD, secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen pembentuk PAD berbeda-beda. Rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah 47,89%, dari Pajak daerah 30,81%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 23,91%, 11,92% dan terendah Retribusi Daerah 8,8%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah belum diketahui secara pasti besar potensi PAD sehingga target yang ditetapkan tidak didasarkan atas asesmen potensi yang dimiliki. Setelah berlakunya *close list system* dalam ketentuan jenis pajak dan retribusi sesuai UU 28/2009, perlu dilakukan penyesuaian perangkat regulasi, kelembagaan pendapatan daerah serta personil agar tidak berimplikasi pada penurunan pendapatan daerah. Adapun penerimaan Dana Perimbangan relatif tanpa masalah berarti kecuali DAK yang memerlukan dana pendamping daerah minimal 10% dari jumlah DAK sehingga mengurangi porsi pemanfaatan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak diketahui secara pasti potensi penerimaannya karena bersifat penerimaan insidental.

b. Belanja Daerah

Gambaran tentang realisasi Belanja Daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

Kode	Uraian	2010	2011	2012	RATA-RATA KENAIKAN (%)
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
2	BELANJA	952.305	1.196.553	1.566.203	28,27%
2.1	Belanja Tidak Langsung	477.930	551.376	646.751	16,33%
2.1.1	Belanja Pegawai	430.982	497.164	573.108	15,32%
2.1.2	Belanja Bunga	3	0	0	-
2.1.3	Belanja Subsidi	72	525	2.130	468,35%
2.1.4	Belanja Hibah	8.035	12.677	23.242	70,56%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.479	7.773	0	-54,16%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa	0	0	0	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa	29.740	32.120	47.012	27,18%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	618	1.117	1.258	46,69%
2.2	BELANJA LANGSUNG	474.375	645.177	919.452	39,26%
2.2.1	Belanja Pegawai	43.056	32.187	47.906	11,80%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.125	275.982	316.093	38,38%
2.2.3	Belanja Modal	261.194	337.009	555.453	46,92%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara Enim TA 2008 - 2013

Memperhatikan Tabel 3.2, diperoleh gambaran bahwa, realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dari Rp477,9 Milyar (2010) hingga Rp646,8 Milyar (2012), dengan rata-rata kenaikan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 28,27%.

Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu Rp474,4 Milyar (2010) hingga Rp919,5 Milyar (2012), dengan rata-rata kenaikan realisasi Belanja Langsung sebesar 39,26%.

c. Pembiayaan Daerah

Gambaran tentang realisasi Pembiayaan Daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran 2008-2012

(dalam juta rupiah)

Kode	Uraian	2010	2011	2012	RATA-RATA KENAIKAN (%)
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	83.093	130.981	232.337	67,51%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	83.093	130.981	223.522	64,14%
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	8.814	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.822	22.603	10.217	-31,87%
3.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	-
	Penyesuaian atas Pengeluaran Pembiayaan ke PDAM	23.647	21.871	10.000	-30,89%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	176	732	217	123,15%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000	0	0	-
	PEMBIAYAAN NETTO	58.271	108.378	222.120	95,47%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	130.981	239.417	315.490	57,28%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara EnimTA 2010– 2012

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu tahun 2008-2012 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	
ASET/ AKTIVA						
ASET LANCAR						
Kas						
Kas di Kas Daerah	81.327	81.085	125.916	221.646	312.860	43,0%
Kas di Bendahara Penerimaan	0	454	9	31	33	38,2%
Kas di Bendahara Pengeluaran	12.425	234	16	1	904	22503,7%
Kas di Bendahara BLUD	0	3.119	5.078	2.905	1.726	5,1%
Investasi Jangka Pendek						

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
Deposito			0	0	0	
Piutang						
Piutang lain-lain	700	2.949	2.380	29.740	52.476	382,0%
Piutang Retribusi	10	97	76	698	372	405,0%
Piutang Deviden	0	0	0	0	0	
Piutang Dana Bagi Hasil	13.429	7.138	979	0	0	-77,7%
Persediaan	11.042	15.271	11.763	10.749	11.558	3,6%
JUMLAH ASET LANCAR	118.933	110.347	146.217	265.770	379.929	37,5%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Dana Bergulir	27.043	23.155	23.438	23.112	14.101	-13,4%
Dana bergulir diragukan tertagih						
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	79.525	86.762	102.189	133.303	144.096	16,4%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	106.568	109.917	125.627	156.415	158.197	10,8%
ASET TETAP						
Tanah	209.165	210.514	210.863	210.213	202.915	-0,7%
Peralatan dan Mesin	114.896	141.103	173.044	226.960	334.640	31,0%
Bangunan Gedung	605.346	714.384	820.163	907.175	1.006.198	13,6%
Jalan, Jembatan dan Jaringan	825.526	1.032.478	1.160.060	1.327.355	1.670.676	19,4%
Aset Tetap Lainnya	59.610	61.891	67.993	69.080	25.841	-11,8%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.451	41.237	8.426	9.320	20.399	28,0%
JUMLAH ASET TETAP	1.839.994	2.201.607	2.440.549	2.750.103	3.260.669	15,4%
ASET LAINNYA						
Kemitraan dengan pihak Ketiga	0	0	0	0	68	
TPTGR	0	0	0	0	0	
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0	0	0	
Aset Tidak Berwujud	0	0	0	2.057	8.083	
Penyertaan Modal yg belum ditetapkan statusnya	0	0	0	0	0	
Aset Lain-Lain	444	1.270	12.600	23.357	84.034	355,8%
JUMLAH ASET LAINNYA	444	1.270	12.600	25.414	92.185	360,6%
JUMLAH AKTIVA	2.065.939	2.423.141	2.724.993	3.197.702	3.890.980	17,2%
HUTANG JANGKA PENDEK						
Hutang PFK	1.305	1.336	29	1.029	1	813,2%
Hutang Pajak	0	9	0	0	0	
Hutang Langganan	0	0	0	0	0	

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
Hutang kepada pihak ketiga/rekanan	0	103	545	772	457	143,3%
Hutang Lain-lain	578	625	0	321	1.255	66,4%
HUTANG JANGKA PANJANG						
Hutang Dalam Negeri	181	0	0	0	5.425	
Hutang Luar Negeri	0	0	0	0	0	
JUMLAH HUTANG	2.064	2.073	574	2.122	7.138	108,5%
EKUITAS DANA						
Ekuitas Dana Lancar						
SILPA	92.430	83.092	130.981	223.523	315.489	39,8%
Cadangan Deposito						
Cadangan Piutang	14.139	10.184	3.434	30.438	52.849	191,4%
Cadangan Persediaan	11.042	15.271	11.763	10.750	11.558	3,6%
Pendapatan yang Ditangguhkan	17	454	8	31	33	691,6%
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-578	-727	-544	-1.093	-1.712	39,5%
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	117.050	108.274	145.642	263.649	378.217	37,9%
Ekuitas Dana Diinvestasikan						
Diinvestasikan dalam Investasi Permanen	106.567	109.917	125.628	156.415	158.197	10,8%
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.839.994	2.201.607	2.440.549	2.750.102	3.260.668	15,4%
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	444	1.270	12.600	25.414	92.185	360,6%
Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-180	0	0	0	-5.425	
JUMLAH EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN	1.946.825	2.312.794	2.578.777	2.931.931	3.505.625	15,9%
JUMLAH EKUITAS DANA	2.063.875	2.421.068	2.724.419	3.195.580	3.883.842	17,2%
JUMLAH PASIVA	2.065.939	2.423.141	2.724.993	3.197.702	3.890.980	17,2%

Analisis terhadap neraca keuangan daerah pada tiga tahun terakhir yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas disajikan sebagai berikut:

RASIO LIKUIDITAS

Dalam mencermati neraca keuangan Pemerintah Daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya.

Untuk memperoleh rasio lancar, rumusan yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

$$\text{Rasio lancar} = \text{aktiva lancar} : \text{kewajiban jangka pendek}$$

Kemudian quick rasio diperoleh dengan jalan mengurangkan aset lancar dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

$$\text{Rasio quick} = (\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}) : \text{kewajiban jangka pendek}$$

RASIO SOLVABILITAS

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rumus rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah adalah:

$$\text{Rasio total hutang terhadap total aset} = \text{total hutang} : \text{total aset}$$

$$\text{Rasio hutang terhadap modal} = \text{total hutang} : \text{total ekuitas}$$

Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun 2010-2012 berdasarkan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2010-2012

No	Uraian	2010	2011	2012
A	Rasio Likuiditas			
1.	Rasio lancar (current ratio)	254,73	125,25	221,79
2.	Rasio quick (quick ratio)	12,43	24,73	32,87
B	Rasio Solvabilitas			
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,0002	0,0007	0,0018
2	Rasio hutang terhadap modal	0,0002	0,0007	0,0018

Berdasarkan data neraca Kabupaten Muara Enim sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 dan hasil perhitungan rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi

kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu :

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2012 adalah sebesar 221,79. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar 222 kali lebih.

2. Rasio *Quick*

Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio *Quick* pada Tahun 2012 adalah sebesar 32,87. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas :

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2012 sebesar 0,0018. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2012 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar 0,0018. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Muara Enim, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunandan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahanstrategis secara tepat. Dengan melakukan

analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kurun waktu lima tahun mulai dari 2008 sampai dengan tahun 2012 pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

1) Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim tahun-tahun anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambakuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a) Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
- b) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
- c) Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
- e) Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

2. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Muara Enim Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta diupayakan untuk memperoleh Dana Penyesuaian Bidang Infrastruktur yang termasuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara keseluruhan, terus diupayakan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana korban/kerusakan akibat bencana.
- b) Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
- c) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d) Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.

2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran.

- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 1. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman dipertanian dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 2. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundangundangan;
 3. Dana alokasi umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
 4. Dana alokasi khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah;
- f. Belanja Pegawai.
 1. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah mempedoman ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 2. Penganggaran gaji tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Daerah, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 4. Dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah;

5. Belanja pegawai sambil menunggu penetapan pagu anggaran indikatif dana perimbangan, maka pengalokasian anggaran masih menggunakan pagu anggaran belanja pegawai tahun sebelumnya. Setelah dana perimbangan telah ditetapkan pemerintah, maka belanja pegawai dianggarkan dengan memperhitungkan kebijakan pemerintah menaikkan gaji pokok sebesar 20% dan "accres" gaji sebesar 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai terutama akibat adanya penerimaan pegawai baru;
6. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD, atau unit usaha lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban BUMD, atau unit usaha yang bersangkutan;
8. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan program kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran;
9. Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

g. Belanja Barang dan Jasa

1. Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;
2. Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen keuangan daerah dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika software tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus dikapitalisasi menjadi aset daerah;
3. Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
4. Dalam merencanakan kebutuhan barang, pemerintah daerah supaya menggunakan daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan standar penggunaan barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
6. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;
7. Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa;
8. Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat;
9. Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah dilakukan secara selektif agar tidak membebani belanja perjalanan dinas;
10. Standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

h. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria:

1. masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. merupakan objek pemeliharaan;
3. jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi,
4. pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

i. Belanja DPRD

1. Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pada tahun 2008 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
2. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD;
3. Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah,

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/ 1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21;

4. Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.

j. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula ditertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota" sekarang tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota";

4. Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah;

5. Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

k. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.

l. Belanja Subsidi

1. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembagatertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau olehmasyarakat.
2. Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasarpelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

m. Bantuan Sosial

1. Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulangsetiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
2. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

n. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten /kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

o. Belanja Bantuan Keuangan

1. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;
3. Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

p. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggapdarurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahandemi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang sepertipenanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Muara Enim pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Muara Enim sebagaimana tertuang pada **Error! Reference source not found.** sebagai berikut :

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam jutaan)

NO	URAIAN	2010			2011			2012			RATA-RATA
		Anggaran	realisasi	%	Anggaran	realisasi	%	Anggaran	realisasi	%	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
	BELANJA	1.020.768	952.305	93,3	1.353.848	1.196.553	88,4	1.698.257	1.566.203	92,2	91,3
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	475.124	477.930	100,6	597.692	551.376	92,3	704.987	646.751	91,7	94,9
1	Belanja Pegawai	412.870	430.982	104,4	524.517	497.164	94,8	614.108	573.108	93,3	97,5
2	Belanja Bunga	2.083	3	0,2	3.928	0	0,0	3.928	0	0,0	0,1
3	Belanja Subsidi	2.284	72	3,1	3.307	525	15,9	2.497	2.130	85,3	34,8
4	Belanja Hibah	9.320	8.035	86,2	13.606	12.677	93,2	32.211	23.242	72,2	83,8
5	Belanja Bantuan Sosial	13.561	8.479	62,5	10.796	7.773	72,0	0	0		
6	Belanja Bagi Hasil	37	0	0,0	0	0		0	0		
7	Belanja Bantuan Keuangan	32.438	29.740	91,7	38.538	32.120	83,3	47.242	47.012	99,5	91,5
8	Belanja Tidak Terduga	2.531	618	24,4	3.000	1.117	37,2	5.000	1.258	25,2	28,9
B	BELANJA LANGSUNG	545.644	474.375	86,9	756.156	645.177	85,3	993.271	919.452	92,6	88,3
1	Belanja Pegawai	50.630	43.056	85,0	48.387	32.187	66,5	52.873	47.906	90,6	80,7
2	Belanja Barang dan Jasa	210.345	170.125	80,9	322.550	275.982	85,6	349.985	316.093	90,3	85,6
3	Belanja Modal	284.669	261.194	91,8	385.219	337.009	87,5	590.413	555.453	94,1	91,1

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara EnimTA 2010– 2012

Berdasarkan Tabel 3.6, diperoleh gambaran bahwa, proporsi anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung lebih kecil dibanding anggaran dan realisasi Belanja Langsung setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana APBD Kabupaten Muara Enim untuk mendanai program

pembangunan selama ini relatif lebih besar. Kecuali pada tahun 2010 realisasi Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp477,9 Milyar lebih besar dibanding realisasi Belanja Langsung sejumlah Rp474,4 Milyar.

Dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat, realisasi mengalami kenaikan dari Rp477,9 Milyar (2010) hingga Rp646,8 Milyar (2012), dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai 91,3%.

Sedangkan tingkat realisasi Belanja Langsung dari tahun 2010 sebesar 86,9% sampai dengan tahun 2012 sebesar 92,6%, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 88,3% atau lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung.

Penurunan ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. penetapan APBD belum tepat waktu;
2. realisasi belanja sesuai dengan kas budget masih belum dapat dipenuhi sesuai target;
3. realisasi DAK yang sering kali terkendala juklak/juknis pusat yang berubah-ubah;
4. proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. kualitas pekerjaan fisik masih banyak dikeluhkan.

Untuk perbaikan kedepan terkait dengan realisasi belanja adalah :

1. penyempurnaan mekanisme pembahasan APBD;
2. peningkatan kedisiplinan dalam realisasi anggaran;
3. pemantapan regulasi DAK;
4. pemantapan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa.

2. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Muara Enim tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2011-2012

(dalam juta rupiah)

KODE	URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012
		(Rp)	(Rp)
5.	BELANJA	648.072	780.607
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	497.164	571.968
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	497.164	571.968
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	403.445	444.637
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	81.266	114.990
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.219	4.255

KODE	URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012
		(Rp)	(Rp)
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	8.233	8.086
5.2	BELANJA LANGSUNG	150.909	208.639
5.2.1	Belanja Pegawai	32.187	47.906
5.2.1.00	Belanja Pegawai BLUD	0	4.592
5.2.1.01	Honorarium PNS	15.119	18.701
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.761	17.976
5.2.1.03	Uang Lembur	5.307	6.637
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.632	102.745
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	12.199	11.876
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.529	14.031
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	371	939
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.530	2.582
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.116	8.662
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.612	59.105
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.321	1.375
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis PNS & Studi Banding	2.920	4.144
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	35	31
5.2.3	Belanja Modal	35.089	57.989
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.790	1.574
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	424	4.766
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	19.433	14.262
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	48	15
5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	0	68
5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	0	150
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	240	321
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	751	1.358
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.618	15.221
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.267	7.780
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	3.351	3.400
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	167	350
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	849	835
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	540	1.998
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	505	3.067
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Micropon Conference System	0	1.027
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	106	440
5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Alat / Sarana Keselamatan / Emergency	0	1.357

Berdasarkan Tabel 3.7, diperoleh Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sebesar 53,16% pada tahun 2011 dan turun menjadi 49,52% pada tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (RP)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP)	PROSENTASE
		(a)	(b)	(a) / (b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2011	648.072	1.219.156	53,16%
2	Tahun Anggaran 2012	780.607	1.576.419	49,52%

Dari data Tabel 3.8 realisasi alokasi dana APBD Kabupaten Muara Enim dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 terlihat bahwa keberpihakan pada publik untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan diharapkan lebih tinggi lagi pada tahun-tahun berikutnya.

3. Pengeluaran wajib dan mengikatserta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Muara Enim pada 3 (tiga) tahun terakhir, tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2011-2012

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	2011	2012	KENAIKAN
		(Rp)	(Rp)	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	416.422	459.108	10,3%
	Gaji dan Tunjangan	403.445	444.637	10,2%
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.219	4.255	0,9%
	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	8.233	8.086	-1,8%
	Belanja Bunga	0	0	0,0%
	Belanja Subsidi	525	2.130	305,6%
B	BELANJA LANGSUNG	34.145	68.438	100,4%
	Belanja Pegawai BLUD	0	4.592	0,0%
	Belanja Barang Jasa BLUD	0	20.288	0,0%
	Belanja Jasa Kantor	29.166	38.861	33,2%
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.658	3.323	25,0%
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.321	1.375	-40,8%
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.603	10.217	-54,8%
	Pembentukan Dana Cadangan			
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.871	10.000	-54,3%
	Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga	732,166	216,585446	-70,4%
	JUMLAH (A+B+C)	473.171	537.762	13,7%

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu tahun 2008-2012 dapat dijelaskan secara rinci ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 3.10
Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

NO	Uraian	2010	2011	2012
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.025.015	1.327.592	1.659.572
2	BELANJA DAERAH	952.305	1.196.553	1.566.203
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.822	22.603	10.217
A.	Defisit Riil	47.888	108.436	83.153
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	83.093	130.981	223.522
B.	Total Realisasi Penerimaan	83.093	130.981	223.522
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		130.981	239.417	306.675

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	RATA-RATA PERTUMB
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Jumlah SiLPA	83.093	130.981	223.522	64,14%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	176	732	217	123,15%
7	Kegiatan lanjutan	1.000	0	0	
SiLPA riil (1-6-7)		81.917	130.249	223.305	65,22%

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.

- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurunwaktu 2010-2012, yakni 27,26% per tahun. Dengan menggunakan tahun dasar 2013 yaitu data Perubahan APBD Tahun 2013 dan Proyeksi Tahun 2014 yang merupakan tahun pertama menggunakan maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	APBD TA 2013	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
			2014	2015	2016	2017	2018	
4	PENDAPATAN	1.549.678	1.714.066	2.186.262	2.761.606	3.517.956	4.513.571	24,06%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.100	133.627	169.530	227.918	306.504	412.293	32,53%
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	20.304	34.349	46.372	62.602	84.512	114.091	41,84%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.855	13.306	17.896	24.160	32.616	44.031	28,60%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.319	13.616	18.382	24.815	33.501	45.219	32,06%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.623	72.356	86.880	116.341	155.876	208.951	30,12%

NO	URAIAN	APBD TA 2013	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
			2014	2015	2016	2017	2018	
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.305.802	1.406.864	1.790.972	2.228.913	2.800.005	3.545.825	22,35%
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	580.786	753.696	909.195	1.119.119	1.402.517	1.785.104	25,22%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	678.488	593.564	801.312	1.001.640	1.252.050	1.565.062	19,50%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	46.528	59.604	80.466	108.154	145.438	195.658	33,30%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	142.777	173.575	225.760	304.776	411.447	555.453	31,43%
4.3.1	Pendapatan Hibah	0						
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.726	52.032	61.676	83.263	112.405	151.747	33,58%
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	79.327	106.727	144.082	194.511	262.590	354.496	34,91%
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.724	14.816	20.001	27.002	36.452	49.210	18,69%

3.3.2. Proyeksi SiLPA

Proyeksi SiLPA tahun 2014-2018 menggunakan data SiLPA kurun waktu ditunjukkan melalui Tabel 3.11 dimana diketahui tingkat pertumbuhan SiLPA yang cukup besar yaitu 64,14% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut ini :

Tabel 3.13
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(Silpa)
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2012	PERTUMBUHAN	TAHUN PROYEKSI				
			(%)	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	223.522	64,14%	137.529	131.176	165.696	211.077	270.814

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Muara Enim dalam jangka waktu lima tahun mendatang tahun 2014-2018, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN PROYEKSI				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan Daerah	1.714.066	2.186.262	2.761.606	3.517.956	4.513.571
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	137.529	131.176	165.696	211.077	270.814
	Total Kapasitas Kemampuan Keuda	1.851.595	2.317.438	2.927.303	3.729.034	4.784.386

3.3.3. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2008-2012 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.9 Adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN	2014	2015	2016	2017	2018
		%	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10,3	685.742	766.408	858.113	962.684	1.082.309
1	Belanja Pegawai	10,2	605.547	667.313	735.379	810.387	893.047
2	Belanja Bunga	0,9	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
3	Belanja Subsidi	-1,8	2.800	2.750	2.700	2.652	2.604
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	25,0	75.803	94.754	118.442	148.053	185.066
B	BELANJA LANGSUNG	100,4	106.394	135.170	172.807	222.210	287.207
1	Belanja Pegawai BLUD	10,0	4.592	5.051	5.556	6.112	6.723
2	Belanja Barang Jasa BLUD	10,0	20.288	22.317	24.548	27.003	29.704
3	Belanja Jasa Kantor	33,2	68.989	91.893	122.402	163.039	217.168
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25,0	5.190	6.488	8.109	10.137	12.671
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,0	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
6	Dana Pendamping DAK	35,0	5.960	8.047	10.815	14.544	19.566
	PRIORITAS I : JUMLAH (A+B)	13,70	792.136	901.579	1.030.919	1.184.894	1.369.516

3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat

monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka alokasi kapasitas keuangan daerah berdasarkan prioritas disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

No.	Jenis Dana	Alokasi									
		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1.	Prioritas I	43%	792.136	39%	901.579	35%	1.030.919	32%	1.184.894	29%	1.369.516
	Belanja Tidak Langsung	37%	685.742	33%	766.408	29%	858.113	26%	962.684	23%	1.082.309
	Belanja Langsung	6%	106.394	6%	135.170	6%	172.807	6%	222.210	6%	287.207
2.	Prioritas II	54%	1.003.351	59%	1.351.568	63%	1.832.092	67%	2.474.849	70%	3.360.579
3.	Prioritas III	3%	49.291	2%	49.291	2%	49.291	1%	49.291	1%	49.291
Total		100%	1.844.778	100%	2.302.438	100%	2.912.303	100%	3.709.034	100%	4.779.386

Secara ringkas kerangka pendanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Muaraenim tahun 2014 sampai dengan 2018 disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Kabupaten Muaraenim Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	1.851.595	2.317.438	2.927.303	3.729.034	4.784.386
1	PENDAPATAN	1.714.066	2.186.262	2.761.606	3.517.956	4.513.571
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	137.529	131.176	165.696	211.077	270.814
B	BELANJA	1.844.778	2.302.438	2.912.303	3.709.034	4.779.386
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	735.033	815.699	907.404	1.011.975	1.131.600
	PRIORITAS I	685.742	766.408	858.113	962.684	1.082.309
a	Belanja Pegawai	605.547	667.313	735.379	810.387	893.047
b	Belanja Bunga	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
c	Belanja Subsidi	2.800	2.750	2.700	2.652	2.604
d	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	75.803	94.754	118.442	148.053	185.066
	PRIORITAS III	49.291	49.291	49.291	49.291	49.291
a	Belanja Hibah	35.161	35.161	35.161	35.161	35.161
b	Belanja Bantuan Sosial	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
c	Belanja Tidak Terduga	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	BELANJA LANGSUNG	1.109.745	1.486.739	2.004.899	2.697.059	3.647.786
	PRIORITAS I	106.394	135.170	172.807	222.210	287.207
a	Belanja Pegawai BLUD	4.592	5.051	5.556	6.112	6.723
b	Belanja Barang Jasa BLUD	20.288	22.317	24.548	27.003	29.704
c	Belanja Jasa Kantor	68.989	91.893	122.402	163.039	217.168
d	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.190	6.488	8.109	10.137	12.671
e	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
f	Dana Pendamping DAK	5.960	8.047	10.815	14.544	19.566
	PRIORITAS II	1.003.351	1.351.568	1.832.092	2.474.849	3.360.579
1	Program Pencapaian Visi dan Misi	588.154	856.424	1.154.906	1.553.619	2.101.278
2	Program Penyelenggaraan Urusan Lainnya	415.197	495.144	677.186	921.230	1.259.301
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	124.338	15.000	15.000	20.000	5.000
	Pembentukan Dana Cadangan	0	10.000	10.000	15.000	
	Penyertaan Modal	124.338	5.000	5.000	5.000	5.000
	A-(B+C)	-117.521	0	0	0	0
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	117.521	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah	97.317				
	Penerimaan Piutang	20.204				
	SILPA	0	0	0	0	0

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan suatu daerah merupakan cerminan dari kondisi pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang telah diberikan selama ini. Permasalahan pembangunan di Muara Enim yang dihadapi selama ini dan masih membutuhkan prioritas penanganan untuk lima tahun kedepan, yaitu:

a. Kemiskinan

- 1) Penurunan jumlah penduduk miskin relatif lambat. Data Tahun 2012 menunjukkan persentase penduduk miskin sebesar 13,21% yang mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya yang sebesar 13,71%.
- 2) Berdasarkan analisis Indeks Gini, diketahui bahwa Indeks Gini Kabupaten Muara Enim berada pada kelompok ketimpangan rendah, yaitu $< 0,3$, namun laju ketimpangan meningkat dari 0,28 pada tahun 2008 menjadi 0,30 pada tahun 2010. Analisis data PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan, yang berarti pencapaian ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya saja bila dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan, laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Muara Enim masih lebih kecil. Data pemerataan pendapatan dan persentase jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan sinyal positif, akan tetapi lajunya relatif pelan.

b. Pengangguran

Pengangguran di Muara Enim masih perlu mendapatkan perhatian. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2012 menunjukkan angka sebesar 4,59%. Angka ini lebih rendah dari Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 5,59%. Walaupun tingkat pengangguran terbuka Muara Enim ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang bernilai 5,22%, namun tetap membutuhkan campur tangan pemerintah untuk membuat angka pengangguran semakin menurun tiap tahun.

Dari hasil analisis di bab 2 diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 adalah 356,46 angkatan kerja per 1000 penduduk. Meski jumlah ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya (319,24), namun secara umum nilainya masih amat kecil karena angkatan kerja ini harus

menanggung 643,54 penduduk bukan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja yang tersedia, 20.01%-nya masuk ke dalam kategori penganggur terbuka, membuat beban penduduk bekerja menjadi lebih berat. Data ini serupa dengan indikator rasio ketergantungan yang mencapai 56,68 per 100 penduduk.

c. Infrastruktur Wilayah

- 1) Penyediaan angkutan umum yang melayani wilayah perkotaan yang jaringan jalannya telah tersedia, baru mencapai 53,33% pada tahun 2012 dari target SPM sebesar 75%.
- 2) Jumlah Tenaga Fungsional Penguji Ranmor yang baru mencapai 25% pada tahun 2012 dari target SPM sebesar 75%.
- 3) Lemahnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan bidang pengelolaan sumber daya alam dan kemampuan teknis dalam pengembangan infrastruktur.
- 4) Sistem jaringan transportasi yang belum terpadu.
- 5) Pertumbuhan kebutuhan layanan transportasi yang belum diimbangi dengan penyediaan layanan yang memadai.
- 6) Keselamatan jalan dan wawasan jalan yang belum memadai.
- 7) Hambatan dalam proses pengadaan tanah bagi penyediaan dan pengembangan infrastruktur.
- 8) Kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan pada ruas-ruas jalan nasional seperti pembebanan berlebihan (*overloading*).
- 9) Penggunaan Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk penggunaan yang tidak semestinya.

d. Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Masih rendahnya tingkat profesionalisme pelaku usaha IKM.
- 2) Sarana, prasarana, dan mesin peralatan IKM yang belum memadai.
- 3) Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha IKM tentang teknologi dan inovasi produk.
- 4) Masih rendahnya daya saing produk IKM di pasar lokal dan global.
- 5) Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.

- 6) Kurangnya kesadaran pelaku usaha IKM untuk memberikan data, informasi dan laporan mengenai perkembangan usahanya yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh pemerintah.
- 7) Belum adanya pusat informasi yang khusus menginformasikan secara luas tentang kemasan produk IKM dan produk unggulan daerah.
- 8) Masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dan asongan di bidang ketertiban dan kebersihan.
- 9) Sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai.
- 10) Masih terdapatnya produk pangan yang beredar di pasar yang tidak aman untuk dikonsumsi yang disebabkan oleh bahan pengawet yang non edible, kemasan yang tidak representatif, dan produk kadaluarsa.
- 11) Masih terdapat barang-barang yang tidak ber-SNI atau ber-SNI palsu.
- 12) Terdapat alat Ukur Takar Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang ilegal.
- 13) Masih kurangnya sosialisasi penyelesaian pengaduan konsumen melalui Lembaga Perlindungan Konsumen.

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Cenderung menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Belum optimalnya kinerja pemerintah desa.
- 3) Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relatif masih rendah.
- 4) Belum seluruhnya sekretaris desa dari PNS.

f. Pertanian

- 1) Belum optimalnya penggunaan bibit unggul oleh petani.
- 2) Masih rendahnya produktivitas dan mutu hasil pertanian.
- 3) Masih rendahnya nilai tukar petani.
- 4) Masih lemahnya kapasitas petani baik dalam penguasaan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan, maupun akses pemodalan.
- 5) Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan.

- 6) Masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
- 7) Belum optimalnya sistem pengembangan pola usaha pertanian melalui kemitraan.
- 8) Rendahnya daya beli petani sehingga mempengaruhi pola masyarakat dalam pembangunan usaha tani.
- 9) Tantangan dari luar seperti pasar bebas (globalisasi), serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan dan ketergantungan yang tinggi terhadap kebutuhan benih tanaman perkebunan dari luar kabupaten membuat petani semakin terhimpit.

g. Ketahanan Pangan

Konsumsi pangan penduduk belum memenuhi tingkat kebutuhan konsumsi pangan yang sesuai kaidah kesehatan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

h. Sumber Daya Aparatur

- 1) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan aparatur.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

4.2. Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim 2013-2018 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dari melakukan apa yang disebut sebagai error tipe 3, yaitu merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, kebijakan dan strategi di bab-bab selanjutnya.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Muara Enim dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya.

4.2.1 Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Muara Enim. Hasil *review* akan melengkapi draf isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Muara Enim.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, RPJMN menetapkan Visi Indonesia 2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 3 misi, dimana misi pertama (melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera) dan misi ketiga (memperkuat dimensi keadilan di semua bidang) bersinggungan dengan permasalahan riil di Kabupaten Muara Enim.

Perwujudan visi dan misi RPJMN 2010-2014 dilakukan melalui 5 agenda pembangunan, dimana agenda I (pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat) dan agenda V (pembangunan yang inklusif dan berkeadilan) dapat dipahami sebagai turunan dari misi pertama dan ketiga yang telah dijelaskan sebelumnya. Agenda-agenda ini dilengkapi dengan sasaran, yaitu indikator pencapaian di akhir pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Pada Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat misalnya, ditetapkan target untuk indikator “Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas” pada tahun 2014 adalah 8,25.

Visi dan misi diturunkan ke level operasional dengan cara menetapkan 11 prioritas nasional supaya lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Mayoritas sumber daya akan dialokasikan untuk mengerjakan 11 prioritas nasional yang terdiri dari:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
11. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

Pada setiap program, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kabupaten Muara Enim, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia 2014.

2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk. Evaluasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EPPD meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB).

EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Didalamnya terdapat arahan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan "Sistem Pengukuran Kinerja Mandiri" (*self assessment*) sebagaimana amanat Pasal 32 hingga 40 PP 6/2008. Untuk dapat melakukan hal tersebut Tim Nasional EPPD menyusun indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil kajian dan analisis, tim penilai dapat melakukan evaluasi tahap akhir dengan membandingkan tingkat capaian kinerja masing-masing SKPD dengan:

- a. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja SKPD;
- b. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam RKPD;
- c. realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; dan
- d. seluruh realisasi kinerja SKPD

Dalam kaitannya dengan isu strategis Kabupaten Muara Enim, aspek-aspek pembangunan yang terdapat dalam Indikator Kinerja Kunci dapat dipandang sebagai aspek strategis yang harus diprioritaskan penanganannya. Tim perumus dapat melakukan identifikasi

permasalahan pada aspek di Indikator Kinerja Kunci supaya dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dengan aspek tersebut.

3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sampai dengan pertengahan Tahun 2013, telah diterbitkan 15 (lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga, yaitu SPM:

- 1) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- 2) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 3) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
- 4) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 5) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 6) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 7) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota.
- 8) Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 9) Bidang Pekerjaan Umum.

- 10) Bidang Ketenagakerjaan.
- 11) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota.
- 12) Bidang Komunikasi dan Informasi.
- 13) Bidang Kesenian.
- 14) Bidang Penanaman Modal.
- 15) Bidang Perhubungan Daerah.

4. *Millenium Development Goals (MDG's)*

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Muara Enim adalah komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, maka merupakan keharusan bagi seluruh daerah di Indonesia-termasuk Muara Enim-untuk menggunakan target yang dicanangkan dalam MDGs sebagai referensi dalam penetapan target pembangunan daerah masing-masing.

Konsep MDGs berawal dari adanya pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, ditetapkan delapan tujuan beserta target-targetnya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Adapun kedelapan tujuan pembangunan milenium terdiri dari:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

5. *Post 2015 Development Agenda*

Seiring dengan semakin dekatnya tahun berakhirnya MDGs, yaitu 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, *High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda* mengeluarkan "*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development,*" sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (*New Global Partnership*) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang.

Dalam laporan tersebut, *High Level Panel* yang salah satu ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 pergeseran transformasi utama, yaitu:

a. Tidak meninggalkan siapapun di belakang

Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya-yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.

b. Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti

Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.

c. Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif

Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang

sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

- d. Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua

Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental-yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.

- e. Membina kemitraan global baru

Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacar dan penduduk lokal/*indigenous*. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

Agenda pembangunan pasca 2015 dapat diarusutamakan dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 dengan mula-mula memasukkan rumusan tersebut ke dalam isu strategis kabupaten. Pemanfaatan agenda pembangunan dunia sebagai bahan pertimbangan penyusunan RPJMD menunjukkan keterbukaan Kabupaten Muara Enim terhadap tantangan global yang dihadapi umat manusia, sekaligus kesiapan untuk mencari solusi bagi tantangan tersebut.

4.2.2 Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Rencana pembangunan Kabupaten Muara Enim lima tahun kedepan disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2013 ini, Provinsi Sumatera Selatan juga melaksanakan pemilihan kepala daerah yang diikuti dengan penyusunan RPJMD Provinsi. Dengan periode penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim yang bersamaan dan belum ditetapkannya RPJMD Provinsi sampai dokumen RPJMD Muara Enim ditetapkan, maka untuk menjaga sinergi pembangunan provinsi dan kabupaten,

perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan rancangan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018.

Arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang diinginkan untuk beberapa tahun kedepan, yaitu:

- a. Daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang bermartabat dan berkeadilan.
- b. Daerah surplus pangan yang berkelanjutan dan komoditas perdagangan yang berdayasaing tinggi.
- c. Daerah lumbung energi nasional.
- d. Daerah industri maju berbasis sumberdaya lokal dengan optimasi peningkatan nilai tambah dan modal.
- e. Daerah yang mempunyai jati diri sejati yang tidak luntur dengan majunya ekonomi dan teknologi serta pengaruh budaya baru.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka disusun *Road Map* Sumsel 2013-2018, sebagai berikut:

VISI:

Sumsel Sejahtera, Lebih Maju & Berdaya Saing Internasional

Makna dari visi tersebut, yaitu:

Sejahtera mengarah kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya lebih dari sekedar kebutuhan dasar.

Lebih maju adalah keadaan dimana Sumsel semakin mengalami kemajuan diberbagai dimensi pembangunan.

Bersaing di dunia internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumsel yang berperanserta secara aktif dalam pergaulan internasional dan menghadirkan Sumsel yang menarik menjadi tujuan investasi

MISI:

1. Tingkatkan Produktivitas
2. Mantapkan Stabilitas
3. Tingkatkan Equitabilitas
4. Wujudkan Sustainabilitas

Dalam mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2013-2018, maka sasaran pembangunan Muara Enim sebagai berikut:

- A. Sasaran Makro
- Pertumbuhan Ekonomi : 6 – 7 % per thn
 - Kemiskinan : 6 – 8 %
 - Tingkat Pengangguran : 2 – 3 %
 - Inflasi : 3 – 4 %
- B. Sasaran Bidang Pendidikan
- Meningkatnya lama sekolah
 - Meningkatnya tenaga trampil
- C. Sasaran Bidang Kesehatan
- Meningkatnya angka harapan hidup
 - Menurunnya angka kematian ibu
 - Menurunnya angka kematian bayi
- D. Sasaran Bidang Pangan
- Meningkatnya ketahanan pangan
 - Meningkatnya nilai tukar petani
 - Harga pangan terjangkau
- E. Sasaran Bidang Energi
- Ketahanan energi, efisiensi konsumsi energi
 - Pendayagunaan energi terbarukan
- F. Sasaran Bidang Infrastruktur
- Jalan Provinsi Mantap 2014
 - Kawasan Tanjung Api-Api
- G. Sasaran Bidang Lingkungan Hidup
- Perbaikan mutu lingkungan hidup
 - Penurunan emisi karbon

Dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas, maka Provinsi Sumatera Selatan menempuh strategi sebagai berikut:

1. Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Daerah minimal 6,5% per tahun.

2. Struktur Ekonomi Primer yang didukung oleh Sektor Manufaktur dan Jasa (HILIRISASI).
3. Memantapkan Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Memantapkan Surplus Neraca Perdagangan Daerah.
5. Menurunkan Angka Pengangguran.
6. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan.
7. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berbasis Kompetensi.
8. Pelestarian Lingkungan.

4.2.3 Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca (RAD GRK)

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi Bisnis Seperti Biasa (BAU baseline) dan sebesar 41% apabila ada dukungan internasional. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) disusun sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut dan memberikan kerangka kebijakan dan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam pelaksanaannya untuk kurun waktu tahun 2010-2020.

RAD-GRK adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan langsung maupun tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dalam kurun waktu tertentu. Adapun kegiatan inti untuk menurunkan emisi GRK meliputi 5 (lima) bidang, yaitu: pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, serta pengelolaan limbah.

Sumber emisi utama Provinsi Sumatera Selatan berasal dari sektor berbasis lahan dan sektor energi. Di tahun 2011, Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan emisi sebesar 97,8 juta ton CO₂eq. Sektor berbasis lahan berkontribusi sebesar 74 juta ton CO₂eq atau sekitar 76% dari total emisi. Kelompok sektor energi (energi, transportasi dan industri) menghasilkan emisi sebesar 22,7 juta ton CO₂eq (23%) dan sektor limbah sebesar 869.904 ton CO₂eq (1%).

Proyeksi BAU (*Bussines as Usual*) lahan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2020. Sektor berbasis lahan diprediksi akan menghasilkan emisi sebesar 203 juta ton CO₂eq dari total 241 juta ton CO₂eq. Ini berarti bahwa sektor berbasis lahan menghasilkan 80% emisi dari total prediksi emisi untuk tahun 2020. Kelompok sektor energi berkontribusi sebesar 15% (36,4 juta ton CO₂eq) dan sektor limbah sebesar 1% (1,4 juta ton CO₂eq).

Rencana aksi mitigasi di sektor energi di provinsi Sumatera Selatan mencakup penggunaan peralatan hemat energi di rumah tangga dan efisiensi produksi pada pembangkit. Di sektor

transportasi, Provinsi Sumatera Selatan berusaha melakukan pengurangan angkutan barang dan mobil penumpang melalui pembangunan sistem kereta api, jalan tol dan angkutan sungai (transportasi multi-moda).

Provinsi Sumatera Selatan merupakan contoh acuan dalam perhitungan dan perencanaan untuk bidang pengolahan limbah dalam penyusunan RAD – GRK. Untuk aksi mitigasi, Program Minimasi Sampah dengan prinsip 3R, Program Peningkatan Pengelolaan Gas Sampah dan pembangunan/revitalisasi TPA diharapkan dapat mengurangi emisi GRK secara signifikan.

4.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Sumatera Selatan, maka perencanaan pembangunan Muara Enim meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten. Telaahan RPJMD daerah sekitar Muara Enim yang bersinggungan periodenya dengan RPJMD Muara Enim disajikan pada Tabel 4.1.

4.2.5 Kebijakan Pembangunan Daerah

Penetapan isu-isu strategis pembangunan lima tahun yang menjadi dasar perencanaan pembangunan Muara Enim periode lima tahun kedepan selain berdasarkan hasil telaahan terhadap isu/kebijakan internasional, nasional, regional (provinsi dan kabupaten sekitar) juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah Muara Enim, sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim (RPJP Kabupaten Muara Enim) merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan (2005-2025). Dokumen tersebut memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan RPJP Kabupaten Muara Enim didasarkan pada kondisi obyektif, potensi riil, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah dengan merangkum seluruh aspirasi masyarakat di Kabupaten Muara Enim serta mempertimbangkan segala konsekuensi di masa mendatang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Visi RPJPD Kabupaten Muara Enim adalah Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri dan Sejahtera. Visi ini dijabarkan berturut-turut ke dalam misi, sasaran dan arah pembangunan. Kebijakan yang berkenaan langsung dengan permasalahan nyata di Kabupaten Muara Enim terdapat pada arah pembangunan mandiri dan arah pembangunan sejahtera. Pada arah

pembangunan sejahtera contohnya, terdapat arah pembangunan “Mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal (pertanian dan pertambangan) secara berkelanjutan” dan “Menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan memadai”. Sedangkan pada arah pembangunan sejahtera terdapat arah pembangunan “Meningkatkan kualitas kesehatan (peningkatan sarana dan prasarana kesehatan)” dan “Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat”. Arah pembangunan RPJPD ini menjadi acuan dalam perumusan isu strategis pembangunan lima tahunan Kabupaten Muara Enim.

Tabel 4.1

Identifikasi Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT	KETERANGAN
1	Kabupaten Musi Banyuasin	2012-2017 (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RPJMD Kab. Musi Banyuasin 2012-2017)	<p>Isu Strategis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan menjaga integrasi nasional, keseimbangan, pembangunan antar wilayah terutama keseimbangan pembangunan antar wilayah maupun antar kota dan desa • Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun ekspor 	
2	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	2010-2015 (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang RPJMD Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010-2015)	<p>Isu Strategis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pasar lokal, regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi dan perdagangan terutama komoditi utama yang dihasilkan OKU Selatan seperti kopi, duku, durian, Alpokat, sayur-sayuran, dan lainnya. • Pengembangan kerjasama regional akan memperluas investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. • Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal, Regional dan Nasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan pariwisata baik wisata alam, wisata air, wisata kuliner maupun wisata budaya. 	Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir belum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebab ditetapkan sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
3	Kabupaten Ogan Ilir	2011-2015	<p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas perencanaan, penataan dan pemanfaatan ruang • Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA dan kualitas Lingkungan Hidup <p>Arah kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat. 	Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir belum berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan. • Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat untuk mewujudkan berdirinya pusat teknologi dan industri (Techno-Industrial Park). • Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang 	
4	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2010-2015 (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab. OKU Tahun 2010-2015)	<p>Isu Strategis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan <p>Arah kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pertumbuhan dan penyebaran penduduk serta perwujudan keluarga sejahtera. 	Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebab ditetapkan sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Tahapan pembangunan Muara Enim berdasarkan RPJPD pada periode II (2011-2015) dan III (2016-2020), difokuskan pada: **pertumbuhan ekonomi lokal melalui kerjasama antar lembaga, antar wilayah, peningkatan kualitas SDM dan iptek, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas lembaga pemerintahan, sumber penerimaan daerah, pendapatan masyarakat.** Hal ini mengamanatkan bahwa pembangunan pada periode tahun 2014 sampai dengan 2018, harus diarahkan pada kebijakan-kebijakan terkait hal-hal sebagaimana telah disebutkan diatas.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kebijakan spasial yang mengarahkan struktur dan pola ruang Kabupaten Muara Enim hingga tahun 2032. RTRW menafsirkan arahan pembangunan yang ditetapkan oleh RPJPD dan RPJMD ke dalam ruang supaya kondisi yang dicita-citakan dalam kebijakan tersebut dapat terwujud. Tujuan penataan ruang Kabupaten Muara Enim adalah *“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Muara Enim Melalui Pengembangan Sektor Agro dan Energi Berteknologi tinggi dengan Bersendikan pada Solidaritas Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Hidup”*.

Rencana struktur ruang menetapkan Muara Enim sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW ini didukung oleh Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pusat-pusat permukiman yang direncanakan berperan sebagai PKL adalah: Ibukota Kecamatan Lawang Kidul sebagai pusat pertumbuhan satelit Muara Enim dan merupakan daerah belakang dari Muara Enim.

Pada rencana kawasan strategis, PKW Kota Muara Enim ditetapkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, tepatnya berupa kawasan perdagangan dan jasa dengan rencana pengembangan kawasan sebesar kurang lebih 100 hektar. Kecamatan Lawang Kidul meski tidak ditetapkan sebagai kawasan strategis, saat ini merupakan kawasan penghasil batubara di Kabupaten Muara Enim.

4.2.6 Penetapan Isu Strategis Muara Enim Tahun 2014-2018

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Muara Enim dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan atau isu strategis Kabupaten Muara Enim. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kabupaten Muara Enim 2013-2018 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah

daerah dari melakukan apa yang disebut sebagai *error* tipe 3, yaitu merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di bab selanjutnya.

Hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak ditetapkan 10 (sepuluh) isu strategis Kabupaten Muara Enim yang akan difokuskan 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Infrastruktur Transportasi Sebagai Urat Nadi Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur jaringan jalan dapat meningkatkan aksesibilitas sebuah wilayah sehingga kebutuhan akan mobilitas orang dan barang dapat terlayani. Sebagai dampaknya, ekonomi dapat tumbuh lebih cepat karena waktu tunggu barang sampai di tangan konsumen menjadi lebih sebentar. Bagi masyarakat di wilayah yang tertinggal, keberadaan jaringan jalan akan membuka isolasi sehingga mereka dapat mengakses pelayanan di tempat yang semula tidak terjangkau. Bagi produsen, jaringan jalan ke wilayah baru akan memperluas pasar sehingga dapat meningkatkan keuntungan-sebuah hal yang bagus bagi keberlangsungan bisnis. Belum lagi timbulnya kegiatan perekonomian baru di sepanjang jalan baru, penyediaan infrastruktur transportasi niscaya merupakan kebijakan pembangunan yang patut dikedepankan.

Berkaca pada hasil analisis indikator panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, diketahui bahwa dari jumlah panjang total jalan sebesar 1505,93 km, jalan yang berada dalam kondisi baik adalah sepanjang 779,59 km. Artinya panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 51,77%. Sisanya, yaitu 48,23% berada dalam kondisi kurang baik. Kemudian dari data pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ - AMJ) Bupati Muara Enim periode 2008-2013, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2011 pembangunan jalan baru, jembatan dan jembatan gantung berturut-turut adalah sepanjang 227,54 km, 345 m dan 275 m. Performa yang belum maksimal ini hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintahan edisi 2013-2018.

RPJMN memiliki pandangan yang sama terkait keberadaan infrastruktur, yaitu sebagai daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial. RPJMN menggarisbawahi konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu sebagai prasyarat pembangunan infrastruktur. RPJPD menetapkan arah pembangunan “Menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan memadai” untuk mencapai visi Sejahtera. Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan Standar Pelayanan Minimal terkait jaringan jalan (aksesibilitas, mobilitas dan keselamatan) dan ruas jalan (kondisi jalan dan kecepatan) yang wajib dipenuhi oleh kabupaten/kota. RTRW merencanakan pengembangan 2 jalan arteri primer, yaitu koridor Lahat-Muara Enim-Prabumulih-Palembang dan Baturaja-Sugihwaras-Muara Enim.

Cakupan pelayanan infrastruktur transportasi dapat dipenuhi dengan melakukan 3 program, yaitu pembangunan jalan baru, peningkatan jalan dan pemeliharaan/rehabilitasi jalan. Implementasi 3 program ini dilakukan dengan menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim sebagai panduan dalam pembangunan. RTRW sebagai dokumen tata ruang salah satunya memuat arahan mengenai pengembangan jaringan jalan untuk mendukung perwujudan fungsi struktur dan pola ruang yang apabila tercapai diharapkan akan menciptakan Kabupaten Muara Enim yang lebih sejahtera.

2. Penyediaan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Inklusif

Pelayanan dasar yang berkualitas dan inklusif merupakan ciri sebuah daerah yang layak huni, dimana seluruh penduduknya tanpa terkecuali dapat memenuhi kebutuhan primer hidupnya. Atribut pelayanan dasar antara lain adalah air bersih, air minum, listrik, sanitasi dan fasilitas persampahan. Keberadaan pelayanan dasar ini erat hubungannya dengan tingkat produktivitas masyarakat karena pelayanan dasar yang memadai membuat masyarakat nyaman beraktivitas. Dalam kaitannya dengan persaingan antar daerah, daerah dengan pelayanan dasar yang memadai menjadi tempat tujuan para profesional berpendidikan tinggi untuk berkarier. Dengan tingkat intelegensi diatas rata-rata, keberadaan mereka dapat mendorong kemajuan ekonomi jauh lebih cepat.

Menggunakan data pelayanan dasar sebagai basis analisis, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Muara Enim telah memiliki sebagian dari syarat sebuah daerah layak huni. Untuk pelayanan air bersih, 64% telah terlayani oleh air bersih. Begitu pula dengan pelayanan listrik yang sudah mencapai 52,2% dari total rumah tangga. Pembangunan 13 jaringan air minum, optimalisasi 3 jaringan air minum sepanjang 23.981 m dan pembangunan resevoir dengan kapasitas 2.300 m³ menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan air minum. Pelayanan fasilitas persampahan dan sanitasi juga terus meningkat, yaitu berupa penyediaan bak sampah sebanyak 200 unit dan kenaikan persentase rumah tangga dengan jamban sendiri sebesar 5,63% pada tahun 2009-2010.

RPJMN melalui prioritas kesehatan menetapkan target penyediaan akses sumber air bersih yang terjangkau bagi 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas bagi 75% penduduk sebelum tahun 2014. Sementara RPJPD mengarahkan 2 kebijakan terkait pelayanan dasar, yaitu Mendorong peran serta masyarakat untuk berperilaku sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat dan Menyediakan lingkungan yang bersih. Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan SPM bidang Pekerjaan Umum yang mensyaratkan daerah untuk menyediakan pelayanan dasar sumber daya air, air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

Prestasi Kabupaten Muara Enim dalam penyediaan pelayanan dasar hendaknya dapat dipertahankan pada periode pemerintahan 5 tahun ke depan. Program-program yang sudah ada dapat diteruskan, ditunjang dengan mekanisme monitoring berkala untuk memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian program. Pemerintah juga dapat masuk lebih detail dengan menyusun rencana aksi pencapaian cakupan pelayanan dasar 100% sebagai bentuk langkah progresif pemerintah menuju Kabupaten Muara Enim yang layak huni.

3. Peningkatan Fasilitas Pendukung bagi Program Wajib Belajar 12 Tahun

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan syarat utama sebuah daerah untuk bersaing dalam era globalisasi saat ini. Tingginya kecakapan warga dalam menguasai berbagai disiplin ilmu berbanding lurus dengan tingginya kesempatan ekonomi yang terbuka. Oleh karena itu penyiapan SDM melalui program wajib belajar 12 tahun hendaknya menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk meraih kondisi yang diinginkan tersebut.

Beberapa indikator di bidang pendidikan menunjukkan kondisi yang masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 7-12 tahun (SD) pada tahun 2010 adalah 98,23, sedangkan untuk usia 16-18 tahun adalah 49,98. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh rasio murid-sekolah dan rasio guru-murid yang masih tergolong rendah, yaitu 205,43 untuk rasio murid-sekolah tahun 2010 dan 15,26 untuk rasio guru-murid SMA tahun 2010.

Inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini sejalan dengan prioritas kedua dalam RPJMN. Dokumen perencanaan tersebut mensyaratkan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dan pendidikan setingkat SMP pada tahun 2014 berturut-turut sebesar 96% dan 76%. Untuk pendidikan setingkat SMA, target Angka Partisipasi Kasar adalah 85%. RPJPD Kabupaten Muara Enim pada bagian Arah Pembangunan untuk Visi Sejahtera juga menetapkan kebijakan yang sama, yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan (peningkatan sarana dan prasarana pendidikan).

Terkait fasilitas pendidikan, SPM Pendidikan Dasar mewajibkan kabupaten/kota untuk menyediakan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. Untuk setiap SMP dan MTs, wajib tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Sementara itu, MDG melalui tujuan keduanya menargetkan bahwa pada tahun 2015

anak di seluruh dunia, baik laki-laki maupun perempuan, mampu menyelesaikan pendidikan dasar.

Demand atau minat yang tinggi untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah adalah nilai positif yang harus dikelola oleh pemerintah setempat. Caranya adalah dengan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, baik yang berupa *hard infrastructure* (gedung sekolah, peralatan laboratorium) maupun *soft infrastructure* (tenaga pengajar, kurikulum). Perlu dicermati juga kemampuan membayar (*affordability to pay*) orangtua murid akan layanan pendidikan. Karena tidak semua orang mampu membayar biaya pendidikan yang meningkat akibat konsekuensi logis peningkatan kualitas pelayanan, pemerintah perlu memikirkan skema-skema pembiayaan yang dapat membuat biaya pendidikan terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat.

4. Perwujudan Pelayanan Prima Bidang Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan pilar penting bagi penciptaan masyarakat yang produktif. Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani akan mampu melakukan berbagai macam kegiatan sosial dan ekonomi yang membuat sebuah daerah terus bergerak. Pelayanan kesehatan yang prima merupakan jaring pengaman bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Penanganan yang cepat dan tepat akan membantu percepatan proses penyembuhan dan pemulihan sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Menilik data sektor kesehatan Kabupaten Muara Enim saat ini, beberapa program yang sudah diimplementasikan layak mendapat apresiasi meski masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Pada tahun 2010, cakupan puskesmas adalah 100%, artinya seluruh kecamatan telah terlayani oleh puskesmas, namun dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan, perlu adanya penambahan puskesmas di wilayah tersebut. Kekurangan fasilitas juga dapat dilihat pada data rasio rumah sakit dan tenaga medis yaitu sebesar 0,004 rumah sakit per 1000 penduduk dan 1,41 dokter per 10.000 penduduk.

Kebijakan di bidang kesehatan menjadi salah satu kebijakan prioritas dalam RPJMN yang menargetkan 3 (tiga) hal, yaitu pemberian imunisasi dasar kepada 90%, penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan sebesar 118, serta tingkat kematian bayi sebesar 24 per 1000 kelahiran, semuanya pada tahun 2014. Komitmen Kabupaten dalam bidang kesehatan direfleksikan oleh dokumen RPJPD yang menetapkan 2 arah pembangunan terkait kesehatan, yaitu Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan Meningkatkan kualitas kesehatan (peningkatan sarana dan prasarana kesehatan). Kementerian Kesehatan mengeluarkan Standar Pelayanan Minimum bidang

Kesehatan yang antara lain mewajibkan kabupaten/kota untuk memenuhi cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95% dan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% pada tahun 2015. MDG memberikan perhatian besar terhadap aspek kesehatan dengan mendedikasikan 3 dari 8 targetnya untuk aspek ini, yaitu menurunkan angka kematian anak, memperbaiki kesehatan maternal dan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya.

Penyediaan pelayanan prima secara umum dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal, yaitu penambahan fasilitas dan peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan yang ada. Mengenai penambahan fasilitas, diperlukan sebuah perhitungan yang cermat mengenai kebutuhan jumlah fasilitas kesehatan hingga tahun 2018. Jumlah kebutuhan fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan tahun implementasi didorong menjadi kesepakatan bersama sehingga kedepannya pemerintah memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pembangunan fasilitas kesehatan.

5. Mengurangi Ketimpangan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan musuh bersama yang tidak kunjung dapat diselesaikan meski negara-negara di dunia telah melaksanakan berbagai program untuk mengentaskannya. PBB mencatat setidaknya hingga saat ini 1,2 milyar orang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Hal tersebut berdampak pada jumlah penduduk kurang gizi yang mencapai 870 juta jiwa. Meski Kabupaten Muara Enim tidak mengalami kondisi seburuk ini, isu kemiskinan merupakan isu yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan mengingat dari hasil analisis diketahui bahwa ketimpangan masih terjadi di wilayah ini.

Berdasarkan analisis Indeks Gini, diketahui bahwa Indeks Gini Kabupaten Muara Enim berada pada kelompok ketimpangan rendah, yaitu $< 0,3$, namun laju ketimpangan meningkat dari 0,28 pada tahun 2008 menjadi 0,30 pada tahun 2010. Analisis data PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan, yang berarti pencapaian ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya saja bila dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan, laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Muara Enim masih lebih kecil. Data pemerataan pendapatan dan persentase jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan sinyal positif, akan tetapi lajunya relatif pelan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengarahkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas nasional keempat. Diterangkan dalam dokumen tersebut bahwa Pemerintah akan menurunkan tingkat kemiskinan absolut menjadi 8-10% pada 2014 dan memperbaiki distribusi pendapatan dengan perlindungan

sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam RPJPD menetapkan arah pembangunan “Mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan” untuk mencapai visi Sejahtera. MDG menempatkan isu penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan pembangunan pertama, yaitu Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan. *Post 2015 Development Agenda* juga mendudukkan isu kemiskinan sebagai pergeseran transformasi utama yang pertama, yaitu “Tidak meninggalkan siapapun di belakang”.

6. Penyerapan Angkatan Kerja Melalui Penyediaan Lapangan Kerja dan Dorongan bagi Wirausaha

Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Muara Enim sebesar 2,9% per tahun membawa konsekuensi pada meningkatnya angkatan kerja. Pada tahun 2011 jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) adalah 469.785 jiwa (64,23%). Fenomena ini dapat dilihat sebagai peluang di satu sisi dan masalah di sisi lain. Angkatan kerja yang besar adalah modal untuk membangun. Mereka dapat menyediakan berbagai macam barang dan jasa yang membuat hidup masyarakat lebih berkualitas, dan memperoleh imbalan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa lain. Kegiatan ini berlangsung terus-menerus sehingga roda ekonomi terus berputar. Di sisi lain, keberadaan angkatan kerja tanpa pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi membuat mereka tidak mampu bersaing sehingga justru menjadi beban.

Isu angkatan kerja ini menjadi salah satu arah pembangunan RPJPD, tepatnya melalui arah pembangunan “Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat”. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan SPM bidang ketenagakerjaan yang memiliki semangat untuk menyiapkan angkatan kerja agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja, antara lain melalui Pelayanan Pelatihan Kerja, Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Pelayanan Kepesertaan Jamsostek.

7. Dukungan Penuh bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan potret ketangguhan masyarakat dalam bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang serba tidak menentu. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, nyatanya tidak semua anggota masyarakat dapat terserap ke dunia kerja. Namun alih-alih menyerah, kelompok ini justru berupaya merubah nasibnya dengan hidup mandiri sebagai wirausahawan. Sebagian diantaranya bahkan berhasil membuka lapangan kerja baru bagi orang lain. Kehadiran

pemerintah untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diperlukan agar keberadaan mereka dapat terus berlanjut.

Sejauh ini intervensi pemerintah dalam kegiatan UMKM tercermin dalam pengembangan koperasi dan pemberian akses pembiayaan kepada pelaku UMKM. Dari hasil analisis indikator persentase koperasi aktif diketahui bahwa jumlahnya mencapai 63,6% pada tahun 2012, atau meningkat 2,2% dari tahun sebelumnya. Analisis indikator jumlah UKM juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah usaha kecil sebanyak 100 buah antara tahun 2009-2010. Prestasi ini sedikit banyak diraih karena peran pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga dalam mengembangkan kapasitas pelaku UMKM agar memiliki produk dan kemampuan manajemen yang lebih baik.

RPJMN mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Program aksi terkait hal ini adalah program Kredit Usaha Rakyat dan PNPM Mandiri. RPJPD tidak memiliki kebijakan khusus untuk sektor UMKM, tapi mempunyai kebijakan “Mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal (pertanian dan pertambangan) secara berkelanjutan” yang sedikit-banyak memerlukan peran UMKM untuk mewujudkannya.

8. Pengembangan Sektor Pertanian sebagai Penopang Perekonomian dan Ketahanan Pangan

Rencana penggunaan lahan berdasarkan rencana pola ruang untuk kawasan perkebunan diarahkan pada seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim. Luas rencana kawasan perkebunan ini adalah kurang lebih 311.218 ha (34% luas Kabupaten Muara Enim). Jenis komoditas yang dikembangkan pada kawasan tanaman tahunan dan atau perkebunan antara lain: Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Lada, Kapuk, Kakao, Nilam dan Aren.

Pemerintah daerah memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan perkebunan, hal ini ditunjukkan dengan penetapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di dalam RTRW Kabupaten Muara Enim. Dari beberapa kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang memiliki nilai strategis, termasuk di dalamnya adalah kawasan perkebunan, yaitu: kawasan perkebunan sawit yang berada di Kecamatan Muara Enim, kecamatan Rambang Dangku, dengan rencana pengembangan kawasan sebesar kurang lebih 9.825 hektar; dan kawasan perkebunan kopi yang berada di Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Laut dengan rencana pengembangan koridor sepanjang kurang lebih 30.766 m.

Sektor Perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, merupakan emas hijau bagi Kabupaten Muara Enim. Kebutuhan pasar komoditi yang amat besar terhadap tanaman ini membuat harganya meroket dari waktu ke waktu. Wajar apabila kontribusi sektor pertanian-

dimana sektor perkebunan merupakan salah satu anggotanya-mendominasi postur PDRB Kabupaten Muara Enim (27,6% pada tahun 2009). Momentum naiknya pamor kelapa sawit merupakan kesempatan yang harus direbut untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain perkebunan, Kabupaten Muara Enim juga memiliki potensi di bidang perikanan dan peternakan. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan pada wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi hasil peternakan, seperti: Semendo Darat Laut, Tanjung Agung, Lawang Kidul, Muara Enim, Ujan Mas, Gunung Megang, Rambang, Talang Ubi, Lembak, dan Gelumbang. Rencana luas kawasan peternakan ini adalah kurang lebih mencapai 13.300 ha. Komoditas peternakan yang potensial untuk dikembangkan, meliputi: Kambing, Ayam Pedaging dan Sapi.

Potensi peternakan sebagaimana disebutkan diatas juga diikuti potensi perikanan. Kawasan perikanan yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah usaha budidaya air tawar yang memanfaatkan sungai-sungai dan sawah yang ada. Hasil perikanan yang potensial dikembangkan meliputi: Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Lele, Patin, Gurame, Nila, Bawal, dan Udang Galah.

Mengingat sektor ekonomi basis Kabupaten Muara Enim adalah sektor pertanian lahan kering, maka konsep ruang yang akan diterapkan adalah konsep agropolitan. Dengan demikian maka sistem kota-kota yang akan dituju adalah sistem kota-kota yang mendukung terciptanya ruang agropolitan. Kawasan agropolitan di Muara Enim pada dasarnya merupakan Kawasan Strategis Berskala Lokal (KSL), yang berlokasi di KSL Gunung Megang, KSL Penukal, KSL Gelumbang, KSL Lubai, dan KSL Tanjung Agung – Semendo.

9. Pemanfaatan Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan

Kabupaten Muara Enim mempunyai potensi mineral yang amat kaya dalam bentuk minyak dan gas bumi, batu bara, panas bumi, tenaga air dan *coal bed methane* (CBM). Potensi batubara di Kabupaten Muara Enim mencapai 13.636.530.000 ton atau 61,31 persen dari potensi di Sumatera Selatan. Cadangan minyak bumi mencapai 252.397,03 MSTB atau 35 persen dari cadangan minyak Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan cadangan gas bumi sebesar 12.477,07 BSCF atau sebesar 52 persen dari cadangan gas bumi Provinsi Sumatera Selatan.

Potensi panas bumi di Kabupaten Muara Enim antara lain terdapat di daerah Lumut Balai dan daerah Rantau Dedap. Potensi Cadangan Panas Bumi Lumut Balai sebesar 600 Mwe dengan luas WKP Panas Bumi Lumut Balai lebih kurang 225.000 Ha. Potensi cadangan terduga panas bumi Rantau Dedap berdasarkan hasil survey pendahuluan sebesar 225 MWe. Luas WKP Panas Bumi Rantau Dedap (area prospek) lebih kurang 38.000 Ha,

meliputi Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Potensi sumber daya CBM sebesar 34,059 TCF.

Kegiatan penambangan di Muara Enim diarahkan untuk dilakukan di area yang kurang produktif dan bukan pada area terbangun. Kegiatan penambangan juga harus dilakukan dengan persyaratan yang ketat, antara melalui studi AMDAL dan studi kelayakan, dimana kegiatan penambangan harus disertai dengan upaya rehabilitasi lahan yang memadai.

Rencana pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Muara Enim mencapai luasan lahan kurang lebih 5.021 ha (0,5% dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim), namun secara potensi, hampir seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim merupakan wilayah yang memiliki potensi bahan tambang. Terkait dengan pengelolaan teknis pertambangan yang harus sangat hati-hati dan juga terkait dengan Provinsi Sumatera Selatan menjadi lumbung energi nasional dimana batubara Kabupaten Muara Enim merupakan komoditas tambang yang cukup besar porsinya di Provinsi Sumatera Selatan, maka pemanfaatannya sumber daya mineral seyogyanya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Potensi sumber daya mineral yang melimpah ini memerlukan kemampuan pengelolaan yang mumpuni disertai dengan kearifan yang tinggi. Sumber daya yang tersedia hendaknya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik melalui pemanfaatan langsung maupun penerimaan daerah yang digunakan untuk menyediakan pelayanan publik, secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

10. Aparatur yang Profesional, Kompeten dan Berintegritas

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah ujung tombak pelayanan publik. Di tangan merekalah anggaran daerah diolah menjadi program pembangunan yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seringkali mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan sulit yang membutuhkan paduan intelegensia yang tinggi, pengalaman panjang dan kesahajaan untuk mengambil keputusan. Oleh karena tugas yang maha berat tersebut, seyogyanya PNS adalah orang-orang terbaik di eranya dan memiliki jiwa pengabdian kepada negara.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim memahami betul bahwa bahan utama pelayanan publik yang prima terletak pada kualitas SDMnya. Sayangnya kondisi kualitas SDM saat ini belum mencerminkan hal tersebut. Berdasarkan informasi Badan Kepegawaian Daerah diketahui bahwa pelayanan aparatur terhadap publik belum optimal. Faktor yang mempengaruhi ada beberapa, antara lain kurangnya kompetensi aparatur, masih rendahnya disiplin kerja

aparatur, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung pada SKPD, koordinasi antar instansi terkait belum terlaksana secara optimal, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan masih banyaknya pejabat eselon yang belum mengikuti diklat kepemimpinan.

Dalam 5 (lima) tahun mendatang, pemerintah akan memacu perbaikan di sektor ini. Fokus pembenahan dapat dilakukan antara lain dengan rekrutmen aparatur sesuai kebutuhan dan formasi, menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi jabatan, melaksanakan diklat/pengiriman aparatur sesuai dengan kebutuhan, pemutakhiran data kepegawaian, penerapan disiplin aparatur, pemberian *reward dan punishment*, penyediaan sistem pendukung perkantoran/kinerja dan penerapan sistem perencanaan dan pelaporan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim periode 2013-2018 ialah:

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang”

Penjelasan dari pernyataan visi tersebut yaitu:

Masyarakat Kabupaten Muara Enim adalah semua penduduk yang bermukim dan memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Muara Enim, yang diharapkan:

“Sehat”

Sehat baik jasmani maupun rohani yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, baik kebutuhan fisik maupun rohani, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas serta terciptanya lingkungan yang sehat.

“Mandiri”

Bertumpu pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, berdaya saing, bersinergi dengan lembaga regional, internasional dan daerah lainnya serta didukung oleh tersedianya sumberdaya manusia berkualitas, tersedianya dana pembangunan dari sumber sendiri, infrastruktur dan lembaga pemerintahan yang memadai, birokrasi pemerintahan yang handal, serta kepastian hukum, sehingga sejajar dengan daerah lain.

”Agamis”

Masyarakat Kabupaten Muara Enim ditandai oleh keyakinan masyarakat akan agama yang dianutnya dan melaksanakan ibadah dalam kondisi yang aman dan nyaman. Kehidupan beragama yang saling berdampingan secara rukun dan saling menghormati, serta senantiasa melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi moral dan etika keagamaan.

"Sejahtera"

Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sejahtera ditandai oleh terpenuhinya hak-hak dasar penduduk meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan yang layak, perumahan, lingkungan yang bersih, kehidupan beragama, kehidupan politik, keamanan dan kenyamanan serta pengembangan diri ke arah yang lebih baik.

5.2 Misi

Pernyataan misi Bupati dan Wakil Bupati membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Diarahkan kepada percepatan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga sektor utamanya, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Selain itu juga sektor lainnya seperti penguasaan IPTEK, pemukiman dan perumahan, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, kependudukan dan keluarga berencana, agama, kesenian, kebudayaan dan pariwisata, serta bidang anak dan kesetaraan gender, pemuda dan olahraga.

2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi

Dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, pelayanan publik, perilaku dan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, produktif, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Pengembangan Informasi Teknologi daerah, Menciptakan sistem dan kelembagaan pemerintahan yang mendukung terwujudnya transparansi, *rule of law*, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal

Diarahkan kepada upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal untuk kepentingan masyarakat luas. Penyediaan sarana prasarana/infrastruktur pendukung perekonomian yang memadai. Peningkatan peran sektor unggulan dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat dan penerimaan daerah.

Penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat, Memantapkan kerjasama pemerintah - swasta, kerjasama dengan lembaga perekonomian, antar wilayah dan antar negara yang saling menguntungkan.

4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Diarahkan melalui pengembangan program pembangunan berbasis masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengembangan ekonomi kerakyatan, pemantapan otonomi desa, peningkatan akses perkreditan murah dan mudah kepada UMKMK, dan pengembangan lembaga sosial ekonomi di pedesaan.

5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup

Diarahkan pada pelaksanaan konsep pembangunan hijau. Peningkatan ruang terbuka hijau, Pengendalian pencemaran air, lahan, dan udara. Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara konsisten. Pengelolaan persampahan daerah. Mengupayakan terciptanya lahan pertanian lestari.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah dijelaskan diatas, diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah. Sedangkan pernyataan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing tujuan dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Menurunnya angka kemiskinan.
- c. Meningkatnya Ketahanan Pangan.

- d. Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- e. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.

Tujuan 2: Meningkatkan tata kehidupan yang agamis.

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan.
- b. Meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat
- c. Meningkatnya kerukunan intra dan antarumat beragama.

Tujuan 3: Meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja.
- b. Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- c. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur.

Tujuan 4: Optimalisasi pengembangan ekonomi

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat.
- c. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.
- d. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian.

Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan.
- b. Meningkatnya kapasitas pemerintah desa/kelurahan.
- c. Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.
- d. Menurunnya jumlah desa tertinggal.

Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut, yaitu: Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)			
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat	1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,26	71,81	72,36	72,90	73,45	74,00	74			
			b. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase masyarakat miskin	13,21	12,53	11,85	11,16	10,48	9,8	9,8			
			c. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama (untuk konsumsi):										
				- Beras (kg/kapita/thn)	109,08	110,17	111,27	112,39	112,00	112,00	112,00			
				- Daging (kg/kapita/thn)	12,36	12,42	12,48	12,54	12,60	12,66	12,66			
				- Telur (kg/kapita/thn)	7,85	8,04	8,24	8,24	8,24	8,87	8,87			
				- Ikan (kg/kapita/thn)	33,05	33,22	33,38	33,54	33,70	33,85	33,85			
				Jumlah Kelompok Tani Kelas Utama	71	72	74	76	78	79	79			
			d. Terpenuhinya rumah layak huni bagi MBR	Jumlah rumah tidak layak huni	19.886	17.886	15.886	13.886	11.886	9.886	9.886			
			e. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga pengguna air bersih (%)	59,56	63,64	67,73	71,82	75,91	80	80			
Persentase rumah tinggal bersanitasi	58,99	63,19		67,39	71,6	75,8	80	80						

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)	
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
				(%)								
		1.2. Meningkatkan tata kehidupan yang agamis	a. Meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan	Persentase lembaga-lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan	28 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	90 %	
					Persentase Peningkatan penerimaan Zakat dari Masyarakat	15 %	16 %	17 %	18 %	19 %	20 %	20 %
					Jumlah hewan qurban (ekor)	1.429	1.571	1.713	1.855	1.997	2.139	9.275
			b. Meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah anak usia sekolah yang memiliki sertifikasi baca Alquran (orang)	900	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	10.400	
					Produk makanan dan minuman lokal berlabel halal	3	10	20	30	40	50	50
				c. Meningkatnya kerukunan intra dan antarumat beragama	Jumlah konflik bernuansa SARA	0	0	0	0	0	0	0
2	Melaksanakan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan	a. Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
			b. Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	LAKIP	CC	CC	CC	B	B	A	A	
				OPINI BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
			c. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	- Eselon II: 19 orang - Eselon III: 146 orang - Eselon IV: 299 orang	- Eselon II: 34 orang - Eselon III: 161 orang - Eselon IV: 379 orang	- Eselon II: 34 orang - Eselon III: 171 orang - Eselon IV: 499 orang	- Eselon II: 34 orang - Eselon III: 181 orang - Eselon IV: 619 orang	- Eselon II: 34 orang - Eselon III: 187 orang - Eselon IV: 739 orang	- Eselon II: 34 orang - Eselon III: 187 orang - Eselon IV: 801 orang	- Eselon II: 34 orang - Eselon III: 187 orang - Eselon IV: 801 orang
3	Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal	Optimalisasi pengembangan ekonomi	a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB ADHK dengan migas	9,941	10,5342	11,1274	11,7206	12,3138	12,907	12,907
				PDRB ADHK tanpa migas	6,972	7,6602	8,3484	9,0366	9,7248	10,413	10,413
			b. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26
			c. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	72,76	74,21	75,66	77,10	78,55	80,00	80
			d. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	62	67,85	73,75	83,59	90,78	95,7	96
				Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	68,22	71,99	75,43	79,77	82,53	85,65	85,65
				Persentase KK teraliri listrik (%)	52	57,62	63,24	68,86	74,48	80,10	80,10
				Persentase desa yang memiliki akses thd pasar yang memadai (%)	80	84	88	92	96	100	100

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
				Persentase BPR aktif	0	1	1	2	2	3	3
				Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	3.697	3.958	4.218	4.479	4.739	5.000	5.000
				Persentase koperasi aktif (%)	63,6	75	79	84	89	95	95
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat	a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes (%)	25	39	53	67	81	95	95
			b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa	Persentase desa yang mampu menyusun peraturan desa (%)	25	39	53	67	81	95	95
			c. Meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase LPM aktif (%)	75	80	85	88	91	95	95
			d. Menurunnya jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	32	22	12	0	0	0	0
5	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (%)	30	44	58	72	86	100	100
				Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)	27	37,60	48,20	58,80	69,40	80	80

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Muara Enim mencapai tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018 dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi menjelaskan bagaimana sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan akan dicapai.

Sebelum menentukan pilihan-pilihan strategi dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan, maka perlu dilakukan pemetaan strategi. Pemetaan strategi ini memberikan gambaran bagaimana sasaran strategis pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) perspektif secara bersama-sama dan saling terkait mencapai visi dan misi Kabupaten Muara Enim, dengan indikator kinerja yang terukur.

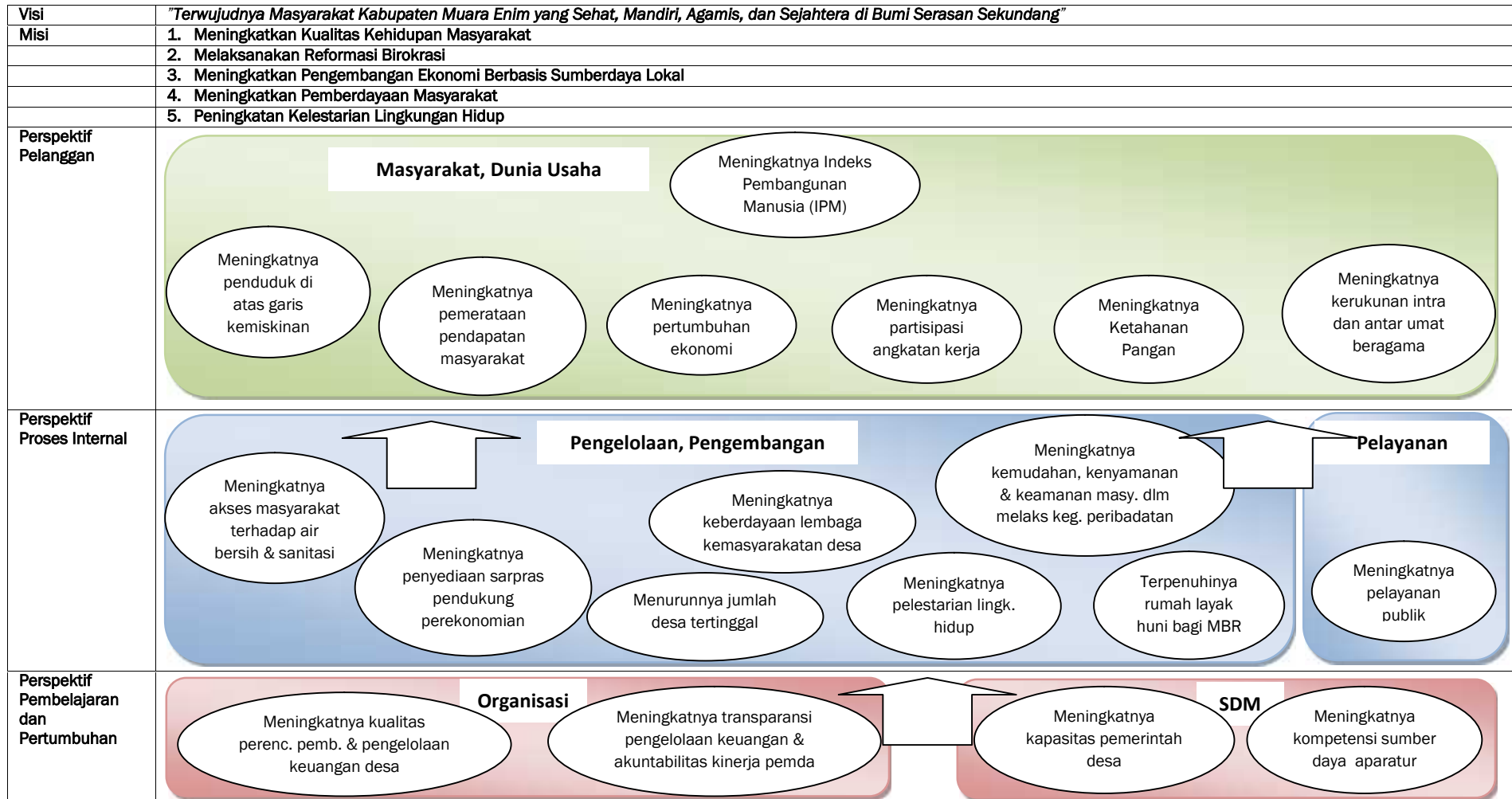
Pada umumnya pemetaan strategi yang menggunakan metode *Balanced Scorecard* terbagi ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu: Perspektif Finansial (*Financial Perspective*), Perspektif Pelanggan (*Consumer Perspective*), Perspektif Internal (*Internal Perspective*) dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth Perspective*), namun untuk organisasi publik seperti pemerintah daerah yang tujuan utamanya bukan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya seperti sektor swasta/perusahaan, maka perspektif finansial dapat ditiadakan.

Perspektif yang digunakan dalam memetakan strategi pencapaian visi dan misi Kabupaten Muara Enim 2013-2018, dijelaskan sebagai berikut:

1. **Perspektif Pelanggan**, yaitu upaya yang ditempuh untuk memberikan pelayanan optimal bagi para pemangku kepentingan (masyarakat dan dunia usaha), yang merupakan pelanggan dari pemerintah daerah.
2. **Perspektif Internal**, yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pemangku kepentingan.
3. **Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan**, yaitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi dan sumberdaya aparatur, yang menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan perspektif-perspektif lainnya.

Gambar 6.1

Peta Strategi Perencanaan Pembangunan Lima Tahun (2013-2018) Kabupaten Muara Enim



Pemetaan strategi sebagaimana telah ditampilkan pada Gambar 6.1 memberikan arah pencapaian visi dan misi pembangunan melalui sasaran-sasaran strategi yang saling terkait dalam mewujudkan hasil akhir peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat secara umum (perspektif pelanggan) yang menjadi sasaran utama dari pelaksanaan pembangunan atau misi pembangunan. Dalam mencapai IPM yang ditetapkan targetnya sebagaimana termuat dalam Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada dokumen RPJMD ini, dikerahkan beberapa sasaran pada perspektif pelanggan, dan secara bertingkat sasaran strategis pada perspektif pelanggan tersebut didukung dengan sasaran-sasaran pada perspektif internal dan perspektif internal didukung oleh sasaran dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Lebih lanjut, dalam mencapai sasaran-sasaran strategi yang telah dipetakan maka dibutuhkan strategi yang tepat. Pernyataan strategi ini memberikan pernyataan konkrit mengenai cara untuk mencapai visi dan misi. Dalam memilih strategi apa yang paling tepat untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Muara Enim untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, maka digunakan pendekatan Analisis SWOT. Sebagaimana diketahui, analisis SWOT merupakan salah satu pendekatan yang paling umum digunakan untuk menentukan pilihan-pilihan strategi berdasarkan pertimbangan 4 (empat) hal, yaitu: kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

Faktor Internal:

a. Kekuatan (*Strength*), terdiri dari:

- Jumlah penduduk besar
- Angkatan kerja besar
- Produksi energi dan sumber daya mineral berlimpah
- Angka ketimpangan rendah
- Dukungan pemerintah terhadap UKM
- Terdapat program peningkatan ketahanan pangan
- Sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar di luar sektor migas
- Angka kriminalitas rendah

b. Kelemahan (*Weakness*), terdiri dari:

- Masalah kemiskinan yang masih cukup tinggi, yaitu posisi 8 se Provinsi Sumsel
- Masalah pengangguran
- IPM yang masih perlu ditingkatkan
- Fasilitas umum dan fasilitas sosial belum optimal
- Infrastruktur jalan belum optimal

- Prasarana dasar belum optimal
- Pengawasan pencemaran lingkungan belum optimal
- Masih lemahnya keberdayaan kelembagaan dan pelaku UMKM
- Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relatif masih rendah

Tabel 6.1.
Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi politik dan keamanan nasional stabil - Kurs rupiah stabil - Kebijakan pembangunan nasional sejalan dengan prioritas daerah - Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan prima yang diterapkan secara nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk impor berpotensi mematikan usaha lokal - Penanaman Modal Asing berpotensi menguasai sektor ekonomi strategis - Persaingan dari daerah lain di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami momen kemajuan yang sama - Dampak perubahan iklim bagi perikehidupan masyarakat
KEKUATAN (STRENGTH)	Alternatif Strategi (S-O):	Alternatif Strategi (S-T):
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk besar - Angkatan kerja besar - Produksi energi dan sumber daya mineral berlimpah - Angka ketimpangan rendah - Dukungan pemerintah terhadap UKM - Terdapat program peningkatan ketahanan pangan - Sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar di luar sektor migas - Angka kriminalitas rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi, Ekstensi dan Diversifikasi Pangan - Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin - Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat - Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sektor ekonomi potensial - Peningkatan daya saing angkatan kerja - Peningkatan pemberdayaan masyarakat
KELEMAHAN (WEAKNESS)	Alternatif Strategi (W-O):	Alternatif Strategi (W-T):
<ul style="list-style-type: none"> - Masalah kemiskinan yang masih cukup tinggi, yaitu posisi 8 se Provinsi Sumsel - Masalah pengangguran - IPM yang masih perlu ditingkatkan - Fasilitas umum dan fasilitas sosial belum optimal - Infrastruktur jalan belum optimal - Prasarana dasar belum optimal - Pengawasan pencemaran lingkungan belum optimal - Masih lemahnya keberdayaan kelembagaan dan pelaku UMKM - Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relatif masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta serta kebudayaan dan olah raga - Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup

Faktor Eksternal:

a. Peluang (*Opportunity*), terdiri dari:

- Kondisi politik dan keamanan nasional stabil
- Kurs rupiah stabil
- Kebijakan pembangunan nasional sejalan dengan prioritas daerah
- Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan prima yang diterapkan secara nasional

b. Ancaman (*Threath*), terdiri dari:

- Produk impor berpotensi mematikan usaha lokal
- Penanaman Modal Asing berpotensi menguasai sektor ekonomi strategis
- Persaingan dari daerah lain di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami momen kemajuan yang sama
- Dampak perubahan iklim bagi perikehidupan masyarakat

Berdasarkan pengolahan menggunakan alat analisis SWOT, diperoleh alternatif strategi yang memberikan arah yang jelas bagi pencapaian sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Muara Enim 2013-2018. Alternatif strategi ini selanjutnya diselaraskan dengan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan pada Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Penentuan masing-masing strategi untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, ditampilkan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Penentuan Strategi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	Strategi 1: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta kebudayaan dan olah raga
2. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase masyarakat miskin	Strategi 2: Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama: - Beras (kg/kapita/tahun) - Daging (kg/kapita/tahun) - Telur (kg/kapita/tahun) - Ikan (kg/kapita/tahun)	Strategi 3: Intensifikasi, Ekstensi dan Diversifikasi Pangan
	Jumlah Kelompok Tani Kelas A (Utama)	
4. Terpenuhinya rumah layak huni bagi MBR	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)	Strategi 4: Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
5. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi	- Persentase rumah tangga pengguna air bersih (%)	Strategi 4: Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
	- Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	
6. Meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam	Persentase lembaga-lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan	Strategi 5: Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat
	Persentase Peningkatan penerimaan	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
melaksanakan kegiatan peribadatan	Zakat dari Masyarakat	
	Jumlah hewan qurban (ekor)	
7. Meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah anak usia sekolah yang memiliki sertifikasi baca Alquran (orang)	Strategi 5: Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat
	Produk makanan dan minuman lokal berlabel halal	
8. Meningkatnya kerukunan intra dan antarumat beragama	Jumlah konflik bernuansa SARA	Strategi 5: Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat
9. Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Strategi 6: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
10. Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- LAKIP	Strategi 6: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
	- OPINI BPK	
11. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Strategi 6: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
12. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	- PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas (Juta Rupiah)	Strategi 7: Pengembangan sektor ekonomi potensial
	- PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas (Juta Rupiah)	
13. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Strategi 7: Pengembangan sektor ekonomi potensial
14. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	Strategi 8: Peningkatan daya saing angkatan kerja
15. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian	- Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Strategi 4: Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
	- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	
	- Persentase KK teraliri listrik (%)	
	- Persentase desa yang memiliki akses thd pasar yang memadai (%)	
	- Jumlah BPR aktif (unit)	
	- Jumlah UKM non BPR/LKM aktif (unit)	
16. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes (%)	Strategi 6: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
17. Meningkatnya kapasitas pemerintah desa	Persentase desa yang mampu menyusun peraturan desa (%)	Strategi 6: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
18. Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase LPM aktif (%)	Strategi 9: Peningkatan pemberdayaan masyarakat
19. Menurunnya jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal (desa)	Strategi 2: Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
20. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	Strategi 10: Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup
	- Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)	

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran pembangunan memiliki keterkaitan maka satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Keterhubungan suatu strategi dalam mencapai satu atau lebih sasaran pembangunan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.2
Keterhubungan Sasaran dengan Strategi



6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah Kebijakan pembangunan Muara Enim ditampilkan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2014-2018

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang"

NO	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat								
1	1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	<p>a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <p>b. Menurunnya angka kemiskinan</p> <p>c. Meningkatnya Ketahanan Pangan</p> <p>d. Terpenuhinya rumah layak huni bagi MBR</p> <p>e. Meningkatnya akses masyarakat</p>	<p>Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta kebudayaan dan olah raga</p> <p>Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin</p> <p>Intensifikasi, Ekstensi dan Diversifikasi Pangan</p> <p>Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana</p> <p>Peningkatan akses dan kualitas layanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan UMKMK - Pelaksanaan PNPB Mandiri - Pembangunan Sarana Sanitasi dan air bersih - Pemantapan sekolah gratis - Pemantapan Berobat gratis - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan - Pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial - Perluasan Kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan UMKMK - Pembangunan Sarana Sanitasi dan air bersih - Pemantapan sekolah gratis - Pemantapan Berobat gratis - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan - Pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial - Perluasan Kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan UMKMK - Pembangunan Sarana Sanitasi dan air bersih - Pemantapan sekolah gratis - Pemantapan Berobat gratis - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan - Pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial - Perluasan Kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan UMKMK - Pembangunan Sarana Sanitasi dan air bersih - Pemantapan sekolah gratis - Pemantapan Berobat gratis - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan - Pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial - Perluasan Kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan UMKMK - Pembangunan Sarana Sanitasi dan air bersih - Pemantapan sekolah gratis - Pemantapan Berobat gratis - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan - Pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial - Perluasan Kesempatan kerja

NO	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		terhadap air bersih dan sanitasi	sarana dan prasarana					
	1.2. Meningkatkan tata kehidupan yang agamis	a. Meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan	Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat					
		b. Meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat					
		c. Meningkatnya kerukunan intra dan antarumat beragama	Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat					
Misi 2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi								
2	Meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan	a. Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kerja	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Pengembangan e-government - Penguatan sistem perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Pengembangan e-government - Penguatan sistem perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah
		b. Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik					

NO	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		daerah		pembangunan daerah	daerah	- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
		c. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah - Penataan kelembagaan daerah - Peningkatan kualitas pembangunan - Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan paramedis - Peningkatan kapasitas kelembagaan pedesaan - Pemberdayaan masyarakat di pedesaan - Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014	- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Penataan kelembagaan daerah - Peningkatan kualitas pembangunan - Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan paramedis - Peningkatan kapasitas kelembagaan pedesaan - Pemberdayaan masyarakat di pedesaan	- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Penataan kelembagaan daerah - Peningkatan kualitas pembangunan - Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan paramedis - Peningkatan kapasitas kelembagaan pedesaan - Pemberdayaan masyarakat di pedesaan	- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Penataan kelembagaan daerah - Peningkatan kualitas pembangunan - Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan paramedis - Peningkatan kapasitas kelembagaan pedesaan - Pemberdayaan masyarakat di pedesaan	- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Penataan kelembagaan daerah - Peningkatan kualitas pembangunan - Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan paramedis - Peningkatan kapasitas kelembagaan pedesaan - Pemberdayaan masyarakat di pedesaan - Pelaksanaan Pemilu kepala daerah kabupaten Muara Enim
Misi 3: Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal								
3	Optimalisasi pengembangan ekonomi	a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pengembangan sektor ekonomi potensial	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
		b. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Pengembangan sektor ekonomi potensial	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.

NO	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		c. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Peningkatan daya saing angkatan kerja	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan pedesaan.	peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan pedesaan.	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan pedesaan.	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan pedesaan.	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan pedesaan.
		d. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian	Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana	- Pembangunan infrastruktur pariwisata, kebudayaan dan keolahragaan - Pembangunan infrastruktur perdagangan, listrik dan air bersih. - Pembangunan infrastruktur irigasi	- Pembangunan infrastruktur pariwisata, kebudayaan dan keolahragaan - Pembangunan infrastruktur perdagangan, listrik dan air bersih. - Pembangunan infrastruktur irigasi	- Pembangunan infrastruktur pariwisata, kebudayaan dan keolahragaan - Pembangunan infrastruktur perdagangan, listrik dan air bersih. - Pembangunan infrastruktur irigasi	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata, kebudayaan dan keolahragaan - Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perdagangan, listrik dan air bersih. - Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata, kebudayaan dan keolahragaan - Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perdagangan, listrik dan air bersih. - Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi
Misi 4: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat								
4	Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat	a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan	- Revitalisasi tanaman kopi - Pengembangan industri hilir	- Revitalisasi tanaman kopi - Pengembangan industri hilir karet,	- Revitalisasi tanaman kopi - Pengembangan industri hilir	- Revitalisasi tanaman kopi - Pengembangan industri hilir	- Revitalisasi tanaman kopi - Pengembangan industri hilir

NO	TUJUAN	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		pengelolaan keuangan desa	Publik	karet, kelapa sawit dan kopi	kelapa sawit dan kopi	karet, kelapa sawit dan kopi	karet, kelapa sawit dan kopi	karet, kelapa sawit dan kopi
		b. Meningkatnya kapasitas pemerintah desa	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	- Pengembangan agribisnis padi, dan hortikultura	- Pengembangan agribisnis padi, dan hortikultura	- Pengembangan agribisnis padi, dan hortikultura	- Pengembangan agribisnis padi, dan hortikultura	- Pengembangan agribisnis padi, dan hortikultura
		c. Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan dan perikanan	- Intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan dan perikanan	- Intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan dan perikanan	- Intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan dan perikanan	- Intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan dan perikanan
		d. Menurunnya jumlah desa tertinggal	Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin	- Pengembangan agropolitan	- Pengembangan agropolitan	- Pengembangan agropolitan	- Pengembangan agropolitan	- Pengembangan agropolitan
Misi 5: Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup								
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup	- Pembangunan ruang terbuka hijau - Pengendalian pencemaran air dan udara - Penanggulangan bencana alam	- Pembangunan ruang terbuka hijau - Pengendalian pencemaran air dan udara - Penanggulangan bencana alam	- Pembangunan ruang terbuka hijau - Pengendalian pencemaran air dan udara - Penanggulangan bencana alam	- Pembangunan ruang terbuka hijau - Pengendalian pencemaran air dan udara - Penanggulangan bencana alam	- Pembangunan ruang terbuka hijau - Pengendalian pencemaran air dan udara - Penanggulangan bencana alam

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang inheren di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah.

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan yang berdaya ungkit dalam menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2014 sampai dengan 2018.

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Muara Enim

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Strategi 1: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta kebudayaan dan olah raga	Wajib Belajar 12 Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	103,33	109,81	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	69,23	79,78	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	67,58	95,54	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK)	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	100	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan kualitas berobat gratis	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	5	20	Kesehatan	- Dinas Kesehatan - RSUD
				Program jaminan kesehatan	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	55	80	Kesehatan	- Dinas Kesehatan - RSUD
			Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	70	85	Kesehatan	- Dinas Kesehatan - RSUD
				Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	60	80	Kesehatan	- Dinas Kesehatan - RSUD
				Program pengadaan,	Rasio puskesmas,	1:10000	1:5000	Kesehatan	Dinas

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
			(RSUD) dan Puskesmas	peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	poliklinik, pustu per satuan penduduk				Kesehatan
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:100000	1:75000	Kesehatan	– Dinas Kesehatan – RSUD
				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata dalam kondisi baik	40	60	Kesehatan	– Dinas Kesehatan – RSUD
			Peningkatan peran wanita dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	56,9	58	Pemberdayaan Perempuan	BKBPP
					Persentase partisipasi perempuan di lembaga Swasta	40	50	Pemberdayaan Perempuan	BKBPP
			Pengembangan olah raga, seni dan budaya daerah.	Program pengembangan nilai budaya	Cakupan kajian budaya	15,5	34	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program pengelolaan kekayaan budaya	Persentase sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3,8	8,5	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	16	36	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program pembinaan	Jumlah prestasi olah	40	75	Pemuda dan	Dinas Pemuda,

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
				dan pemasyarakatan olahraga	raga			Olah Raga	Olahraga dan Pariwisata
2	Menurunnya angka kemiskinan	Strategi 2: Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin	Peningkatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial.	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT, PMKS dan lainnya	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	90	95	Sosial	Dinas Sosial
			Mendorong pendirian Bank Perkreditan Rakyat	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kajian perencanaan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	80	80	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Peningkatan dan Perluasan Pelaksanaan PNPM Mandiri Daerah	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase kajian perencanaan sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	80	80	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Pengembangan Koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	63,6	95	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UKM
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Strategi 3: Intensifikasi, Ekstensi dan Diversifikasi Pangan	Mengembangkan varietas tipe baru dengan produktivitas tinggi untuk komoditas yang memiliki prospek pasar baik	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase lembaga tani yang menerapkan teknologi pertanian	66,3	80,1	Pertanian	– Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura – BP4K
			Menyediakan/	Program Peningkatan	Ketersediaan pangan			Ketahanan	– Kantor

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
			memperbaiki jaringan irigasi dan sarana produksi yang terjangkau oleh petani	Ketahanan Pangan	utama			Pangan	Ketahanan Pangan
					- Beras (kg/kapita/thn)	109,08	112,00		
					- Daging (kg/kapita/thn)	12,36	12,66		
					- Telur (kg/kapita/thn)	7,85	8,87		
					- Ikan (kg/kapita/thn)	33,05	33,85		
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	68,5	85,7	Pekerjaan Umum	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
4	Terpenuhinya rumah layak huni bagi MBR	Strategi 4: Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana	Pembangunan Rumah Murah dan Bedah Rumah	Program pengembangan perumahan	persentase rumah layak huni	84	92	Perumahan	Dinas PU Cipta Karya
5	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi	Strategi 4: Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum	62,41	80	Pekerjaan Umum	Dinas PU Cipta Karya
6	Meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan	Strategi 5: Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Menciptakan kondisi kondusif untuk beribadah	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	50%	77%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa, Politik

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
	peribadatan								
7	Meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	Strategi 5: Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Penerapan kebijakan syarat lulus baca Al Quran untuk anak didik melanjutkan pendidikan	Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama	Jumlah anak usia sekolah yang memiliki sertifikasi baca Alquran	900	10400	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bagian Kesra, Sekretariat Daerah
			Peningkatan pengawasan makanan halal	Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama	Jumlah makanan dan minuman bersertifikat halal	3	50	Perdagangan	Bagian Kesra, Sekretariat Daerah
8	Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama	Strategi 5: Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Meningkatkan komunikasi antar umat beragama	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kemitraan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	50	80	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
9	Meningkatnya pelayanan publik	Strategi 6: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengawasan kinerja organisasi dan aparatur	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan	Inspektorat

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
			Pengembangan dan pemanfaatan Informasi Teknologi Daerah (IT) Daerah	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan pemanfaatan teknologi informasi	35	70	Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setda
9	Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Strategi 6: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang taat asas, tepat waktu dan akuntabel	90	90	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	- Dinas Pendapatan Daerah
			Optimalisasi sinergisitas pemanfaatan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk pembangunan.	Program kerjasama pembangunan	Jumlah kerja sama pembangunan dengan stakeholder (pemerintah/dunia usaha/masyarakat)	80	80	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Peningkatan kualitas pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan	ada	ada	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
			Peningkatan peran kecamatan dalam pembangunan	Program pengembangan kecamatan	PERDA/PERKADA Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3	6	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Kecamatan
					Perentase PKK aktif	80	100		
					Persentase Posyandu aktif	80	96		
					cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	75	90		
10	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Strategi 6: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan kapasitas dan penerapan budaya kerja aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	70	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	- Seluruh SKPD - BKD
				Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir	17,31	45	Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	BKD

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
								Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
11	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Strategi 7: Pengembangan sektor ekonomi potensial	Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar bagi Koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Total Usaha Mikro dan Kecil yang aktif menjalankan kegiatan	3.500	4.535	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UKM
			Pengembangan industri potensial berbasis sumber daya lokal	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	50	100	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Peningkatan distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	16,21	14,83	Pertanian	– Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura – Dinas Perkebunan – BP4K
			Pembangunan sarana prasarana pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	40	60	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
12	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Strategi 7: Pengembangan sektor ekonomi potensial	Peningkatan pembangunan industri hilir perkebunan karet dan kelapa sawit.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	6	8,3	Perindustrian	Dinas perindustrian dan perdagangan
				Program pengembangan	cakupan bina kelompok pengrajin	9	42	Perindustrian	Dinas perindustrian

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
				industri kecil dan menengah					dan perdagangan
			Pengembangan usaha agribisnis dengan prioritas komoditas spesifik lokal yang bernilai ekonomi tinggi	Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Tingkat produktivitas pertanian	80	90	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura - Dinas Perkebunan - Kantor Ketahanan pangan - BP4K
			Intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan dan perikanan.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi Daging	8478	9.833	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas peternakan dan perikanan - BP4K
				Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	4.164,90 ton	5.185 ton	Pertanian	
13	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Strategi 8: Peningkatan daya saing angkatan kerja	Pendayagunaan pusat pelatihan tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Partisipasi angkatan kerja	72,76	80	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian	Strategi 4: Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana	Pengembangan sarana dan prasarana menuju dan di pusat-pusat perekonomian	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	62	95,7	Pekerjaan Umum	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
				Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	62	95,7	Pekerjaan Umum	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
				Program pembinaan dan pengembangan	Cakupan pembinaan dan pengembangan	72	80	Pekerjaan Umum	Dinas Pertambangan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
				bidang ketenagalistrikan	ketenagalistrikan				dan Energi
				Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum	62,41	80	Pekerjaan Umum	Dinas PU Cipta Karya
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7,5	9	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase UMKM yang aktif	60	75	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Penanganan sampah secara komprehensif	Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	Persentase penanganan sampah cakupan pembangunan infrastruktur perkotaan	64	85	Pekerjaan Umum	Dinas PU Cipta Karya
			Pengembangan agropolitan an minapolitan	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase kajian perencanaan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	80	80	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
15	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan	Strategi 6: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengelolaan APBDes secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes tepat waktu	25	95	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
16	Meningkatnya	Strategi 6:	Pengembangan	Program peningkatan	Persentase aparatur	13,5	20	Pemberdayaa	Badan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
	a kapasitas pemerintah desa/kelurahan	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	dan pelatihan bagi sumber daya aparatur desa/kelurahan	kapasitas aparatur pemerintah desa	pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik			n Masyarakat dan Desa	pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
17	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Strategi 9: Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan lembaga perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	327	332	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
			Peningkatan kapasitas wanita di pedesaan	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	PKK aktif	80	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
18	Menurunnya jumlah desa tertinggal	Strategi 2: Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar perdesaan	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Jumlah desa tertinggal	32	0	Pekerjaan Umum	Dinas Cipta karya
			Peningkatan pembangunan jaringan dan instalasi listrik di pedesaan.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase KK teraliri listrik (%)	52	80	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
19	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Strategi 10: Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup	Pengendalian pemanfaatan ruang	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	15	25	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang	50	75	Penataan Ruang	Bappeda
			Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran dan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan	93	100	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Outcome	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
			Perusakan Lingkungan	Hidup	pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti				
			Rehabilitasi lahan dan hutan	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase areal sumber daya alam yang direhabilitasi dan dikonservasi	50	70	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
			Pengendalian penambangan liar/ilegal.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Cakupan bina usaha pertambangan	100	100	Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi

Setiap program pemerintahan daerah tidak dapat dianggarkan dalam APBD jika tidak disusun dan ditetapkan dalam RKPD. Sementara itu, RKPD disusun berpedoman kepada RPJMD sehingga dengan demikian program pemerintahan daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja outcome dan SKPD penanggung jawab yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (berupa visi, misi dan program prioritas) dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, program pembangunan daerah yang merupakan program prioritas Kepala Daerah dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan janji politiknya disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2.

Penterjemahan Program Prioritas Kepala Daerah Ke Dalam Program Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM KAMPANYE	PROGRAM 2014-2018	SKPD
I	Penanggulangan Kemiskinan		
1	Peningkatan dan Perluasan GERBANG SERASAN.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Bappeda
2	Pendirian Bank Perkreditan Rakyat.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Bappeda
3	Peningkatan dan Perluasan Pelaksanaan PNPM Mandiri Daerah.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Bappeda
4	Pembangunan Rumah Murah dan Bedah Rumah.	Program pengembangan perumahan	Dinas PU Cipta Karya
5	Pembangunan Koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
6	Peningkatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial.	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT, PMKS dan lainnya	Dinas Sosial
II	Peningkatan Akses		

NO	PROGRAM KAMPANYE	PROGRAM 2014-2018	SKPD
	Pendidikan dan Kesehatan		
1	Peningkatan kualitas sekolah gratis.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pengembangan Sekolah Universal 12 tahun.	Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK).	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Pengembangan seni dan budaya daerah.	Program pengembangan nilai budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program pengelolaan kekayaan budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program pengelolaan keragaman budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pengembangan olah raga masyarakat.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
6	Mendorong berkembangnya Perguruan Tinggi Daerah.		
7	Peningkatan kualitas berobat gratis.	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan
8	Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	- Dinas Kesehatan - RSUD
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinas Kesehatan
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	- Dinas Kesehatan - RSUD
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	- Dinas Kesehatan - RSUD
9	Peningkatan sanitasi	Program pengawasan kinerja	Dinas PU Cipta

NO	PROGRAM KAMPANYE	PROGRAM 2014-2018	SKPD
	masyarakat.	pengelolaan air minum dan air limbah	Karya
10	Pembangunan TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) sampah.	Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	Dinas PU Cipta Karya
11	Peningkatan peran wanita dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	BKBPP
III	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
1	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Seluruh SKPD
2	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Seluruh SKPD
3	Peningkatan kualitas pembangunan.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
4	Peningkatan pembangunan Informasi Teknologi (IT) Daerah.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Setda
5	Renumerasi.	Kebijakan Kesejahteraan Pegawai dalam bentuk belanja tidak langsung	-
6	Peningkatan peran kecamatan dalam pembangunan.	Program pengembangan dan penyelenggaraan kecamatan	Kecamatan
7	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BPKAD
IV	Percepatan Pembangunan Infrastruktur		
1	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	Program pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
2	Peningkatan pembangunan jaringan dan instalasi listrik di pedesaan.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Dinas Pertambangan dan Energi

NO	PROGRAM KAMPANYE	PROGRAM 2014-2018	SKPD
3	Peningkatan pembangunan infrastruktur air bersih.	Program pengawasan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas PU Cipta Karya
4	Peningkatan infrastruktur pemukiman	Program pengembangan perumahan	Dinas PU Cipta Karya
5	Peningkatan pembangunan sarana prasarana ekonomi pedesaan dan perkotaan	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Dinas PU Cipta Karya
		Program pengembangan infrastruktur perkotaan	Dinas PU Cipta Karya
6	Pembangunan sarana prasarana pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
7	Merintis pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pendopo Integrated Industrial Park.	-- sudah menjadi wilayah Kabupaten Pali--	
V	Peningkatan Pendapatan Daerah		
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Dinas pendapatan daerah
2	Mengupayakan peningkatan penerimaan dana perimbangan.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Dinas Pendapatan Daerah
3	Melaksanakan kerjasama Pemerintah - Swasta dalam pembiayaan pembangunan	Program kerjasama pembangunan	Bappeda
4	Optimalisasi sinergisitas pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan.	Program kerjasama pembangunan	Bappeda
5	Mendorong peningkatan kinerja perusahaan daerah.	Program peningkatan kinerja perusahaan daerah	Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM KAMPANYE	PROGRAM 2014-2018	SKPD
VI	Revitalisasi Pertanian		
1	Peningkatan pembangunan industri hilir perkebunan karet dan kelapa sawit.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Program pengembangan industri kecil dan menengah	Dinas perindustrian dan perdagangan
2	Peningkatan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.	Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas pertanian Dinas Perkebunan Dinas Ketahanan pangan
3	Intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan dan perikanan.	Program peningkatan produksi hasil peternakan Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas peternakan dan perikanan
4	Pengembangan agropolitan.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
5	Pengembangan minapolitan.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
VII	Pembangunan Pedesaan		
1	Peningkatan alokasi dana desa (ADD).	Dalam bentuk BTL	-
2	Pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan pedesaan.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
4	Peningkatan infrastruktur pedesaan.	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dinas Cipta karya
5	Pemberdayaan Masyarakat di pedesaan.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
6	Peningkatan kapasitas wanita di pedesaan	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
VIII	Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup		
1	Pembangunan Hutan Kota Kalamuddin.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Badan Lingkungan Hidup
2	Pengembangan Ruang	Program Pengelolaan ruang	Badan Lingkungan

NO	PROGRAM KAMPANYE	PROGRAM 2014-2018	SKPD
	Terbuka Hijau (RTH).	terbuka hijau (RTH)	Hidup
3	Pelaksanaan RTRW secara konsisten dan meluas.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Bappeda Dinas Cipta Karya
4	Pengendalian pencemaran air dan udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
5	Rehabilitasi lahan dan hutan	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	Badan Lingkungan Hidup
		Program rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Kehutanan
6	Pengendalian penambangan liar/ilegal.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Dinas Pertambangan dan Energi

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (Lampiran). Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu program menjadi pagu maksimal bagi SKPD dalam mendistribusikannya ke dalam kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

Tabel VIII.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2013-2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab	
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	URUSAN WAJIB															
1 01	PENDIDIKAN				174.750		232.942		314.127		422.574		571.534			
1 01	1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			174.750		232.942	0	314.127	0	422.574	0	571.534	0	0	
1 1	1.01.01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	2.865	100	3.819	100	5.150	100	6.928	100	9.370	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1	1.01.01	02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	100	100	6.280	100	8.371	100	11.289	100	15.186	100	20.540	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama	0,17	0,17		0,16	0	0,15	0	0,14	0	0,13	0	0,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah atas	0,23	0,23		0,22	0	0,21	0	0,20	0	0,19	0	0,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1	1.01.01	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	1.007	60	1.342	65	1.810	68	2.435	70	3.294	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 1	1.01.01	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	320	100	427	100	575	100	774	100	1.047	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01	1.01.01	15 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100,00	100,00	2.013	100,00	2.683	100,00	3.618	100,00	4.867	100,00	6.583	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01	1.01.01	16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD	118,61	118,61	96.550	119,95	128.701	121,30	173.557	122,66	233.474	124,04	315.775	124,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APK SMP/MTs	91,48	91,48		93,84	0	96,26	0	98,75	0	101,30	0	101,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SD/SDLB/MI	103,33	103,33		104,91	0	106,52	0	108,15	0	109,81	0	109,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SMP	69,23	69,23		71,73	0	74,31	0	77,00	0	79,78	0	79,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka partisipasi sekolah SD	114,04	114,04		114,93	0	115,83	0	116,74	0	117,66	0	117,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka partisipasi sekolah SMP	69,78	69,78		70,57	0	71,36	0	72,17	0	72,98	0	72,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,04	0,04		0,03	0	0,03	0	0,02	0	0,02	0	0,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,36	0,36		0,33	0	0,31	0	0,29	0	0,27	0	0,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01	1.01.01	17 Program Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA	87,03	87,03	50.253	92,81	66.987	98,98	90.333	105,56	121.519	112,57	164.356	112,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SMA	67,58	67,58		73,69	0	80,36	0	87,62	0	95,54	0	95,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Sekolah SMA	48,34	48,34		49,33	0	50,33	0	51,35	0	52,40	0	52,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,60	0,60		0,50	0	0,42	0	0,35	0	0,30	0	0,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100,00	100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01	1.01.01	18 Program Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,38	98,38	4.024	99,23	5.364	100,09	7.233	100,96	9.730	101,83	13.160	101,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01	1.01.01	19 Program Pendidikan Luar Biasa	Peningkatan akseibilitas dan kualitas pendidikan	7,40	7,40	149	9,00	199	10,90	268	13,30	360	16,30	487	16,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01	1.01.01	20 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	5.729	5.729	1.503	6.255	2.004	6.830	2.702	7.457	3.635	8.142	4.916	8.142	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01	1.01.01	22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan Tata Kelola akuntabilitas dan Citra Publik	3.260	3.260	8.896	3.586	11.858	3.912	15.991	4.238	21.512	4.564	29.095	4.564	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 17	1.01.01	15 Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan kajian budaya	15,50	15,50	311	18,80	415	22,90	559	27,80	752	34,10	1.018	34,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 17	1.01.01	16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	77	5	103	6	139	7	187	9	253	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 17	1.01.01	17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	16	17	502	20	669	25	902	30	1.214	36	1.641	36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
															0	
1 02		KESEHATAN			111.750		136.480		184.046		247.585		334.860			
1 02	1.02.01	Dinas Kesehatan			49.002		77.145		104.031		139.947		189.278			
1 02	1.02.01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	3.241	100	5.102	100	6.880	100	9.255	100	12.517	100	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	241	100	380	100	512	100	689	100	932	100	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	418	60	658	65	888	68	1.194	70	1.615	70	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	359	100	565	100	761	100	1.024	100	1.385	100	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 02	1.02.01	15	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	cakupan ketersediaan obat	80	80	5.189	80	8.169	80	11.016	80	14.820	80	20.044	80	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,42	68,62	3.976	68,81	6.259	69,20	8.441	69,20	11.355	69,20	15.357	69,20	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	17	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,200	0,190	177	0,190	278	0,180	375	0,180	505	0,180	683	0,180	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	-	-	42	-	65	-	88	-	119	-	161	-	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	19	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	18,93	16,56	2.763	14,49	4.350	11,09	5.866	11,09	7.891	11,09	10.673	11,09	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	47%	40%	592	55%	932	65%	1.256	70%	1.690	80%	2.286	80%	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	16	17	384	18	604	19	815	19	1.096	19	1.482	19	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	22	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	1.805	100	2.841	100	3.832	100	5.155	100	6.972	100	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	60	60	420	65	661	70	892	75	1.200	80	1.623	80	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	55%	60%	185	70%	291	80%	393	80%	528	80%	714	80%	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	25	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:10000	1:9000	6.026	1:8000	9.488	1:7000	12.794	1:6000	17.211	1:5000	23.278	1:5000	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:100000	1:95000	5.837	1:90000	9.190	1:85000	12.393	1:80000	16.671	1:75000	22.548	1:75000	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	3	80	568	80	895	80	1.207	80	1.623	80	2.195	80	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rasio Posyandu per satuan balita	5,47	4,9	213	4,38	335	3,51	451	3,51	607	3,51	821	3,51	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Puskesmas Pembantu	34	34	130	35	204	35	276	35	371	35	502	35	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	31	Program Pengawasan dan pengendalian makanan	Cakupan kunjungan bayi	14	12	45	9	70	6	95	6	128	6	173	6	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	34	Program PSM dan kesehatan intitusi	Cakupan PSM	80%	80%	339	80%	534	80%	720	80%	968	80%	1.309	80%	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.01	36	Program Jaminan Kesehatan	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	55%	60%	16.053	70%	25.273	80%	34.081	80%	45.848	80%	62.009	80%	Dinas Kesehatan
1 02	1.02.02		RSUD DR.H.M.Rabain			62.748		59.335		80.015		107.638		145.581			
1 02	1.02.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	6.878	100	6.504	100	8.771	100	11.799	100	15.958	100	RSUD DR.H.M.Rabain
1 02	1.02.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	936	60	885	65	1.194	68	1.606	70	2.172	70	RSUD DR.H.M.Rabain
1 02	1.02.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	77	100	73	100	98	100	132	100	179	100	RSUD DR.H.M.Rabain
1 02	1.02.02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kejadian infeksi nosokomial	5%	5%	32	5%	30	5%	41	5%	55	5%	74	5%	RSUD DR.H.M.Rabain
1 02	1.02.02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pelayanan (Penemuan dan penanganan) HIV AIDS, TB Paru, dan Malaria	90%	90%	44	90%	42	90%	56	90%	75	90%	102	90%	RSUD DR.H.M.Rabain
1 02	1.02.02	23	Program standarisasi pelayanan kesehatan Rumah Sakit	persentase penerapan SOP	90%	90%	11	90%	10	90%	14	90%	19	90%	26	90%	RSUD DR.H.M.Rabain
1 02	1.02.02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru	persentase ketersediaan sarana dan prasarana (logistik) rumah sakit	80%	80%	23.366	80%	22.095	80%	29.796	80%	40.082	80%	54.211	80%	RSUD DR.H.M.Rabain
1 02	1.02.02	27	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru	Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	40%	50%	879	60%	831	60%	1.121	60%	1.508	60%	2.039	60%	RSUD DR.H.M.Rabain
1 02	1.02.02	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	5	10	349	15	330	20	445	20	599	20	810	20	RSUD DR.H.M.Rabain
1 02	1.02.02	35	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	80%	80%	30.176	80%	28.535	80%	38.480	80%	51.764	80%	70.011	80%	RSUD DR.H.M.Rabain
1 03			PEKERJAAN UMUM			419.425		513.257		692.137		931.087		1.259.300			
1 03	1.03.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan			290.840		327.242		441.293		593.643		802.905			
1 03	1.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	1.362	100	1.532	100	2.066	100	2.780	100	3.759	100	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan
1 03	1.03.01	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	1.612	100	1.814	100	2.446	100	3.291	100	4.451	100	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan
1 03	1.03.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	200	60	225	65	303	68	408	70	552	70	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan
1 03	1.03.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	237	100	267	100	360	100	484	100	655	100	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 03 1.03.01 15	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	62,04	67,9	205.707	73,6	231.454	83,6	312.120	90,80	419.875	95,70	567.883	95,70	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan		
1 03 1.03.01 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik	9,58	7,88	13.029	6,48	14.660	4,39	19.769	4,39	26.594	4	35.969	4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan		
1 03 1.03.01 17	Program pembangunan talud/turap/bronjong	Cangkupan daerah rawan longsor	18,42	25	8.374	33,33	9.422	41,67	12.705	52,17	17.092	61,54	23.117	61,54	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan		
1 03 1.03.01 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	62,04	67,85	34.750	73,57	39.100	83,59	52.727	90,78	70.930	95,70	95.933	95,70	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan		
1 03 1.03.01 20	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase temuan jalan dan jembatan tidak layak yang ditindaklanjuti	80,00	80,00	200	80,00	225	80,00	303	80,00	408	80,00	552	80,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan		
1 03 1.03.01 22	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Sumber Daya Air		100	100	1.065	100	1.198	100	1.616	100	2.174	100	2.940	100	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan		
		Tersedianya informasi data base jalan	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan		
		Tersedianya informasi data base jembatan	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan		
		Tersedianya informasi data base Pengairan	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan		
1 03 1.03.01 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	cakupan sarana dan prasarana kebinamargaan dg kondisi baik	99,4	99,5	1.200	99,5	1.350	99,5	1.821	99,6	2.449	-	3.313	-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan		
1 03 1.03.01 24	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	68,3	72,0	23.103	75,4	25.995	79,8	35.055	82,5	47.157	85,7	63.780	85,7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan		
1 03 1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang			128.585		186.014		250.844		337.444		456.395					
1 03 1.03.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	14.193	100	20.533	100	27.689	100	37.248	100	50.378	100	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
1 03 1.03.02 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	72.881	100	105.432	100	142.177	100	191.261	100	258.682	100	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
1 03 1.03.02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	70	60	101	65	137	68	184	70	248	70	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
1 03 1.03.02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	95	100	138	100	186	100	251	100	339	100	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
1 04 1.03.02 15	Program Pengembangan Perumahan	- Persentase Rumah Layak Huni	84	85	632	87	914	89	1.233	90	1.658	92	2.243	92	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
1 03 1.03.02 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	55	50	1.306	45,00	1.890	40,00	2.548	36,00	3.428	32,00	4.636	32,00	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
1 04 1.03.02 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	66,72	70,00	2.711	74,00	3.923	77,00	5.290	81,00	7.116	85,00	9.624	85,00	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
1 03 1.03.02 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum	62,41	63,2	562	67,00	813	71,00	1.096	75,00	1.475	80,00	1.995	80,00	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
1 03 1.03.02 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	- Lingkungan Permukiman kumuh	1,7%	1,5%	1.093	1,3%	1.582	1,2%	2.133	1,1%	2.869	1%	3.880	1%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
1 03 1.03.02 30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	- Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	59,56	63,00	22.027	67,00	31.865	71,00	42.970	75,00	57.805	80,00	78.182	80,00	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
1 03 1.03.02 31	Program pembangunan infrastruktur perkotaan	- Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	9,51	9,99	13.013	10,48	18.825	11,01	25.386	11,56	34.150	12,14	46.188	12,14	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
		- Persentase Penangan Sampah	64	70,00		73,00		77,00		81,00		85,00		85,00	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
		- Rasio Tempat Pembuangan Sampah yang Fasilitas Persampahan per satuan	0,01	0,01		0,01		0,02		0,02		0,02		0,02	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang		
1 06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			20.041		29.072		39.204		52.738		71.329					
1 06 1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			20.041		29.072		39.204		52.738		71.329					
1 06 1.06.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	1.519	100	2.203	100	2.971	100	3.997	100	5.406	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06 1.06.01 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	920	100	1.334	100	1.799	100	2.420	100	3.274	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06 1.06.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	312	60	452	65	610	68	820	70	1.109	70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06 1.06.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	776	100	1.126	100	1.518	100	2.043	100	2.763	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06 1.06.01 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Tingkat keberadaan dokumen statistik pembangunan (Kabupaten Dalam Angka	ada	ada	3.709	ada	5.380	ada	7.255	ada	9.760	ada	13.200	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA Akhir RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			ada	ada		ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	0	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06	1.06.01	16 Program Kerjasama Pembangunan	80%	80%	1.120	80%	1.624	80%	2.190	80%	2.947	80%	3.985	80%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06	1.06.01	17 Program Pengembangan Perbatasan	80%	80%	720	80%	1.045	80%	1.409	80%	1.895	80%	2.563	80%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06	1.06.01	18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh	80%	80%	629	80%	913	80%	1.231	80%	1.656	80%	2.240	80%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06	1.06.01	19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	80%	80%	377	80%	547	80%	737	80%	992	80%	1.341	80%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06	1.06.01	20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	CC	B	222	B	323	B	435	B	585	B	792	B	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06	1.06.01	21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada	Ada	4.103	Ada	5.952	Ada	8.027	Ada	10.798	Ada	14.605	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Ada	Ada		Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Ada	Ada		Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	0	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06	1.06.01	22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	80%	80%	1.475	80%	2.140	80%	2.886	80%	3.882	80%	5.250	80%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06	1.06.01	23 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	80%	80%	2.272	80%	3.296	80%	4.444	80%	5.978	80%	8.086	80%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 06	1.06.01	24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.	80%	80%	629	80%	913	80%	1.231	80%	1.656	80%	2.240	80%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 05	1.06.01	15 Program Perencanaan Tata Ruang	80%	80%	1.258	80%	1.250	80%	1.686	80%	2.268	80%	3.067	80%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 05	1.06.01	16 Program Pemanfaatan Ruang	95,826			95,018	349	94,217	470	93,423	633	92,636	856	92,636	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 05	1.06.01	17 Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	50,000			50%	233	60%	314	70%	422	70%	571	70%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1 07		PERHUBUNGAN			3.856		5.735		7.734		10.404		14.071				
1 07	1.07.01	Dinas Perhubungan			3.856		5.735		7.734		10.404		14.071				
1 07	1.07.01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	2.048	100	3.046	100	4.108	100	5.526	100	7.474	100	Dinas Perhubungan		
1 07	1.07.01	02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	328	100	487	100	657	100	884	100	1.196	100	Dinas Perhubungan		
1 07	1.07.01	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	50	60	74	65	100	68	135	70	182	70	Dinas Perhubungan		
1 07	1.07.01	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	83	100	123	100	166	100	224	100	303	100	Dinas Perhubungan		
1 07	1.07.01	15 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	100	100	591	100	880	100	1.186	100	1.596	100	2.158	100	Dinas Perhubungan		
1 07	1.07.01	16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	40%	40%	100	55%	149	65%	201	70%	270	80%	365	80%	Dinas Perhubungan		
1 07	1.07.01	17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	109	109	354	113	526	118	710	122	955	126	1.291	126	Dinas Perhubungan		
			3	3		4	0	5	0	6	0	7	0	7	Dinas Perhubungan		
			7	7		8	0	9	0	10	0	11	0	11	Dinas Perhubungan		
1 07	1.07.01	18 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	4	4	80	4	119	4	160	4	216	4	292	4	Dinas Perhubungan		
			3	3		3	0	3	0	3	0	4	0	4	Dinas Perhubungan		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 07	1.07.01	19	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) pada jalan Kabupaten	2,7	2,7	165	30	245	33	330	36,2	444	39,6	601	39,6	Dinas Perhubungan
1 07	1.07.01	20	Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	8.015	8.015	57	8.633	85	9.298	115	10.014	154	10.786	209	10.786	Dinas Perhubungan
				Jumlah kendaraan yang diuji lulus uji berkala	8.000	8.000		8.800	0	9.650	0	10.550	0	11.430	0	11.430	Dinas Perhubungan
1 08	1.08.01		LINGKUNGAN HIDUP			4.847		8.904		12.007		16.152		21.846			
1 08	1.08.01		Badan Lingkungan Hidup			4.847		8.904		12.007		16.152		21.846			
1 08	1.08.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	579	100	1.063	100	1.434	100	1.929	100	2.609	100	Badan Lingkungan Hidup
1 08	1.08.01	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	334	100	613	100	827	100	1.113	100	1.505	100	Badan Lingkungan Hidup
1 08	1.08.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	70	60	128	65	173	68	233	70	315	70	Badan Lingkungan Hidup
1 08	1.08.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	122	100	224	100	302	100	407	100	550	100	Badan Lingkungan Hidup
1 08	1.08.01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yg tertangani	40%	40%	603	73%	1.108	80%	1.495	80%	2.011	80%	2.720	80%	Badan Lingkungan Hidup
1 08	1.08.01	16	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	93	92,596	1.322	100	2.428	100,000	3.274	100,000	4.405	100,000	5.957	100,000	Badan Lingkungan Hidup
1 08	1.08.01	17	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan konservasi sumber daya alam	90%	90%	828	90%	1.522	90%	2.052	90%	2.761	90%	3.734	90%	Badan Lingkungan Hidup
1 08	1.08.01	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase areal sumber daya alam yang direhabilitasi dan dikonservasi	50%			55%	89	60%	120	65%	162	70%	218	70%	Badan Lingkungan Hidup
1 08	1.08.01	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan	80%	80%	343	80%	629	80%	848	80%	1.141	80%	1.544	80%	Badan Lingkungan Hidup
1 08	1.08.01	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat Pencemaran Air	20%	20%	468	20%	766	20%	1.033	20%	1.389	20%	1.879	20%	Badan Lingkungan Hidup
				Tingkat Pencemaran Udara	20%	20%		20%	0	20%	0	20%	0	20%	0	20%	Badan Lingkungan Hidup
1 08	1.08.01	24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	15	16	179	17	328	20	443	22	595	25	805	25	Badan Lingkungan Hidup
1 10	1.10.01		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			4.571		6.799		9.169		12.334		16.682			
1 10	1.10.01		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			4.571		6.799		9.169		12.334		16.682			
1 10	1.10.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	1.055	100	1.570	100	2.117	100	2.847	100	3.851	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1 10	1.10.01	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	330	100	491	100	662	100	890	100	1.204	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1 10	1.10.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	50	60	74	65	100	68	135	70	182	70	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1 10	1.10.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	75	100	111	100	150	100	201	100	272	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1 10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP	99%	99%	3.061	99%	4.553	99%	6.140	99%	8.260	99%	11.172	99%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1 11	1.11.01		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			5.773		8.392		11.317		15.224		20.591			
1 11	1.11.01		Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5.773		8.392		11.317		15.224		20.591			
1 11	1.11.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	795	100	1.183	100	1.595	100	2.146	100	2.902	100	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11	1.11.01	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	1.110	100	1.240	100	1.672	100	2.249	100	3.042	100	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11	1.11.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	48	60	72	65	97	68	130	70	176	70	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11	1.11.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	89	100	133	100	179	100	241	100	326	100	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11	1.11.01	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	57	57	232	57	345	58	466	58	627	58	848	58	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	40	42		44	0	46	0	48	0	50	0	50	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11	1.11.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Rasio KDRT	0,042	0,042	307	0,044	457	0,047	616	0,049	828	0,052	1.120	0,052	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11	1.11.01	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	69,829	69,829	362	50%	538	55%	726	60%	976	75%	1.320	75%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11	1.11.01	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	18	18	220	18	327	18	440	18	592	18	801	18	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 12 1.12.01 15	Program Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB	98	98	459	97	682	95	920	94	1.237	93	1.674	93	Badan Keluarga Berencana dan		
1 12 1.12.01 16	Program kesehatan reproduksi remaja	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	5	5	63	5	94	5	127	5	170	5	231	5	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan		
1 12 1.12.01 17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	76	76	883	77	1.519	77	2.048	78	2.756	79	3.727	79	Badan Keluarga Berencana dan		
1 12 1.12.01 18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	30	30	730	29	1.086	28	1.464	27	1.970	26	2.664	26	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan		
1 12 1.12.01 20	program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan layanan PIK KRR	79	79	138	79	206	79	278	79	373	80	505	80	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan		
1 12 1.12.01 22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di pok BKB	100	100	259	100	396	100	534	100	718	100	971	100	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan		
1 12 1.12.01 23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB	71	71	78	71	116	71	157	71	211	71	285	71	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan		
1 13	SOSIAL				8.620		9.847		13.279		17.863		24.159				
1 13 1.13.01	Dinas Sosial				8.620		9.847		13.279		17.863		24.159				
1 13 1.13.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	517	100	769	100	1.037	100	1.396	100	1.888	100	Dinas Sosial		
1 13 1.13.01 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	691	100	697	100	940	100	1.264	100	1.710	100	Dinas Sosial		
1 13 1.13.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	23	60	33	65	45	68	61	70	82	70	Dinas Sosial		
1 13 1.13.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	177	100	264	100	356	100	479	100	647	100	Dinas Sosial		
1 13 1.13.01 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT), Dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	90%	92%	1.540	94%	1.570	95%	2.117	95%	2.848	95%	3.852	95%	Dinas Sosial		
1 13 1.13.01 16	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	cakupan PMKS yang tertangani	81	84,44	750	88,02	1.116	91,75	1.504	99,7	2.024	99,7	2.737	99,7	Dinas Sosial		
1 13 1.13.01 17	Program pembinaan anak terlantar	Anak terlantar tertangani	100%	100%	80	100%	193	100%	261	100%	351	100%	474	100%	Dinas Sosial		
1 13 1.13.01 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Cakupan penyandang cacat dan Trauma yang dilatih	3%	5%	175	6%	606	10%	817	13%	1.099	16%	1.486	16%	Dinas Sosial		
1 13 1.13.01 19	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	6	6	25	6	669	6	903	6	1.214	6	1.642	6	Dinas Sosial		
1 13 1.13.01 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya	Cakupan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya	0%			33%	295	49%	398	66%	536	100%	725	100%	Dinas Sosial		
1 13 1.13.01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan kelembagaan yang tertangani	100%	100%	4.642	100%	3.633	100%	4.900	100%	6.591	100%	8.915	100%	Dinas Sosial		
1 14	KETENAGAKERJAAN				2.885		26.842		36.198		48.694		65.859				
1 14 1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2.885		26.842		36.198		48.694		65.859				
1 14 1.14.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	974	100	9.062	100	12.220	100	16.439	100	22.233	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1 14 1.14.01 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	81	100	757	100	1.021	100	1.373	100	1.857	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1 14 1.14.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	31	60	287	65	387	68	520	70	704	70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1 14 1.14.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	73	100	679	100	916	100	1.232	100	1.666	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1 14 1.14.01 15	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72,76%	74,21%	424	75,66%	3.943	77,10%	5.317	78,55%	7.153	80%	9.674	80%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1 14 1.14.01 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5%	5%	284	5%	2.645	5%	3.567	5%	4.798	5%	6.490	5%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		Besaran tenaga kerja yang ditempatkan	32%	45%		60%		70%		75%		80%		80%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1 14 1.14.01 17	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	23%	28%	763	40%	7.094	50%	9.566	55%	12.869	60%	17.405	60%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2 08 1.14.01 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Penempatan KK Transmigran di wilayah Transmigrasi	10.926	10.926	192	10.926	1.788	10.926	2.411	10.926	3.243	10.926	4.386	10.926	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2 08 1.14.01 16	Program Transmigrasi lokal	warga transmigrasi terampil	1%	33%	63	34%	589	35%	794	37%	1.068	37%	1.444	37%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab	
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1 15		KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			7.782		11.575		15.609		20.998		28.400			
1 15	1.15.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			7.782		11.575		15.609		20.998		28.400			
1 15	1.15.01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	809	100	1.203	100	1.623	100	2.183	100	2.953	100	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15	1.15.01	02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	5.277	100	6.690	100	9.022	100	12.137	100	16.415	100	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15	1.15.01	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	50	60	74	65	100	68	135	70	182	70	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15	1.15.01	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	73	100	109	100	147	100	197	100	267	100	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15	1.15.01	15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Usaha Mikro dan kecil aktif	60	60		63	1.158	67	1.561	70	2.100	75	2.840	75	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15	1.15.01	16 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah	Usaha Mikro dan Kecil	4.005	4.005	629	4.131	936	4.262	1.262	4.397	1.697	4.536	2.296	4.536	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15	1.15.01	17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Total Usaha Mikro dan Kecil yang aktif menjalankan kegiatan	3.500	4.004	511	4.131	760	4.261	1.025	4.535	1.379	4.535	1.866	4.535	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15	1.15.01	18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	63,6	75	432	79	642	84	866	89	1.165	95	1.576	95	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 16		PENANAMAN MODAL			5.101		7.588		10.233		13.765		18.618			
1 16	1.16.01	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu			5.101		7.588		10.233		13.765		18.618			
1 16	1.16.01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	1.239	100	228	100	307	100	413	100	559	100	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 16	1.16.01	02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	285	100	114	100	153	100	206	100	279	100	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 16	1.16.01	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur			18	100	38	100	51	100	69	100	93	100	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 16	1.16.01	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	50	60	228	65	307	68	413	70	559	70	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 16	1.16.01	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	365	100	76	100	102	100	138	100	186	100	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 16	1.16.01	15 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	148,96	150	807	150	455	150	614	150	826	150	1.117	150	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 16	1.16.01	16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	2.732	3.468	1.046	4.308	835	5.550	1.126	6.550	1.514	6.550	2.048	6.550	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 16	1.16.01	17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	Rasio daya serap tenaga kerja	80%	80%	1.291	80%	1.518	80%	2.047	80%	2.753	80%	3.724	80%	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 20	1.16.01	20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Cakupan Pengawasan Internal Kebijakan Kepala Daerah				80%	1.214	80%	1.637	80%	2.202	80%	2.979	80%	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 20	1.16.01	23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi				80%	379	80%	512	80%	688	80%	931	80%	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 20	1.16.01	26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan yang mendukung perizinan				80%	911	80%	1.228	80%	1.652	80%	2.234	80%	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 20	1.16.01	Program peningkatan sistem informasi manajemen perizinan terpadu	Persentase pemahaman masyarakat terhadap sistem pelayanan perizinan				80%	1.366	80%	1.842	80%	2.478	80%	3.351	80%	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 20	1.16.01	Program pengembangan administrasi pelayanan perizinan	Persentase administrasi perizinan yang terverifikasi				80%	228	80%	307	80%	413	80%	559	80%	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 18		PEMUDA DAN OLAH RAGA			6.264		9.318		12.566		16.904		22.862			
1 18	1.18.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata			6.264		9.318		12.566		16.904		22.862			
1 18	1.18.01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	1.598	100	2.377	100	3.206	100	4.313	100	5.833	100	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1 18	1.18.01	02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	1.122	100	1.669	100	2.251	100	3.028	100	4.095	100	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1 18	1.18.01	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	86	60	128	65	173	68	232	70	314	70	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1 18	1.18.01	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	60	100	90	100	121	100	163	100	221	100	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1 18	1.18.01	16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang dibina	46	47	1.599	48	2.378	51	3.207	51	4.314	51	5.834	51	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1 18	1.18.01	20 Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga	jumlah prestasi olahraga	40	50	311	60	463	65	624	70	840	70	1.136	70	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1 18	1.18.01	21 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	jumlah lapangan olahraga, jumlah gedung olahraga	21	21	542	21	806	21	1.087	21	1.462	21	1.978	21	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2 04	1.18.01	15 Program pengembangan pemasaran pariwisata	Kunjungan wisata	21,95	35,98	643	61,01	956	70	1.289	75	1.734	75	2.345	75	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2 04	1.18.01	16 Program pengembangan destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	6,0	6,1	75	6,6	111	7,1	149	7,7	201	8,3	272	8,3	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2 04	1.18.01	17 Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan bidang pariwisata	40%	40%	229	55%	340	65%	459	70%	617	80%	835	80%	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1 19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			11.906		13.571		18.301		24.619		33.298		
1 19	1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat			2.990		4.447		5.997		8.067		10.911		
1 19	1.19.01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	970	100	1.443	100	1.946	100	2.618	100	3.541	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19	1.19.01	02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	396	100	590	100	795	100	1.069	100	1.446	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19	1.19.01	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	72	60	107	65	144	68	194	70	263	70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19	1.19.01	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	177	100	263	100	355	100	478	100	646	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19	1.19.01	16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	0,41	0,41	145	0,41	216	0,41	291	0,41	392	0,41	530	0,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19	1.19.01	17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	50	55	380	60	566	65	763	70	1.026	77	1.388	77	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19	1.19.01	18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	50	55	62	60	92	65	124	70	167	80	226	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19	1.19.01	19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	40%	40%	303	55%	450	65%	607	70%	816	80%	1.104	80%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19	1.19.01	21 Program Pendidikan Politik Masyarakat	1	1	484	-	719	1	970	-	1.305	1	1.765	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19	1.19.02	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja			8.917		9.124		12.304		16.552		22.387		
1 19	1.19.02	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	1.401	100	1.434	100	1.934	100	2.602	100	3.519	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 19	1.19.02	02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	427	100	437	100	589	100	793	100	1.072	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 19	1.19.02	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	100	2.783	100	2.847	100	3.840	100	5.165	100	6.986	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 19	1.19.01	04 Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	100	100	124	100	127	100	171	100	230	100	310	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 19	1.19.02	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	126	60	129	65	174	68	234	70	316	70	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 19	1.19.02	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	70	100	72	100	97	100	130	100	176	100	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 19	1.19.02	15 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	80%	80%	1.278	80%	1.307	80%	1.763	80%	2.371	80%	3.207	80%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 19	1.19.02	16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	95%	95%	2.604	95%	2.664	95%	3.593	95%	4.833	95%	6.537	95%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 19	1.19.02	20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(Pekat)	40%	40%	105	55%	107	65%	144	70%	194	80%	263	80%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 19	1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			6.994		10.403		14.029		18.873		25.525		
1 19	1.19.03	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	1.057	100	1.572	100	2.119	100	2.851	100	3.856	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 19	1.19.03	02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	3.518	100	5.232	100	7.056	100	9.492	100	12.838	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 19	1.19.03	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	100	37	100	55	100	74	100	100	100	135	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 19	1.19.03	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	100	60	149	65	201	68	270	70	365	70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 19	1.19.03	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	140	100	208	100	281	100	378	100	511	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 19	1.19.03	15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	20%	83%	152	85%	226	86%	304	93%	409	100%	554	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 19	1.19.03	22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	0%	100%	1.991	100%	2.962	100%	3.994	100%	5.373	100%	7.266	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 20		PEMERINTAHAN UMUM			186.672		272.950		368.079		495.152		669.696		
1 20	1.20.03	Sekretariat Daerah			43.520		64.391		86.832		116.810		157.986		
1 20	1.20.03	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	11.953	100	17.064	100	23.011	100	30.955	100	41.866	100	Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	6.161	100	9.116	100	12.294	100	16.538	100	22.367	100	Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	100	2.235	100	3.307	100	4.460	100	5.999	100	8.114	100	Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	374	60	554	65	747	68	1.005	70	1.359	70	Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	727	100	1.076	100	1.452	100	1.953	100	2.641	100	Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%	7.862	100%	11.632	100%	15.686	100%	21.101	100%	28.539	100%	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab	
				2014		2015		2016		2017		2018						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1 20	1.20.03	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Nilai Sakip	CC	CC	5.402	CC	Rp	7.993	B	10.779	B	14.500	A	19.611	A	Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	23	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sistim Informasi Manajemen Pemda	sistem jaringan dan informasi hukum	sistem jaringan dan informasi hukum	131	194	sistem jaringan dan informasi hukum	262	sistem jaringan dan informasi hukum	352	sistem jaringan dan informasi hukum	476	sistem jaringan dan informasi hukum			Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	24	Program Mengintensifkan Penangan Pengaduan Masyarakat	cakupan penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%	125	100%	185	100%	249	100%	336	100%	454	100%		Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	SKPD yang memberikan pelayanan prima	3	6	111	6	164	6	221	6	297	6	402	6		Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	100%	100%	2.082	100%	3.080	100%	4.154	100%	5.588	100%	7.558	100%		Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	persentase kecamatan yang memiliki tapal batas yang tidak bermasalah	20%	30%	1.810	40%	2.678	50%	3.611	60%	4.858	70%	6.571	70%		Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	31	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase capaian SPM	40%	40%	639	55%	945	65%	1.275	70%	1.715	80%	2.319	80%		Sekretariat Daerah
1 20	1.20.03	32	Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama	Persentase lembaga-lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan	40%	40%	3.906	55%	5.780	65%	7.794	70%	10.485	80%	14.181	80%		Sekretariat Daerah
				Jumlah anak usia sekolah yang memiliki sertifikasi baca Alquran	900	1.500		1.700		1.900		2.100		2.300		2.300		
				Produk makanan dan minuman lokal berlabel halal	3	10		20		30		40		50		50		
1 09	1.20.03	17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	persentase konflik kasus pertanahan yang ditindaklanjuti				100%	644	100%	868	100%	1.168	100%	1.580	100%		Sekretariat Daerah
1 20	1.20.04		Sekretariat DPRD				34.050		52.138		70.309		94.582		127.923			
1 20	1.20.04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	3.344	100	5.120	100	6.905	100	9.289	100	12.563	100		Sekretariat DPRD
1 20	1.20.04	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	3.019	100	4.622	100	6.233	100	8.385	100	11.341	100		Sekretariat DPRD
1 20	1.20.04	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur		100	527	100	806	100	1.087	100	1.462	100	1.978	100		Sekretariat DPRD
1 20	1.20.04	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	113	60	172	65	232	68	312	70	423	70		Sekretariat DPRD
1 20	1.20.04	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	76	100	116	100	157	100	211	100	285	100		Sekretariat DPRD
1 20	1.20.04	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	cakupan penataan daerah otonomi baru	80%	80%	26.972	80%	41.301	80%	55.695	80%	74.923	80%	101.333	80%		Sekretariat DPRD
1 20	1.20.04	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	persentase perundang-undangan yang disahkan		80%	99	80%	152	80%	204	80%	275	80%	372	80%		Sekretariat DPRD
1 20	1.20.05		Inspektorat Kabupaten				7.487		11.137		15.019		20.204		27.326			
1 20	1.20.05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	1.364	100	2.028	100	2.735	100	3.680	100	4.977	100		Inspektorat Kabupaten
1 20	1.20.05	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	942	100	1.402	100	1.890	100	2.543	100	3.439	100		Inspektorat Kabupaten
1 20	1.20.05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	134	60	200	65	270	68	363	70	490	70		Inspektorat Kabupaten
1 20	1.20.05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	82	100	122	100	165	100	222	100	300	100		Inspektorat Kabupaten
1 20	1.20.05	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Prosentase pencapaian PKPT per tahun	100	100	4.435	100	6.597	100	8.896	100	11.967	100	16.186	100		Inspektorat Kabupaten
				Laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Inspektorat Kabupaten
1 20	1.20.05	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	persentase aparatur pengawas yang mendapatkan sertifikat keahlian	40%	47%	505	58%	752	70%	1.014	84%	1.363	100%	1.844	100%		Inspektorat Kabupaten
				persentase aparatur pengawasan yang telah mengikuti minimal 5 jenis diklat substansi pengawasan	40%	58%		77%		100%		100%		100%		100%		Inspektorat Kabupaten
1 20	1.20.05	22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah temuan BPK pertahun yang ditindaklanjuti	85%	87%	24	88%	36	89%	49	90%	66	90%	89	90%		Inspektorat Kabupaten
1 20	1.20.06		Dinas Pendapatan Daerah				25.826		38.415		51.803		69.688		94.253			
1 20	1.20.06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	1.708	100	2.541	100	3.426	100	4.609	100	6.234	100		Dinas Pendapatan Daerah
1 20	1.20.06	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	10.791	100	15.084	100	20.341	100	27.364	100	37.010	100		Dinas Pendapatan Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 20	1.20.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	119	60	178	65	239	68	322	70	436	70	Dinas Pendapatan Daerah		
1 20	1.20.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	370	100	551	100	743	100	1.000	100	1.352	100	Dinas Pendapatan Daerah		
1 20	1.20.06.17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90%	90%	12.837	90%	20.061	90%	27.053	90%	36.393	90%	49.221	90%	Dinas Pendapatan Daerah		
1 20	1.20.07.	Badan Kepegawaian Daerah			12.987		19.318		26.051		35.045		47.398				
1 20	1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	1.898	100	2.824	100	3.808	100	5.123	100	6.928	100	Badan Kepegawaian Daerah		
1 20	1.20.07.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	80	100	120	100	161	100	217	100	293	100	Badan Kepegawaian Daerah		
1 20	1.20.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	100		100	193	100	261	100	350	100	474	100	Badan Kepegawaian Daerah		
1 20	1.20.07.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	100	100	190	100	283	100	382	100	514	100	695	100	Badan Kepegawaian Daerah		
1 20	1.20.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	401	60	596	65	804	68	1.082	70	1.463	70	Badan Kepegawaian Daerah		
1 20	1.20.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	247	100	368	100	496	100	668	100	903	100	Badan Kepegawaian Daerah		
1 20	1.20.07.15	Program Pendidikan Kedinasan	1.000	100%	1.268	1	1.886	1	2.544	1	3.422	1	4.628	1	Badan Kepegawaian Daerah		
1 20	1.20.07.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	18,27	20,000	1.450	22	2.157	25	2.909	30	3.914	40	5.293	40	Badan Kepegawaian Daerah		
1 20	1.20.07.17	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	17,31	25,000	7.418	27	10.837	30	14.615	35	19.660	45	26.590	45	Badan Kepegawaian Daerah		
1 20	1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	41,49	45,000	34	50	50	55	68	60	91	65	123	65	Badan Kepegawaian Daerah		
1 20	1.20.09.	Kecamatan Semende Darat Ulu			1.691		2.516		3.393		4.564		6.172				
1 20	1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	308	100	458	100	618	100	831	100	1.124	100	Kecamatan Semende Darat Ulu		
1 20	1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	16	100	24	100	32	100	43	100	58	100	Kecamatan Semende Darat Ulu		
1 20	1.20.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	15	60	22	65	30	68	40	70	55	70	Kecamatan Semende Darat Ulu		
1 20	1.20.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	26	100	38	100	51	100	69	100	93	100	Kecamatan Semende Darat Ulu		
1 20	1.20.09.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	210	80%	312	80%	421	80%	566	80%	766	80%	Kecamatan Semende Darat Ulu		
1 20	1.20.09.28	Program pengembangan kecamatan	3%	3%	1.117	4%	1.662	4%	2.241	5%	3.015	6%	4.078	6%	Kecamatan Semende Darat Ulu		
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Semende Darat Ulu		
		Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Semende Darat Ulu		
		cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Semende Darat Ulu		
1 20	1.20.10.	Kecamatan Semende Darat Tengah			1.778		2.645		3.567		4.799		6.490				
1 20	1.20.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	174	100	297	100	400	100	538	100	728	100	Kecamatan Semende Darat Tengah		
1 20	1.20.10.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	30	100	7	100	10	100	13	100	18	100	Kecamatan Semende Darat Tengah		
1 20	1.20.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	14	60	20	65	27	68	36	70	49	70	Kecamatan Semende Darat Tengah		
1 20	1.20.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	28	100	41	100	55	100	74	100	100	100	Kecamatan Semende Darat Tengah		
1 20	1.20.10.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	288	80%	428	80%	577	80%	776	80%	1.050	80%	Kecamatan Semende Darat Tengah		
1 20	1.20.10.28	Program pengembangan kecamatan	3%	3%	1.245	4%	1.852	4%	2.498	5%	3.360	6%	4.545	6%	Kecamatan Semende Darat Tengah		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Semende Darat Tengah
		Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%		96%	Kecamatan Semende Darat Tengah
		cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%		90%	Kecamatan Semende Darat Tengah
1	20	1.20.11.	Kecamatan Semende Darat Laut			1.786		2.657		3.582		4.819		6.518			
1	20	1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	242	100	361	100	486	100	654	100	885	100	Kecamatan Semende Darat Laut
1	20	1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	23	100	34	100	45	100	61	100	82	100	Kecamatan Semende Darat Laut
1	20	1.20.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	5	60	7	65	9	68	12	70	16	70	Kecamatan Semende Darat Laut
1	20	1.20.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	23	100	35	100	47	100	63	100	85	100	Kecamatan Semende Darat Laut
1	20	1.20.11.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	80%	80%	255	80%	380	80%	512	80%	689	80%	931	80%	Kecamatan Semende Darat Laut
1	20	1.20.11.28	Program pengembangan kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.238	4%	1.841	4%	2.483	5%	3.340	6%	4.518	6%	Kecamatan Semende Darat Laut
				Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Semende Darat Laut
				Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Semende Darat Laut
				cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Semende Darat Laut
1	20	1.20.12.	Kecamatan Tanjung Agung			2.196		3.266		4.405		5.925		8.014			
1	20	1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	347	100	517	100	697	100	937	100	1.267	100	Kecamatan Tanjung Agung
1	20	1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	4	100	5	100	7	100	9	100	13	100	Kecamatan Tanjung Agung
1	20	1.20.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	11	60	16	65	22	68	30	70	40	70	Kecamatan Tanjung Agung
1	20	1.20.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	30	100	45	100	60	100	81	100	109	100	Kecamatan Tanjung Agung
1	20	1.20.12.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	80%	80%	525	80%	781	80%	1.053	80%	1.417	80%	1.916	80%	Kecamatan Tanjung Agung
1	20	1.20.12.28	Program pengembangan kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.279	4%	1.903	4%	2.566	5%	3.451	6%	4.668	6%	Kecamatan Tanjung Agung
				Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Tanjung Agung
				Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Tanjung Agung
				cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Tanjung Agung
1	20	1.20.13.	Kecamatan Lawang Kidul			1.896		2.820		3.803		5.116		6.919			
1	20	1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	251	100	373	100	503	100	676	100	915	100	Kecamatan Lawang Kidul
1	20	1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	5	100	7	100	9	100	12	100	17	100	Kecamatan Lawang Kidul
1	20	1.20.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	5	60	7	65	10	68	13	70	18	70	Kecamatan Lawang Kidul
1	20	1.20.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	40	100	59	100	80	100	108	100	146	100	Kecamatan Lawang Kidul
1	20	1.20.13.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	80%	80%	189	80%	281	80%	379	80%	510	80%	689	80%	Kecamatan Lawang Kidul
1	20	1.20.13.28	Program pengembangan kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.407	4%	2.093	4%	2.822	5%	3.796	6%	5.134	6%	Kecamatan Lawang Kidul
				Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Lawang Kidul
				Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Lawang Kidul
				cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Lawang Kidul
1	20	1.20.14.	Kecamatan Muara Enim			2.201		3.273		4.414		5.938		8.032			
1	20	1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	281	100	414	100	558	100	751	100	1.015	100	Kecamatan Muara Enim
1	20	1.20.14.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	17	100	26	100	35	100	46	100	63	100	Kecamatan Muara Enim
1	20	1.20.14.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur		100	1	100	1	100	2	100	3	100	3	100	Kecamatan Muara Enim

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA Akhir RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 20	1.20.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	18	60	30	65	40	68	54	70	73	70	Kecamatan Muara Enim		
1 20	1.20.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	55	100	94	100	126	100	170	100	230	100	Kecamatan Muara Enim		
1 20	1.20.14.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	332	80%	489	80%	659	80%	886	80%	1.199	80%	Kecamatan Muara Enim		
1 20	1.20.14.28	Program pengembangan kecamatan															
		Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.496	4%	2.221	4%	2.994	5%	4.028	6%	5.448	6%	Kecamatan Muara Enim		
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Muara Enim		
		Persentaase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Muara Enim		
		cakupan sarana dan prasarana PEMERINTAHAN yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Muara Enim		
1 20	1.20.15.	Kecamatan Ujan Mas			1.754		2.609		3.519		4.733		6.402				
1 20	1.20.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	259	100	386	100	520	100	700	100	946	100	Kecamatan Ujan Mas		
1 20	1.20.15.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	72	100	38	100	57	100	77	100	103	100	139	100	Kecamatan Ujan Mas		
1 20	1.20.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	5	60	7	65	10	68	13	70	18	70	Kecamatan Ujan Mas		
1 20	1.20.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	85	100	27	100	41	100	55	100	74	100	100	100	Kecamatan Ujan Mas		
1 20	1.20.15.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	223	80%	332	80%	448	80%	603	80%	815	80%	Kecamatan Ujan Mas		
1 20	1.20.15.28	Program pengembangan kecamatan															
		Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.201	4%	1.786	4%	2.409	5%	3.241	6%	4.383	6%	Kecamatan Ujan Mas		
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%	0	100%		100%		100%		100%	Kecamatan Ujan Mas		
		Persentaase Posyandu aktif	80%	93%		94%	0	95%		96%		96%		96%	Kecamatan Ujan Mas		
		cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	72	75		77	0	82		90%		90%		90%	Kecamatan Ujan Mas		
1 20	1.20.16.	Kecamatan Benakat			1.634		2.430		3.278		4.409		5.963				
1 20	1.20.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	215	100	320	100	431	100	580	100	785	100	Kecamatan Benakat		
1 20	1.20.16.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	21	100	31	100	42	100	57	100	77	100	Kecamatan Benakat		
1 20	1.20.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	4	60	5	65	7	68	9	70	13	70	Kecamatan Benakat		
1 20	1.20.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	24	100	35	100	47	100	64	100	86	100	Kecamatan Benakat		
1 20	1.20.16.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	189	80%	281	80%	379	80%	510	80%	690	80%	Kecamatan Benakat		
1 20	1.20.16.28	Program pengembangan kecamatan															
		Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.182	4%	1.758	4%	2.371	5%	3.189	6%	4.313	6%	Kecamatan Benakat		
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Benakat		
		Persentaase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Benakat		
		cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Benakat		
1 20	1.20.17.	Kecamatan Gunung Megang			1.939		2.884		3.889		5.232		7.076				
1 20	1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	274	100	407	100	549	100	738	100	999	100	Kecamatan Gunung Megang		
1 20	1.20.17.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	51	100	76	100	103	100	138	100	187	100	Kecamatan Gunung Megang		
1 20	1.20.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	20	60	30	65	40	68	54	70	73	70	Kecamatan Gunung Megang		
1 20	1.20.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	24	100	35	100	48	100	64	100	87	100	Kecamatan Gunung Megang		
1 20	1.20.17.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	316	80%	470	80%	633	80%	852	80%	1.152	80%	Kecamatan Gunung Megang		
1 20	1.20.17.28	Program pengembangan kecamatan															
		Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.255	4%	1.866	4%	2.516	5%	3.385	6%	4.579	6%	Kecamatan Gunung Megang		
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Gunung Megang		
		Persentaase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Gunung Megang		
		cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Gunung Megang		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA Akhir RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 20	1.20.23.	Kecamatan Rambang Dangu			2.068		3.076		4.148		5.580		7.547				
1 20	1.20.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	171	100	254	100	342	100	460	100	623	100	Kecamatan Rambang Dangu		
1 20	1.20.23.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	36	100	54	100	72	100	97	100	131	100	Kecamatan Rambang Dangu		
1 20	1.20.23.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	9	60	13	65	18	68	24	70	33	70	Kecamatan Rambang Dangu		
1 20	1.20.23.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	28	100	41	100	55	100	74	100	100	100	Kecamatan Rambang Dangu		
1 20	1.20.23.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	487	80%	725	80%	978	80%	1.315	80%	1.779	80%	Kecamatan Rambang Dangu		
1 20	1.20.23.28	Program pengembangan kecamatan	3%	3%	1.337	4%	1.989	4%	2.683	5%	3.609	6%	4.881	6%	Kecamatan Rambang Dangu		
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Rambang Dangu		
		Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Rambang Dangu		
		cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Rambang Dangu		
1 20	1.20.24.	Kecamatan Lubai			1.910		2.841		3.831		5.153		6.969				
1 20	1.20.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	218	100	324	100	437	100	588	100	795	100	Kecamatan Lubai		
1 20	1.20.24.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	49	100	73	100	98	100	132	100	179	100	Kecamatan Lubai		
1 20	1.20.24.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	13	60	20	65	26	68	36	70	48	70	Kecamatan Lubai		
1 20	1.20.24.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	5	100	7	100	10	100	13	100	18	100	Kecamatan Lubai		
1 20	1.20.24.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	300	80%	446	80%	602	80%	810	80%	1.095	80%	Kecamatan Lubai		
1 20	1.20.24.28	Program pengembangan kecamatan	3%	3%	1.324	4%	1.970	4%	2.657	5%	3.574	6%	4.834	6%	Kecamatan Lubai		
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Lubai		
		Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Lubai		
		cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Lubai		
1 20	1.20.25.	Kecamatan Rambang			1.767		2.628		3.544		4.767		6.448				
1 20	1.20.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	154	100	230	100	310	100	417	100	564	100	Kecamatan Rambang		
1 20	1.20.25.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	69	100	102	100	138	100	185	100	250	100	Kecamatan Rambang		
1 20	1.20.25.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	9	60	13	65	18	68	24	70	33	70	Kecamatan Rambang		
1 20	1.20.25.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	25	100	38	100	51	100	69	100	93	100	Kecamatan Rambang		
1 20	1.20.25.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	290	80%	431	80%	581	80%	782	80%	1.058	80%	Kecamatan Rambang		
1 20	1.20.25.28	Program pengembangan kecamatan	3%	3%	1.219	4%	1.814	4%	2.446	5%	3.290	6%	4.450	6%	Kecamatan Rambang		
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Rambang		
		Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Rambang		
		cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Rambang		
1 20	1.20.26.	Kecamatan Lembak			1.801		2.678		3.612		4.859		6.572				
1 20	1.20.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	225	100	335	100	452	100	608	100	823	100	Kecamatan Lembak		
1 20	1.20.26.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	49	100	73	100	98	100	132	100	178	100	Kecamatan Lembak		
1 20	1.20.26.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	14	60	20	65	27	68	36	70	49	70	Kecamatan Lembak		
1 20	1.20.26.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	28	100	41	100	55	100	74	100	100	100	Kecamatan Lembak		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA Akhir RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 20	1.20.26.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	80%	80%	220	80%	327	80%	441	80%	593	80%	802	80%	Kecamatan Lembak	
1 20	1.20.26.28	Program pengembangan kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.266	4%	1.883	4%	2.539	5%	3.415	6%	4.619	6%	Kecamatan Lembak	
			Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Lembak	
			Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Lembak	
			cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Lembak	
1 20	1.20.27.	Kecamatan Kelekar				1.647		2.449		3.303		4.443		6.009			
1 20	1.20.27.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	218	100	324	100	437	100	587	100	795	100	Kecamatan Kelekar	
1 20	1.20.27.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	28	100	41	100	55	100	74	100	100	100	Kecamatan Kelekar	
1 20	1.20.27.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	10	60	15	65	20	68	27	70	36	70	Kecamatan Kelekar	
1 20	1.20.27.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	4	100	5	100	7	100	9	100	13	100	Kecamatan Kelekar	
1 20	1.20.27.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	80%	80%	206	80%	307	80%	414	80%	557	80%	753	80%	Kecamatan Kelekar	
1 20	1.20.27.28	Program pengembangan kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.181	4%	1.757	4%	2.370	5%	3.188	6%	4.312	6%	Kecamatan Kelekar	
			Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Kelekar	
			Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Kelekar	
			cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Kelekar	
1 20	1.20.28.	Kecamatan Gelumbang				2.085		3.102		4.183		5.627		7.610			
1 20	1.20.28.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	244	100	363	100	490	100	659	100	891	100	Kecamatan Gelumbang	
1 20	1.20.28.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	49	100	72	100	98	100	131	100	178	100	Kecamatan Gelumbang	
1 20	1.20.28.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	4	60	6	65	8	68	11	70	15	70	Kecamatan Gelumbang	
1 20	1.20.28.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	30	100	45	100	60	100	81	100	109	100	Kecamatan Gelumbang	
1 20	1.20.28.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	80%	80%	467	80%	694	80%	936	80%	1.259	80%	1.703	80%	Kecamatan Gelumbang	
1 20	1.20.28.28	Program pengembangan kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.292	4%	1.921	4%	2.591	5%	3.485	6%	4.714	6%	Kecamatan Gelumbang	
			Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Gelumbang	
			Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Gelumbang	
			cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Gelumbang	
1 20	1.20.29.	Kecamatan Sungai Rotan				1.836		2.731		3.683		4.954		6.700			
1 20	1.20.29.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	228	100	339	100	458	100	616	100	832	100	Kecamatan Sungai Rotan	
1 20	1.20.29.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	19	100	28	100	37	100	50	100	68	100	Kecamatan Sungai Rotan	
1 20	1.20.29.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	5	60	7	65	9	68	12	70	16	70	Kecamatan Sungai Rotan	
1 20	1.20.29.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	24	100	36	100	48	100	65	100	88	100	Kecamatan Sungai Rotan	
1 20	1.20.29.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	80%	80%	279	80%	415	80%	559	80%	752	80%	1.018	80%	Kecamatan Sungai Rotan	
1 20	1.20.29.28	Program pengembangan kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.282	4%	1.907	4%	2.571	5%	3.459	6%	4.679	6%	Kecamatan Sungai Rotan	
			Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Sungai Rotan	
			Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Sungai Rotan	
			cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Sungai Rotan	
1 20	1.20.30.	Kecamatan Muara Belida				1.705		2.537		3.421		4.602		6.224			
1 20	1.20.30.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	250	100	372	100	502	100	675	100	913	100	Kecamatan Muara Belida	
1 20	1.20.30.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	9	100	14	100	18	100	25	100	33	100	Kecamatan Muara Belida	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 20	1.20.30.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	60	0	65	0	68	0	70	0	70	Kecamatan Muara Belida			
1 20	1.20.30.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	6	100	9	100	12	100	16	100	21	100	Kecamatan Muara Belida		
1 20	1.20.30.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	230	80%	343	80%	462	80%	622	80%	841	80%	Kecamatan Muara Belida		
1 20	1.20.30.28	Program pengembangan kecamatan															
		Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.210	4%	1.800	4%	2.427	5%	3.265	6%	4.416	6%	Kecamatan Muara Belida		
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Muara Belida		
		Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Muara Belida		
		cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Muara Belida		
1 20	1.20.31.	Sekretariat KORPRI Kabupaten Muara Enim															
1 20	1.20.31.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	244	100	352	100	475	100	639	100	864	100	Sekretariat KORPRI Kabupaten Muara Enim		
1 20	1.20.31.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100		100	11	100	15	100	20	100	27	100	Sekretariat KORPRI Kabupaten Muara Enim		
1 20	1.20.31.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	30	60	45	65	60	68	81	70	109	70	Sekretariat KORPRI Kabupaten Muara Enim		
1 20	1.20.31.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	10	100	15	100	20	100	26	100	36	100	Sekretariat KORPRI Kabupaten Muara Enim		
1 20	1.20.31.32	Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama	100%	100%	21	100%	270	100%	364	100%	489	100%	662	100%	Sekretariat KORPRI Kabupaten Muara Enim		
1 20	1.20.31.31	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	100%	100%	181	100%	31	100%	42	100%	57	100%	77	100%	Sekretariat KORPRI Kabupaten Muara Enim		
1 20	1.20.32.	Kecamatan Belimbing															
1 20	1.20.32.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	171	100	254	100	343	100	461	100	623	100	Kecamatan Belimbing		
1 20	1.20.32.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	7	100	11	100	14	100	19	100	26	100	Kecamatan Belimbing		
1 20	1.20.32.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	17	60	25	65	34	68	46	70	62	70	Kecamatan Belimbing		
1 20	1.20.32.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	35	100	52	100	71	100	95	100	129	100	Kecamatan Belimbing		
1 20	1.20.32.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	172	80%	256	80%	346	80%	465	80%	629	80%	Kecamatan Belimbing		
1 20	1.20.32.28	Program pengembangan kecamatan															
		Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.205	4%	1.792	4%	2.417	5%	3.251	6%	4.398	6%	Kecamatan Belimbing		
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Belimbing		
		Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Belimbing		
		cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Belimbing		
1 20	1.20.33.	Kecamatan Belida Darat															
1 20	1.20.33.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	198	100	294	100	397	100	534	100	722	100	Kecamatan Belida Darat		
1 20	1.20.33.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	3	100	4	100	5	100	7	100	10	100	Kecamatan Belida Darat		
1 20	1.20.33.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	9	60	13	65	18	68	24	70	33	70	Kecamatan Belida Darat		
1 20	1.20.33.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	5	100	7	100	10	100	14	100	18	100	Kecamatan Belida Darat		
1 20	1.20.33.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	80%	80%	222	80%	331	80%	446	80%	600	80%	811	80%	Kecamatan Belida Darat		
1 20	1.20.33.28	Program pengembangan kecamatan															
		Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.158	4%	1.722	4%	2.322	5%	3.124	6%	4.226	6%	Kecamatan Belida Darat		
		Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%	0	100%	Kecamatan Belida Darat		
		Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Belida Darat		
		cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Belida Darat		
1 20	1.20.34.	Kecamatan Lubai Ulu															
1 20	1.20.34.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	177	100	263	100	355	100	478	100	646	100	Kecamatan Lubai Ulu		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 20	1.20.34.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	37	100	54	100	73	100	99	100	133	100	Kecamatan Lubai Ulu	
1 20	1.20.34.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	12	60	18	65	24	68	32	70	44	70	Kecamatan Lubai Ulu	
1 20	1.20.34.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	16	100	23	100	32	100	43	100	58	100	Kecamatan Lubai Ulu	
1 20	1.20.34.19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	80%	80%	304	80%	452	80%	609	80%	820	80%	1.109	80%	Kecamatan Lubai Ulu	
1 20	1.20.34.28	Program pengembangan kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan	3%	3%	1.231	4%	1.831	4%	2.470	5%	3.322	6%	4.493	6%	Kecamatan Lubai Ulu	
			Perentase PKK aktif	80%	90%		100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan Lubai Ulu	
			Persentase Posyandu aktif	80%	93%		94%		95%		96%		96%		96%	Kecamatan Lubai Ulu	
			cakupan sarana dan prasarana fasilitas umum yang baik	80%	80%		80%		80%		90%		90%		90%	Kecamatan Lubai Ulu	
1 20	1.20.35.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				25.644		32.280		43.531		58.559		79.201			
1 20	1.20.35.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	3.417	100	4.937	100	6.658	100	8.956	100	12.113	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
1 20	1.20.35.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	4.437	100	6.604	100	8.905	100	11.980	100	16.203	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
1 20	1.20.35.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	82	60	122	65	164	68	221	70	299	70	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
1 20	1.20.35.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	908	100	1.372	100	1.851	100	2.490	100	3.367	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
1 20	1.20.35.17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan waktu penetapan PERDA APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	12.857	Tepat waktu	19.245	Tepat waktu	25.953	Tepat waktu	34.912	Tepat waktu	47.219	Tepat waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			PERDA Pengelolaan Keuangan Daerah	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP		WDP		WTP		WTP		WTP		WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Inventarisasi barang/aset daerah	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Laporan Keuangan SKPD (Neraca Calk)	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
1 21		KETAHANAN PANGAN				3.943		5.865		7.909		10.639		14.389			
1 21	1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan				3.943		5.865		7.909		10.639		14.389			
1 21	1.21.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	494	100	748	100	1.008	100	1.357	100	1.835	100	Kantor Ketahanan Pangan	
1 21	1.21.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	166	100	234	100	315	100	424	100	573	100	Kantor Ketahanan Pangan	
1 21	1.21.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	24	60	36	65	48	68	65	70	88	70	Kantor Ketahanan Pangan	
1 21	1.21.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	56	100	84	100	113	100	152	100	205	100	Kantor Ketahanan Pangan	
1 21	1.21.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian /Perkebunan)	Ketersediaan pangan utama		40%	3.203	55%	4.764	65%	6.424	70%	8.642	80%	11.688	80%	Kantor Ketahanan Pangan	
			Beras	109,080	110,17		111,27		112,39		112,00		112,00		112,00	Kantor Ketahanan Pangan	
			Daging	12,360	12,42		12,48		12,54		12,60		12,66		12,66	Kantor Ketahanan Pangan	
			Telur	7,850	8,04		8,24		8,24		8,24		8,24		8,87	Kantor Ketahanan Pangan	
			Ikan	33,051	33,22		33,38		33,54		33,70		33,85		33,85	Kantor Ketahanan Pangan	
1 22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				20.745		28.411		38.313		51.540		69.708			
1 22	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				20.745		28.411		38.313		51.540		69.708			
1 22	1.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	701	100	1.023	100	1.379	100	1.855	100	2.509	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
1 22	1.22.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	9.583	100	12.781	100	17.235	100	23.185	100	31.358	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
1 22	1.22.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur		100		100	114	100	153	100	206	100	279	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
1 22	1.22.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	40	60	60	65	81	68	108	70	147	70	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
1 22	1.22.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	95	100	142	100	191	100	257	100	348	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 22 1.22.01 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	327,27	328,54	2.079	329,82	3.105	332,4	4.187	332,4	5.633	332,4	7.619	332,4	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
1 22 1.22.01 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase desa yang memiliki akses terhadap pasar yang memadai	80	85	1.624	90	2.017	95	2.720	97	3.659	100	4.949	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
1 22 1.22.01 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase LPM aktif	75	80	1.292	85	1.929	90	2.602	95	3.500	100	4.734	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
1 22 1.22.01 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	13,5	20	1.110	20	1.658	20	2.236	20	3.007	20	4.067	20	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
1 22 1.22.01 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	PKK berprestasi tk Kab	22 Desa/kel	22 Desa/kel	1.173	22 Desa/kel	1.751	22 Desa/kel	2.362	22 Desa/kel	3.177	22 Desa/kel	4.297	22 Desa/kel	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
1 22 1.22.01 20	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang mampu menyusun RPJMDes dan APBDes tepat waktu	25	40	74	60	568	70	766	80	1.031	95	1.394	95	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
1 03 1.22.01 25	Program Pembangunan infrastruktur di perdesaan	Jumlah desa tertinggal	32	22	2.974	12	3.267	-	4.406	-	5.927	-	8.016	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
1 25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.917		11.777		15.881		21.364		28.895				
1 25 1.25.1.25	Kantor Komunikasi dan Informasi				7.917		11.777		15.881		21.364		28.895				
1 25 1.25.1.25 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	3.066	100	4.561	100	6.151	100	8.274	100	11.191	100	Kantor Komunikasi dan Informasi		
1 25 1.25.1.25 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	427	100	635	100	857	100	1.153	100	1.559	100	Kantor Komunikasi dan Informasi		
1 25 1.25.1.25 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	58	60	86	65	116	68	155	70	210	70	Kantor Komunikasi dan Informasi		
1 25 1.25.1.25 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	120	100	178	100	240	100	322	100	436	100	Kantor Komunikasi dan Informasi		
1 25 1.25.1.25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM tingkat kecamatan (%)	100	100	2.431	100	3.616	100	4.876	100	6.560	100	8.872	100	Kantor Komunikasi dan Informasi		
		Cakupan layanan Komunikasi informasi SKPD	83	83		100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kantor Komunikasi dan Informasi		
		Cakupan layanan internet di Desa/ Kelurahan	20	20		22	0	25	0	26	0	27	0	27	Kantor Komunikasi dan Informasi		
		Jumlah aplikasi Teknologi Informasi layanan SKPD	2	2		2	0	2	0	2	0	2	0	2	Kantor Komunikasi dan Informasi		
1 25 1.25.1.25 16	Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	Keberadaan website milik Pemerintah Daerah	ada	ada	119	ada	177	ada	239	ada	322	ada	435	ada	Kantor Komunikasi dan Informasi		
1 25 1.25.1.25 17	Program fasilitas peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Cakupan SKPD/Kec/BUMN/BUMD/BUMS yang mengikuti pelatihan	80	80	257	80	383	80	516	80	695	80	940	80	Kantor Komunikasi dan Informasi		
1 25 1.25.1.25 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Jumlah pelaksanaan pameran/expo	3	3	1.439	3	2.140	3	2.887	3	3.883	3	5.252	3	Kantor Komunikasi dan Informasi		
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: a. Media massa seperti majalah, dan radio	4000,36	4000,36		4000,36		4000,36		4000,36		4000,36		4000,36	Kantor Komunikasi dan Informasi		
		b. Media baru seperti website (media online);	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada	Kantor Komunikasi dan Informasi		
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	4	4		4		4		4		4		4	Kantor Komunikasi dan Informasi		
1 26	KEARSIPAN				1.723		2.563		3.457		4.650		6.289				
1 26 1.26.01	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi				1.723		2.563		3.457		4.650		6.289				
1 26 1.26.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	518	100	128	100	173	100	232	100	314	100	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi		
1 26 1.26.01 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	224	100	154	100	207	100	279	100	377	100	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi		
1 26 1.26.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	70	60	103	65	138	68	186	70	252	70	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi		
1 26 1.26.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	50	100	128	100	173	100	232	100	314	100	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi		
1 25 1.26.01 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok info masy	80			80	461	80	622	80	837	80	1.132	80	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi		
1 26 1.26.01 15	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah koleksi buku perpustakaan	80	80	704	80	820	80	1.106	80	1.488	80	2.012	80	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA Akhir RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 26	1.26.01	16	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	100	100	89	100	513	100	691	100	930	100	1.258	100	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi	
1 24	1.26.01	21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	19.218	19.218	68	20.712	256	22.321	346	25.926	465	25.926	629	25.926	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi	
2			Urusan Pilihan														
2 01			PERTANIAN			59.960		85.375		115.130		154.877		209.472			
2 01	2.01.01		Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura			21.895		28.105		37.901		50.985		68.958			
2 01	2.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	1.087	100	1.487	100	2.005	100	2.697	100	3.648	100	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
2 01	2.01.01	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	320	100	537	100	725	100	975	100	1.318	100	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
2 01	2.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	100	60	149	65	201	68	270	70	365	70	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
2 01	2.01.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	158	100	207	100	279	100	376	100	508	100	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
2 01	2.01.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	16,33	16,33	1.241	20,41	1.917	23,47	2.585	26,53	3.477	29,59	4.703	29,59	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
2 01	2.01.01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian /Perkebunan)	40%	40%	15.131	55%	18.053	65%	24.345	70%	32.749	80%	44.294	80%	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
			- Peningkatan produksi padi	5,00	5,00		5,00	0	5,00	0	5,00	0	5,00	0	5,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
			- Peningkatan produksi sayuran	5,00	5,00		5,00	0	5,00	0	6,50	0	6,50	0	6,50	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
			- Peningkatan produksi buah - buahan	4,59	4,59		4,59	0	5,35	0	5,85	0	6,50	0	6,50	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
2 01	2.01.01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	100	100	428	100	703	100	948	100	1.275	100	1.724	100	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
2 01	2.01.01	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	66,33	66,33	2.729	69,90	4.010	73,98	5.408	78,06	7.275	80,10	9.840	80,10	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
2 01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	16,29	15,92	701	15,64	1.042	15,36	1.406	15,09	1.891	14,83	2.558	14,83	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
2 01	2.01.02		Dinas Perkebunan			14.449		21.493		28.984		38.990		52.734			
2 01	2.01.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	1.496	100	2.225	100	3.001	100	4.036	100	5.459	100	Dinas Perkebunan	
2 01	2.01.02	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	740	100	1.100	100	1.484	100	1.996	100	2.700	100	Dinas Perkebunan	
2 01	2.01.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	142	60	211	65	285	68	383	70	518	70	Dinas Perkebunan	
2 01	2.01.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	278	100	413	100	557	100	750	100	1.014	100	Dinas Perkebunan	
2 01	2.01.02	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	80	80	523	80	778	80	1.049	80	1.411	80	1.908	80	Dinas Perkebunan	
2 01	2.01.02	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian /Perkebunan)	300	300	2.110	300	3.138	300	4.232	300	5.693	300	7.700	300	Dinas Perkebunan	
2 01	2.01.02	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi perkebunan	30	30	895	30	1.331	30	1.795	30	2.414	30	3.265	30	Dinas Perkebunan	
2 01	2.01.02	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	80	80	439	80	653	80	881	80	1.185	80	1.602	80	Dinas Perkebunan	
2 01	2.01.02	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	80	80	7.828	80	11.643	80	15.701	80	21.122	80	28.568	80	Dinas Perkebunan	
2 01	2.01.03		Dinas Peternakan dan Perikanan			12.642		18.805		25.359		34.113		46.138			
2 01	2.01.03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	1.063	100	1.581	100	2.132	100	2.868	100	3.879	100	Dinas Peternakan dan Perikanan	
2 01	2.01.03	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	871	100	1.295	100	1.746	100	2.349	100	3.177	100	Dinas Peternakan dan Perikanan	
2 01	2.01.03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	294	60	437	65	589	68	793	70	1.072	70	Dinas Peternakan dan Perikanan	
2 01	2.01.03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	93	100	139	100	187	100	251	100	340	100	Dinas Peternakan dan Perikanan	
2 01	2.01.03	21	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	40%	40%	1.192	55%	1.774	65%	2.392	70%	3.218	80%	4.352	80%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
			Tingkat kematian ternak Ternak Besar	1	1		1	0	1	0	1	0	1	0	1	Dinas Peternakan dan Perikanan	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab	
				2014		2015		2016		2017		2018						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Tingkat kematian ternak Ternak Kecil	1	1		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Dinas Peternakan dan Perikanan	
		Tingkat kematian ternak Ternak Unggas	5	5		5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	Dinas Peternakan dan Perikanan	
2	01	2.01.03	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Hasil Peternakan:		4.346		6.464		8.717		11.727		15.861		0%	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Daging	8.478	8.908		9.130	0	9.359	0	9.593	0	9.833	0	9.833	Dinas Peternakan dan Perikanan	
				Telur	5.576	5.824		5.952	0	6.083	0	6.217	0	6.353	0	6.353	Dinas Peternakan dan Perikanan	
2	01	2.01.03	23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Produksi produk hasil olahan peternakan		134	803	137	1.194	140	1.610	144	2.166	147	2.930	147	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	05	2.01.03	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	4.165	4.665	2.362	5.224	3.513	5.747	4.737	6.322	6.373	6.954	8.619	6.954	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	05	2.01.03	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Konsumsi ikan	15	30	607	30.350	903	30.490	1.218	30.640	1.639	30.770	2.216	30.770	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Produksi produk hasil olahan perikanan	316	331		348	0	365	0	384	0	403	0	403	Dinas Peternakan dan Perikanan	
2	05	2.01.03	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Cakupan luasan pelestarian sumberdaya perairan umum	10	10	422	10	628	10	847	10	1.139	10	1.541	10	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	05	2.01.03	25	Program Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perikanan	20	20	589	40	877	60	1.182	80	1.590	100	2.151	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	01	2.01.04		Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan			10.974		16.972		22.887		30.789		41.642			
2	01	2.01.04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	1.217	100	1.697	100	2.289	100	3.079	100	4.164	100	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.04	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	3.010	100	5.092	100	6.866	100	9.237	100	12.493	100	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.04	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	205	60	170	65	229	68	308	70	416	70	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.04	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	194	100	170	100	229	100	308	100	416	100	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.04	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani			2.295		2.546		3.433		4.618		6.246	0%	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.04	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian /Perkebunan)	Cakupan bina kelompok petani	80%			80%	339	80%	458	80%	616	80%	833	80%	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.04	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	16,21	15,92	487	15,64	339	15,36	458	15,09	616	14,83	833	14,83	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.04	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi Produksi kelompok petani	80%	80%	184	80%	170	80%	229	80%	308	80%	416	80%	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.04	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	persentase penyuluh yang memiliki sertifikasi profesi	80%	80%	3.381	80%	3.394	80%	4.577	80%	6.158	80%	8.328	80%	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	02	2.01.04	21	Program pemberdayaan penyuluh kehutanan lapangan	Cakupan Jumlah Kelompok Binaan kehutanan	80%			80%	2.376	80%	3.204	80%	4.310	80%	5.830	80%	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	05	2.01.04	22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan Jumlah Kelompok Binaan Perikanan	80%			80%	679	80%	915	80%	1.232	80%	1.666	80%	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	02			KEHUTANAN			4.534		5.945		8.017		10.784		14.586			
2	02	2.02.01		Dinas Kehutanan			4.534		5.945		8.017		10.784		14.586			
2	02	2.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	750	100	1.198	100	1.615	100	2.173	100	2.939	100	Dinas Kehutanan
2	02	2.02.01	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	688	100	1.006	100	1.356	100	1.825	100	2.468	100	Dinas Kehutanan
2	02	2.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50	55	50	60	74	65	99	68	134	70	181	70	Dinas Kehutanan
2	02	2.02.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	118	100	176	100	238	100	320	100	432	100	Dinas Kehutanan
2	02	2.02.01	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	cakupan sumber daya hutan yang di manfaatkan	40%	40%	142	55%	360	65%	485	70%	653	80%	883	80%	Dinas Kehutanan
2	02	2.02.01	16	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	90%	90%	1.925	90%	1.934	90%	2.609	90%	3.509	90%	4.746	90%	Dinas Kehutanan
2	02	2.02.01	17	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	cakupan Sumber daya hutan yang di lindungi	90%	90%	478	90%	627	90%	845	90%	1.137	90%	1.538	90%	Dinas Kehutanan
2	02	2.02.01	19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Persentase kerusakan kawasan hutan	7,12	7,05	172	6,98	256	6,64	346	6,4	465	6,2	629	6,2	Dinas Kehutanan
2	02	2.02.01	20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	cakupan perencanaan dan pengembangan hutan	90%	90%	54	90%	81	90%	109	90%	147	90%	198	90%	Dinas Kehutanan
2	02	2.02.01	22	Program penatagunaan hutan	cakupan penataan hutan	90%	90%	157	90%	233	90%	314	90%	423	90%	572	90%	Dinas Kehutanan
2	03			ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL			14.159		17.685		23.849		32.082		43.391			
2	03	2.03.01		Dinas Pertambangan Dan Energi			14.159		17.685		23.849		32.082		43.391			
2	03	2.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	1.479	100	2.200	100	2.967	100	3.991	100	5.398	100	Dinas Pertambangan Dan Energi

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PENANGGUNG JAWAB/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA Akhir RPJMD (2018)	SKPD Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2 03	2.03.01	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	2.846	100	2.820	100	3.803	100	5.116	100	6.919	100	Dinas Pertambangan Dan Energi	
2 03	2.03.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	326	60	485	65	654	68	880	70	1.191	70	Dinas Pertambangan Dan Energi	
2 03	2.03.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	107	100	160	100	215	100	289	100	391	100	Dinas Pertambangan Dan Energi	
2 03	2.03.01	15	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	100%	100%	1.022	100%	1.520	100%	2.050	100%	2.757	100%	3.729	100%	Dinas Pertambangan Dan Energi	
2 03	2.03.01	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	2,5%	2,4%	70	2,4%	104	2,4%	140	2,4%	189	2,4%	255	2,4%	Dinas Pertambangan Dan Energi	
2 03	2.03.01	17	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	52%	58%	8.309	63%	10.396	69%	14.020	74%	18.860	80%	25.508	80%	Dinas Pertambangan Dan Energi	
2 06	2.06.01		PERDAGANGAN			19.462		25.442		34.310		46.155		62.424			
2 06	2.06.01		Dinas Perindustrian dan Perdagangan			19.462		25.442		34.310		46.155		62.424			
2 06	2.06.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	1.754	100	2.315	100	3.122	100	4.200	100	5.681	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 06	2.06.01	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	100	6.139	100	9.126	100	12.306	100	16.554	100	22.390	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 06	2.06.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	55	36	60	76	65	103	68	138	70	187	70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 06	2.06.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	100	100	149	100	201	100	270	100	365	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 06	2.06.01	15	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	56%	56%	467	66%	673	76%	908	86%	1.222	100%	1.652	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 06	2.06.01	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	130.371	130.371	51	143.352	331	157.575	446	173.250	600	190.500	812	190.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 06	2.06.01	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	7,5	7,8	369	8%	548	8%	739	9%	994	9%	1.345	9%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 06	2.06.01	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan				59%	254	73%	343	86%	462	100%	624	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 06	2.06.01	20	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perdagangan	35%	35%	9.345	52%	10.066	68%	13.574	84%	18.260	100%	24.696	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 07	2.06.01	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	53%	53%	239	65%	356	80%	480	90%	646	100%	874	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 07	2.06.01	16	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	9%	28%	297	31%	565	34%	762	42%	1.025	42%	1.386	42%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 07	2.06.01	18	Program penataan struktur industri	43%	43%	179	60%	267	75%	360	90%	484	100%	655	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 07	2.06.01	19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	50%	50%	486	67%	722	83%	974	100%	1.310	100%	1.772	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes/* hasil) dari kegiatan (*output/* keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Tabel 9.1.

Penentuan Indikator Kinerja Kabupaten Muara Enim 2013-2018

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3						
Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		-					
1.1	Pertumbuhan PDRB							
-	dengan migas	%	5,94	6,22	6,52	7	7,14	7,14
-	tanpa migas	%	10,82	12,07	13,46	16,76	16,76	16,76
1.2	Laju Inflasi							
-	dengan migas	%						
-	tanpa migas	%	9,22	10,06	10,97	13,06	13,06	13,06
1.3	Indeks Gini		0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26
1.4	Persentase penduduk miskin	%	12,53	11,85	11,16	10,48	9,8	9,8
1.5	Angka Pengangguran	jiwa	19.520	20.052	20.600	21.739	21.739	21.739
II	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.1	Pendidikan							
2.1.1	Angka Melek Huruf	tahun	98,88	98,89	98,90	98,93	98,93	98,93
2.1.2	Angka Rata-rata lama sekolah	tahun	7,67	7,75	7,82	7,98	7,98	7,98
2.1.3	APK SD	%	118,61	119,95	121,30	122,66	124,04	124,04
2.1.4	APK SMP/MTs	%	91,48	93,84	96,26	101,30	101,30	101,30

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
2.1.5	APK SMA/SMK/MA	%	87,03	92,81	98,98	112,57	112,57	112,57
2.1.6	APM SD/SDLB/MI	%	103,33	104,91	106,52	109,81	109,81	109,81
2.1.7	APM SMP	%	69,23	71,73	74,31	79,78	79,78	79,78
2.1.8	APM SMA	%	67,58	73,69	80,36	95,54	95,54	95,54
2.2	Kesehatan							
2.2.1	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran	18,93	16,56	14,49	11,09	11,09	11,09
2.2.2	Angka Harapan Hidup	tahun	68,42	68,62	68,81	69,20	69,20	69,20
2.2.3	Persentase Balita Gizi buruk	Persen	0,47	0,40	0,34	0,24	0,24	0,24
III	Fokus Budaya dan Olahraga							
3.1	Jumlah Grup Kesenian	buah	202	272	366	662	662	662
Aspek Pelayanan Umum								
I	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.1	Pendidikan							
1.1.1	Pendidikan Dasar							
1.1.1a	Angka partisipasi sekolah SD	persen	114,04	114,93	115,83	117,66	117,66	117,66
1.1.1b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	rasio	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
1.1.1c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.1.1d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
1.1.2	Pendidikan Menengah							
1.1.2a	Angka partisipasi sekolah SMP	persen	69,78	70,57	71,36	72,98	72,98	72,98
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama	rasio	0,17	0,16	0,15	0,13	0,13	0,13
1.1.2c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
1.1.2d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
1.1.2e	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	98,38	99,23	100,09	101,83	101,83	101,83
1.1.2f	Angka Partisipasi Sekolah SMA	persen	48,34	49,33	50,33	52,40	52,40	52,40
1.1.2g	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah atas	Rasio	0,23	0,22	0,21	0,19	0,19	0,19
1.1.2h	Rasio guru terhadap murid	Rasio	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
1.1.2i	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	Rasio	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
1.1.3a	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.4	Angka Putus Sekolah							
1.1.4a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	persen	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.1.4b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	persen	0,36	0,33	0,31	0,27	0,27	0,27
1.1.4c	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	persen	0,60	0,50	0,42	0,30	0,30	0,30
1.14.d	penurunan angka putus sekolah	persen	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62
1.1.5	Angka Kelulusan							
1.1.5a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.5b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.5c	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka melanjutkan sekolah							
1.1.5d	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	82,00	82,96	83,93	85,90	85,90	85,90
1.1.5e	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	persen	94,09	94,92	95,76	97,46	97,46	97,46
1.1.5f	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	orang	5.729,00	6.255,28	6.829,90	8.142,35	8.142,35	8.142,35
1.2	Kesehatan							
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan balita	rasio	5,47	4,90	4,38	3,51	3,51	3,51
1.2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18
1.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Rasio dokter persatuan penduduk	rasio	1,56	1,59	1,63	1,67	1,97	1,97
1.2.5	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	rasio	16,49	16,99	17,51	18,59	18,59	18,59

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	17,77	48,26	100	100	100	100
1.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	24,90	21,03	40	40	40	40
1.2.8	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	7,85	6,34	5,12	3,35	3,35	3,35
1.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	2,83	79,91	100	100	100	100
1.2.12	Cakupan puskesmas	persen	100	100	100	100	100	100
1.2.13	Cakupan Puskesmas Pembantu	persen	34,26	34,48	34,69	35,13	35,13	35,13
1.2.14	Cakupan kunjungan bayi	persen	14,34	11,55	9,31	6,04	6,04	6,04
1.2.15	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	persen	80	80	80	80	80	80
1.3	Pekerjaan Umum							
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	40%	40%	55%	65%	70%	80%
1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	rasio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	72,60	86,18	102,30	144,15	144,15	144,15

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.3.4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	rasio	9,51	9,99	10,48	11,01	11,56	3,75
1.3.5	Jumlah rumah tidak layak huni	rasio	17.886	15.886	13.886	11.886	9.886	9.886
1.3.6	Panjang Jalan dilalui roda empat	rasio	40%	40%	55%	65%	70%	80%
1.3.7	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	9,58	7,88	6,48	4,39	4	4
1.3.8	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	74,88	82,19	90,21	100	100	100
1.3.9	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	68,2	72,0	75,4	79,8	82,5	85,7
1.4	Perumahan							
1.4.1	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	persen	59,56	63,64	67,73	71,82	75,91	80
1.4.2	Rumah tangga bersanitasi	persen	58,99	63,19	67,39	71,6	75,8	80
1.4.3	Lingkungan pemukiman kumuh	persen	1,7%	1,5%	1,3%	1,2%	1,1%	1%
1.5	Penataan Ruang							
1.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	rasio	16	17	20	22	25	25
1.6	Perencanaan Pembangunan							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.6.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.6.4	Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7	Perhubungan							
1.7.1	Rasio ijin trayek	rasio	0,51	1,30	3,33	21,73	21,73	21,73
1.7.2	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah	8.015,34	8.632,84	9.297,92	10.785,75	10.785,75	10.785,75
1.7.3	Jumlah terminal angkutan umum	jumlah	3	3	3	3	4	4
1.7.4	jumlah angkutan darat	jumlah	126.909	122.425	118.098	109.899	109.899	109.899
1.7.5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	0,46	0,42	0,38	0,32	0,32	0,32
1.7.6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
1.8	Lingkungan Hidup							
1.8.1	Pencemaran status mutu air	persen	64	63	62	61	60	60

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.8.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	persen	44	58	72	86	100	100
1.9	<i>Kependudukan dan Catatan Sipil</i>							
1.9.1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	persen	0,87	1,05	1,26	1,83	1,83	1,83
1.9.2	Persentase bayi berakte kelahiran	persen	91,63	95,41	99,34	99,34	99,34	99,34
1.9.3	pasangan berakte nikah	pasang	15,72	15,45	15,19	14,67	14,67	14,67
1.9.4	Persentase kepemilikan KTP	persen	86,74	99	99	99	99	99
1.9.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	persen	51,60	54,33	57,21	63,43	63,43	63,43
1.9.6	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.9.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
1.10	<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</i>							
1.10.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	9,48	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49
1.10.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	8,39	8,39	8,40	8,41	8,41	8,41
1.10.3	Rasio KDRT	rasio	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
1.10.4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	persen	0	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.10.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	17,67	17,67	17,68	17,69	17,69	17,69
1.10.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
1.11	<i>Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera</i>							
1.11.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	rata-rata	1,36	1,36	1,35	1,33	1,33	1,33
1.11.2	Persentase Akseptor KB	persen	76	76,1	76,15	76,2	76,25	76,25
1.11.3	Cakupan peserta KB aktif	persen	76,22	76,86	77,50	78,80	78,80	78,80
1.11.4	Persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	30,32	29,25	28,23	26,28	26,28	26,28
1.11.5	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	persen	5,28	5,12	4,96	4,65	4,65	4,65
1.11.6	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	persen	78,58	78,86	79,15	79,72	79,72	79,72
1.11.7	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)		10,21	9,40	8,64	7,32	7,32	7,32
1.11.8	Cakupan bina keluarga balita (BKB ber KB)		71,06	71,12	71,18	71,29	71,29	71,29
1.11.9	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB		88,07	88,17	88,27	88,47	88,47	88,47
1.11.10	Cakupan PLKB/PKB disetiap desa/kelurahan		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.11.11	Cakupan penyediaan alat, obat kontrasepsi		-					
-	Keluarga pra sejahtera		9,41	9,42	9,43	9,45	9,45	9,45
-	% Ks I swasta		12,50	12,50	12,50	12,51	12,51	12,51
-	Pemerintah daerah		9,40	9,41	9,42	9,43	9,43	9,43
1.11.12	Cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.11.13	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	Sosial							
1.12.1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	orang	48.340	48.031	47.724	47.115	47.115	47.115
1.12.3	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen	84,44	88,02	91,75	99,70	99,70	99,70
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.13	Ketenagakerjaan							
1.13.1	Angka Partisipasi angkatan kerja	jiwa	77%	77%	77%	78%	78%	79%
1.13.2	persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	angka	23%	28%	40%	50%	55%	60%
1.13.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	72,76%	74,21%	75,66%	77,1%	78,55%	80%
1.13.4	Tingkat pengangguran terbuka	persen	5%	5%	5%	5%	5%	5%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.13.5	Persentase keselamatan dan perlindungan	persen	70,50	76,46	82,92	97,54	97,54	97,54
1.13.6	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	persen	8,00	10,67	14,22	25,28	25,28	25,28
1.14	<i>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</i>							
1.14.1	Persentase koperasi aktif	persen	74,84	79,24	83,90	94,06	94,06	94,06
1.14.2	Persentase Usaha Mikro dan kecil	persen	59,56	63,20	67,06	75,51	75,51	75,51
1.14.3	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	jumlah	113	136	163	235	235	235
1.14.4	Jumlah BPR/LKM	jumlah	2,50	3,13	3,91	6,10	6,10	6,10
1.14.5	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah	4.004	4.131	4.261	4.535	4.535	4.535
1.14.6	Usaha Menengah	jumlah	27	36	50	92	92	92
1.15	<i>Penanaman Modal</i>							
1.15.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	jumlah	20	25	25	30	30	30
1.15.2	Rasio daya serap tenaga kerja	rasio	80	80	80	80	80	80
1.15.3	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	2.732	3.468	4.308	5.550	6.550	6.550
1.16	<i>Kebudayaan</i>							
1.16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	jumlah	17	20	25	30	37	37
1.16.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	jumlah	4	4	5	6	7	9

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.16.3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.17	<i>Kepemudaan dan Olahraga</i>							
1.17.1	Jumlah organisasi pemuda	jumlah	46	47	48	51	51	51
1.17.2	Jumlah Orgasnisasi olahraga	jumlah	25	25	25	25	25	25
1.17.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	jumlah	9,01	11,60	14,94	24,76	24,76	24,76
1.17.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	jumlah	22	22	22	22	22	22
1.17.5	Lapangan Olahraga	jumlah	21	21	21	21	21	21
1.18	<i>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</i>							
1.18.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	jumlah kegiatan	2	2	2	2	2	2
1.18.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	jumlah kegiatan	1	0	1	0	1	1
1.18.3	Jumlah Linmas per jumlah 10,000 penduduk	Jumlah	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
1.18.4	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	rasio	3,64	3,78	3,93	4,25	4,25	4,25
1.18.5	Petugas perlindungan masyarakat	jumlah	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
1.18.6	Jumlah LSM		150	177	214	312	313	313
1.19	<i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i>							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.19.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.2	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	rasio	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
1.19.3	Pertumbuhan ekonomi	persen	-					
-	dengan migas	persen	5,94	6,22	6,52	7,14	7,14	7,14
-	tanpa migas	persen	10,82	12,07	13,46	16,76	16,76	16,76
1.19.4	kemiskinan	100- angka kemiskinan an	12,53	11,85	11,16	10,48	9,8	9,8
1.19.5	Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.19.6	Persentase penegakan PERDA	persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
1.19.7	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten	persen	80	80	80	80	80	80
1.20	Ketahanan Pangan							
1.20.1	Persentase Ketersediaan pangan utama							
	Beras	persen	110,17	111,27	112,39	112,00	112,00	112,00
	Daging	persen	12,42	12,48	12,54	12,60	12,66	12,66
	Telur	persen	8,04	8,24	8,24	8,24	8,87	8,87
	Ikan	persen	33,22	33,38	33,54	33,70	33,85	33,85

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.21	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>							
1.21.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	rata-rata	327,27	328,54	329,82	332,40	332,40	332,40
1.21.2	Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK	rata-rata	327,27	328,54	329,82	332,40	332,40	332,40
1.21.3	Jumlah LSM yang aktif	jumlah	0	0	0	0	0	0
1.21.4	Persentase PKK aktif	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.21.5	Persentase posyandu aktif	persen	93,17	93,84	94,51	95,88	95,88	95,88
1.21.6	Persentase Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	persen	62,50	65,11	67,82	73,59	73,59	73,59
1.21.7	Persentase pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen	62,50	65,11	67,82	73,59	73,59	73,59
1.22	<i>Statistik</i>							
	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Buku PDRB Kabupaten	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.22	<i>Kearsipan</i>							
1.22.1	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	persen	100	100	100	100	100	100
1.22.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	jumlah kegiatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.23	<i>Komunikasi dan Informatika</i>							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.23.1	Jumlah jaringan komunikasi	jumlah	33,70	51,63	51,63	51,63	51,63	51,63
1.23.2	Rasio warnet terhadap penduduk	rasio	59,18	60	70	70	70	70
1.23.3	Jumlah surat kabar nasional		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.23.4	Jumlah surat kabar daerah		10	10	10	10	10	10
1.23.5	Jumlah penyiaran radio		12	12	12	12	12	12
1.23.6	Keberadaan website milik Pemerintah Daerah	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.23.7	Jumlah pelaksanaan pameran/expo	kali	4	4	5	5	5	5
1.24	Perpustakaan							
1.24.1	Jumlah perpustakaan	buah	500	520	540	550	560	560
1.24.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	2.859	2.908	3.273	3.367	3.567,26	3.567,26
1.24.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	jumlah buku	19.217	20.711	22.321	25.926	25.926	25.926
II	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
2.1	Pertanian							
2.1.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kuintal per hektar	49,04	49,70	50,37	51,75	51,75	51,75
2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	15,92	15,64	15,36	15,09	14,83	14,83

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
2.1.3	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	persen	15,92	15,64	15,36	15,09	14,83	14,83
2.1.4	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	persen	3,41	3,31	3,20	3,00	3,00	3,00
2.1.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	8,84	8,94	9,05	9,27	9,27	9,27
2.1.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	12,79	13,17	13,56	14,37	14,37	14,37
2.1.6	Cakupan Bina Kelompok Tani	persen	47,49	48,91	50,38	53,46	53,46	53,46
2.1.7	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	persen	3,41	3,31	3,20	3,00	3,00	3,00
2.2	<i>Kehutanan</i>							
2.2.1	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	persen	90	90	90	90	90	90
2.2.2	Persentase kerusakan kawasan hutan	persen	7,05	6,98	6,64	6,4	6,2	6,2
2.3	<i>Energi dan Sumberdaya Mineral</i>							
2.3.1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	54,05	53,41	52,79	52,17	51,55	51,55
2.4	<i>Kelautan dan Perikanan</i>							
2.4.1	Produksi Perikanan Budidaya	ton per tahun	4.665	5.224	5.747	6.322	6.954	6.954
2.4.2	Konsumsi ikan	Kg/kapita /thn	30	30,350	30,490	30,640	30,770	30,770
2.5	<i>Pariwisata</i>							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
2.5.1	Kunjungan wisata	persen	21,95	35,98	61,01	70	75	75
2.6	Perdagangan							
2.6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	7,25	7,49	7,74	8,28	8,28	8,28
2.6.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	persen	34,40%	59%	73%	86%	100%	59%
2.7	Perindustrian							
2.7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (tanpa migas)	persen	7,05	7,06	7,07	7,08	7,08	7,05
2.7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	persen	85,33	85,08	84,82	84,31	84,31	84,31
2.7.3	Persentase pertumbuhan industri	persen	7	7	7	7	7	7
2.7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	28,17	31,17	34,48	42,21	42,21	42,21
Aspek Daya Saing Daerah								
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
2.1	Perhubungan							
2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	1.812.301	1.814.605	1.816.912	1.821.535	1.821.535	1.821.535
2.1.3	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	ton	10.881.419	12.463.715	14.276.097	18.729.811	18.729.811	18.729.811

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					Kondisi akhir perencanaan
			2014	2015	2016	2017	2018	
2.1.4	Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang	415.560	442.352	470.873	533.548	533.548	533.548
2.1.5	Jumlah barang melalui terminal per tahun	ton	6.662.363	7.165.125	7.705.827	8.912.718	8.912.718	8.912.718
2.2	<i>Penataan Ruang</i>							
2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	persen	80	80	80	80	80	80
2.2.2	Luas wilayah produktif	persen	80	80	80	80	80	80
2.2.3	Luas wilayah industri	persen	80	80	80	80	80	80
2.2.4	Luas wilayah banjir	persen	80	80	80	80	80	80
2.2.5	Luas wilayah kekeringan	persen	80	80	80	80	80	80
2.2.6	Luas wilayah perkotaan	persen	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
2.3	<i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i>							
2.3.1	Angka kriminalitas	kasus	400	390	380	370	350	350
2.3.2	Lama proses perizinan	hari	20,42	23,82	27,79	37,82	37,82	37,82
2.3.3	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	18	25	34	66	66	66

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pedoman pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sampai dengan Tahun 2018. Dokumen ini merupakan bentuk penjabaran secara rinci visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 ini mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025. Sehubungan dengan bersamaannya proses penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dengan RPJMD Muara Enim, maka penyusunan RPJMD Muara Enim 2013-2018 hanya berpedoman kepada dokumen-dokumen sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, RPJMD juga disusun dengan mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim, guna kesinambungan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Muara Enim di waktu yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 ini menjadi landasan dan rujukan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk masa 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-2018. Dokumen RPJMD juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk waktu 1 (satu) tahun. Program prioritas pembangunan yang termuat dalam RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan sebagaimana termuat dalam RKPD.

10.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan arahan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, sehingga kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang tidak bersamaan pelaksanaannya dengan waktu perencanaan dan penganggaran tahunan dapat tetap selaras dan tidak mengganggu proses jalannya pemerintahan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Muara Enim tetap menyusun RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 dan selanjutnya RKPD

tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. Penyusunan RKPD Tahun 2019 tersebut, berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Muara Enim dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat keterbatasan waktu bagi bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018, maka dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan melaksanakan penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2019 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten sesuai jadwal yang telah ditetapkan perundang-undangan, dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2018, serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2019.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Muara Enim 2013-2018 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yaitu pada tanggal 20 Juni 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 ini dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD. Dalam pelaksanaannya, RPJMD yang memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun akan dijabarkan oleh RKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan tahunan. RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan sebagai dasar bagi menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Muara Enim.

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dengan ditetapkannya RPJMD Muara Enim 2013-2018, meliputi:

1. RPJM Daerah Kabupaten Muara Enim merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD). Dalam pelaksanaan urusan pembangunan, SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018. Renstra SKPD tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;
2. RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD

RPJM Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. RKPD merupakan implementasi RPJMD yang program dan kegiatan SKPD-nya direncanakan harus sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah;

3. Penguatan peran para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RPJMD

Rancangan awal RPJMD dalam penyusunannya telah melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam upaya menghasilkan RPJMD Kabupaten Muara Enim yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun dan tahunan

RPJM Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 merupakan dasar untuk mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Kepala Daerah terpilih untuk masa 5 (lima) tahun dan tahunan, dimana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum serta program-program prioritas kepala daerah terpilih;

5. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD adalah sasaran dan indikator kinerja Kabupaten Muara Enim. SKPD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing;

6. Seluruh SKPD merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini berdasarkan kebutuhan masing-masing SKPD serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh SKPD setiap tahunnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan selanjutnya.